

LAPORAN EVALUASI RKPD PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN II 2023





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Hasil RKPD ini dilakukan dengan maksud memberi gambaran tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian anggaran program pembangunan di seluruh Perangkat Daerah.

Hasil yang diperoleh dari evaluasi Hasil RKPD akan menjadi masukan yang berharga bagi pelaksanaan program, baik di triwulan ataupun tahun berikutnya. Berbagai faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program dapat dipetakan sehingga dapat dirumuskan gambaran rencana tindak lanjut untuk triwulan atau tahun berikutnya. Diharapkan ke depan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancar dan baik serta mencapai target kinerja dan anggaran sesuai dengan rencana. Untuk mewujudkan sukses implementasi dari perencanaan, maka keterlibatan aktif dan koordinasi yang kontinu perlu dipertahankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Juli 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. IENDRA SOFYAN, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar BelakangI-1

1.2 Dasar HukumI-5

1.3 Maksud dan Tujuan.....I-8

1.4 MetodologiI-8

1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan InformasiI-8

1.4.2 Analisis Data dan Informasi.....I-9

1.5 Sistematika Penyajian LaporanI-10

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT ... II-1

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat 2018-2023..... II-1

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat 2018-2023 II-4

2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023II-13

2.4 Kondisi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023II-22

2.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023II-27

2.6 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 .II-49

BAB III CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN..... III-1

3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah Triwulan II Tahun 2023..... III-1

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat..... III-2

3.1.2 Ekspor dan Impor..... III-5

3.1.3 Inflasi III-7

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka III-9

3.1.5 Indeks Gini..... III-12

3.1.6 Tingkat Kemiskinan..... III-13

3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) III-15

3.2 Kemajuan Kinerja Pelaksanaan SPM Pada Triwulan II Tahun 2023 III-17

3.3 Capaian Kinerja Program Pada Triwulan II Tahun 2023 III-21



BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN

KINERJA IV-1

- 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja IV-1
- 4.2 Rekomendasi Bagi Pelaksanaan Evaluasi RKPD Provinsi..... IV-22

BAB V PENUTUP V-1

- 5.1 Kesimpulan V-1
- 5.2 Rekomendasi V-4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022 II-7

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022... II-8

Tabel 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Program II-16

Tabel 2.4 Struktur Ikhtisar APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 . II-24

Tabel 2.5 Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah Pada APBD Tahun 2023 II-26

Tabel 2.6 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Ke Dalam..... II-27

Tabel 2.7 Program Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sumber Dana APBD 2023 II-50

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sumber Dana APBD pada Triwulan II Tahun 2023 . III-19

Tabel 3.2 Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023 III-22

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja III-24

Tabel 3.4 Rata-Rata Tingkat Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 III-25

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program Pada Setiap Perangkat Daerah Pada Triwulan II Tahun 2023 III-28

Tabel 3.6 Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program Triwulan II Tahun 2023..... III-49

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program Pada Setiap Perangkat Daerah Pada Triwulan II Tahun 2023 III-62

Tabel 3.8 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Setiap Program di Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023 III-148

Tabel 3.9 Pengelompokan Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Program pada Triwulan II Tahun 2023 . III-161

Tabel 3.10 Pengelompokan Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Capaian Anggaran Program pada Triwulan II Tahun 2023 III-163

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Pada Triwulan II Tahun 2023..... III-167



Tabel 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian
Target Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat pada
Triwulan II Tahun 2023..... IV-2

Tabel 4.2 Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Kinerja pada
Triwulan II Tahun 2023..... IV-23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Perencanaan Pembangunan	I-1
Gambar 1.2 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan.....	I-3
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	II-21
Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-t- c/persen).....	III-3
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam Triwulan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....	III-4
Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-t- q/persen)	III-5
Gambar 3.4 Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Jawa Barat, Januari 2022 – Mei 2023 (Juta USD)	III-6
Gambar 3.5 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Jawa Barat, Januari 2022 – Mei 2023 (Juta USD)	III-7
Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi Jawa Barat, Juni 2021 – Juni 2023.....	III-9
Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat, 2020-2023 (persen)	III-11
Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Gini September 2018 – September 2022.....	III-13
Gambar 3.9 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2023.....	III-15
Gambar 3.10 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	III-16
Gambar 3.11 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2022 (Persen)	III-16
Gambar 3.12 Sandingan Alokasi Pendanaan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	III-165
Gambar 3.13 Alokasi Pendanaan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Proyek	III-166



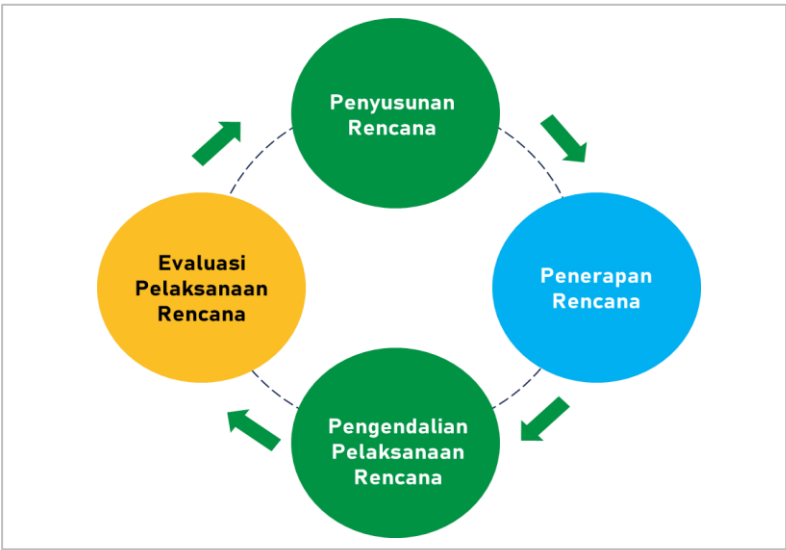
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur daya yang ada, maka dalam menentukan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan dan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif diperlukan adanya pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program maupun kegiatan.

Gambar 1.1
Tahapan Perencanaan Pembangunan



Sumber: UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap



pembangunan daerahnya. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis SPM terdiri dari 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan SPM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat cerminan negara yang sejahtera berdasarkan paradigma *Good Governance*.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Tim Penerapan SPM Daerah mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi sebagai Wakil Ketua Tim Penerapan SPM daerah harus mengawal penerapan SPM yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan.

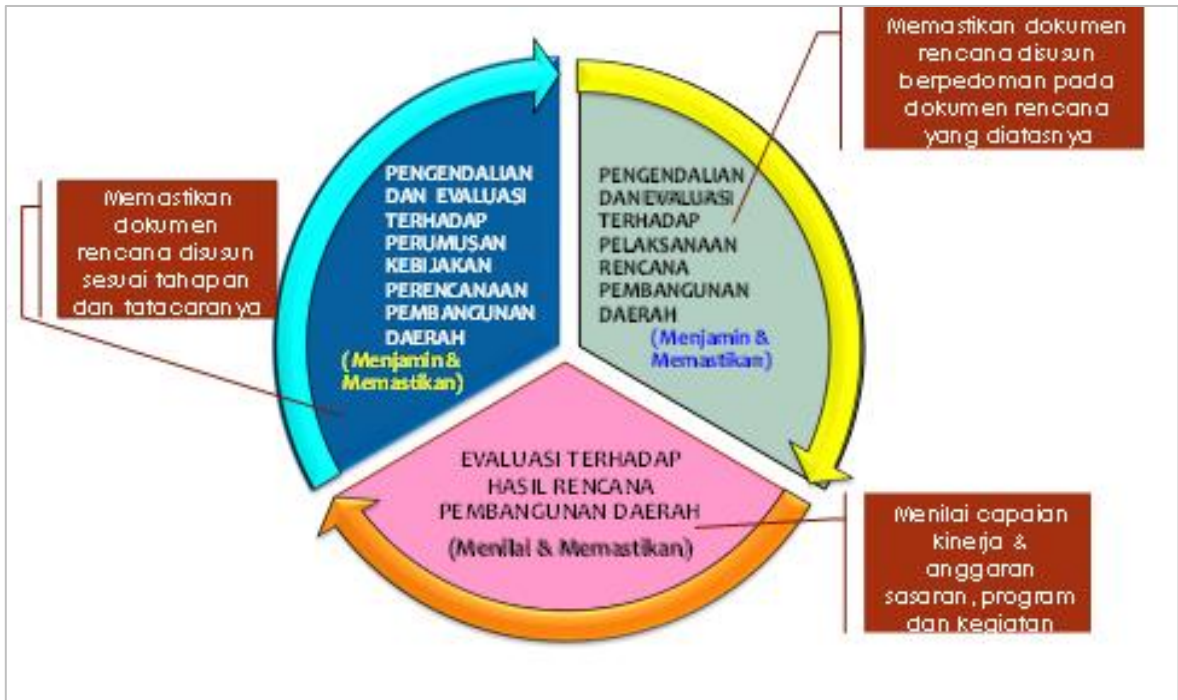
Kemudian agar seluruh program pembangunan daerah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan



pengendalian dan evaluasi intensif, serta merupakan suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan yang berlandaskan konstitusional sebagai pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Selanjutnya, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan melalui pemantauan atau monitoring dan pengawasan. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan, berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pengendalian dan evaluasi dalam dokumen pembangunan daerah yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, tahunan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 181 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Barat melakukan pengendalian dan evaluasi untuk tingkat provinsi maupun terhadap kabupaten/kota di wilayahnya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh dokumen rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dan evaluasi oleh Gubernur dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.



Perlu diketahui bahwa RKPD Tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi APBD Tahun 2023 dan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipantau dan dikendalikan untuk menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD secara berkesinambungan dan berkala.

Sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dari Bulan Januari sampai dengan Juni, maka seluruh perangkat daerah melakukan penyusunan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II. Selanjutnya, Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tersebut akan diserahkan ke Bappeda sebagai bahan untuk disusunnya Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023. Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Jawa Barat. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Evaluasi yang dilakukan sampai dengan Triwulan II mencakup capaian beberapa indikator sasaran yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Program Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan serta capaian kinerja SPM. Progres pencapaian indikator kinerja program pembangunan pada Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 ini digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, sekaligus bahan pertimbangan bagi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 118);
16. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 31).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk memperoleh gambaran progres kinerja pembangunan daerah dan memastikan ketercapaian SPM serta capaian rencana program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dari progres Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023 yaitu:

1. Teridentifikasinya konsistensi antara kebijakan perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah;
2. Teridentifikasinya tingkat capaian program Perangkat Daerah;
3. Teridentifikasinya progres kinerja pelaksanaan SPM Perangkat Daerah;
4. Teridentifikasinya faktor penghambat dan pendorong pencapaian target kinerja dan anggaran program Perangkat Daerah;
5. Tersusunnya tindak lanjut dan rekomendasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah untuk triwulan berjalan dan yang berikutnya;

1.4 Metodologi

1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi

Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 bersumber dari data Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah yang dilaporkan melalui aplikasi E-Monev Provinsi Jawa Barat (E-Monev Jabar) sesuai dengan periode pelaporan hasil kinerja Triwulan II Tahun 2023. E-Monev Jabar merupakan sistem informasi monitoring dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat realisasi dan capaian kinerja program dan kegiatan APBD sebagai bahan dalam penyusunan evaluasi kinerja pembangunan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Saat ini aplikasi E-Monev Jabar yang digunakan sudah diintegrasikan dengan Sistem SIPD sehingga *database* perencanaan dan penganggaran antar aplikasi sudah sesuai. Selain itu, terkait dengan data dan informasi capaian kinerja sasaran pembangunan daerah diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat. Adapun dalam penggunaan data capaian kinerja, apabila terdapat data yang belum rilis, maka akan digunakan data pada periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil input data pada aplikasi E-Monev Jabar dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bappeda, ada sebanyak 38 dari 38 perangkat daerah telah mengumpulkan Evaluasi Hasil Renja, yang selanjutnya diolah menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II tahun 2023. Adapun hal-hal yang dievaluasi meliputi:

1. Jumlah program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan;
2. Progres kinerja pelaksanaan SPM Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Rata-rata tingkat capaian kinerja dan anggaran pada masing-masing program dan keseluruhan program;
4. Ketepatan pengisian Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah termasuk ketepatan penginputan data dan tingkat keterisian realisasi kinerja pada aplikasi E-Monev Triwulan II Tahun 2023;
5. Pengisian faktor penghambat dan pendukung pencapaian target kinerja dan anggaran; dan
6. Ketepatan waktu penyampaian laporan evaluasi.

1.4.2 Analisis Data dan Informasi

Berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah, dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Persentase progres kinerja pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD;
2. Perhitungan rata-rata tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah di setiap Perangkat Daerah;
3. Perumusan faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja oleh perangkat daerah;
4. Perumusan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya;
5. Perumusan kesimpulan dan rekomendasi terkait Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan pelaksanaan Evaluasi RKPD, metodologi yang digunakan seperti pengumpulan atau pengolahan data dan kajian analisis, serta sistematika penyajian laporan;
2. **Bab II Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat**, memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah Tahun 2023, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023, program SPM Tahun 2023 serta konsistensi kebijakan perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah;
3. **Bab III Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**, memuat perwujudan pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam mengevaluasi konsistensi baik antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, capaian kinerja makro daerah, progres kinerja pelaksanaan SPM, realisasi indikator kinerja program serta capaian kinerja program pembangunan pada Triwulan II Tahun 2023;
4. **Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja**, memuat berbagai faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja kegiatan di masing-masing program serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan untuk merespon kondisi yang ada;
5. **Bab V Penutup**, memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.



BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat 2018-2023

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 yang difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

***"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
Dengan Inovasi dan Kolaborasi"***

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.



Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Misi Pertama, **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jawa Barat Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertakwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.
2. Misi Kedua, **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebajikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.
3. Misi Ketiga, **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.



Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Misi Keempat, **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi Kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Misi Kelima, **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan *good governance* melalui penerapan Provinsi Cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan andal.



2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat 2018-2023

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berkeTuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional;
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan;
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian



- dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat;
- (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.



Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya merupakan modal sosial yang mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Keragaman budaya Provinsi Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Indikasi pencapaian Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (*society development*);
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan;
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif;
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang andal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sebelumnya berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi,



penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS. Adapun target indikator makro serta indikator tujuan dan sasaran berdasarkan misi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target 2022	Realisasi 2022	Target*) 2023	Kondisi Akhir*)
			2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,03	72,09	72,45	72,57	73,12	73,34	73,34
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,30	1,26	1,41	1,16	1,42	1,42	1,42
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,91	7,88	8,40	7,67	7,98	7,88	7,88
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,04	10,46	9,82	10,16	8,31	8,13	8,13
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,07	-2,52	3,74	3,92	5,45	5,28	5,28
6.	Indeks Gini	Poin	0,398	0,403	0,412	0,400	0,412	0,410	0,410
7.	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	43,35	41,81	45,30	46,48	45,23	53,11	53,11

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Data Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
) RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026



Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI																	
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban																	
1.1	Terwujudnya manusia yang ber-Ketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Demokrasi (poin)	68,78	73,91	68,79 - 70,78	69,09	100,44	70,7	69,09	97,72	70,79	79,72	112,61	71,79	N/A	N/A
1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,60 – 69,00	68,5	99,85	68,1	68,5	100,59	68,6	72,7	105,98	69,1	72,21	104,5
		b.	Indeks Demokrasi (poin)	68,78	65,5	68,79 - 70,78	69,09	100,44	70,7	71,32	100,88	70,79	79,72	112,61	71,79	N/A	112,16
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif																	
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	70,69	71,3	71,42-71,91	72,03	100,85	71,82	72,09	100,38	72,19	72,45	100,36	72,57	73,12	100,76
2.1.1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	101,16	8,48	7,88	107,08	7,77	8,4	92,5	7,67	7,98	95,96
		b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,22	8,17	8,00-7,90	8,04	99,5	10,58	10,46	101,13	10,45	9,82	106,42	10,16	8,31	122,26
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	72,85	98,89	72,82	73,04	100,3	73,06	73,23	100,23	73,09	73,52	100,59
2.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,04	70,2	70,34	69,48	98,78	69,48	70,24	101,09	69,6	70,62	101,47	69,8	71,22	102,03



Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Gender dan Perlindungan Anak	b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,18	89,19	89,32	89,26	99,93	89,26	89,2	99,93	89,3	89,36	100,07	89,42	89,8	100,42
2.1.4	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,18	8,28	8,37	101,09	8,35	8,55	102,4	8,58	8,61	100,35	8,6	8,78	102,09
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13,15	12,48	94,9	12,2	12,5	102,46	12,52	12,61	100,72	12,54	12,62	100,64
2.1.5	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	46,33	49	53,63	50	93,23	49	48,83	99,65	50	49	98	52	48	92,31
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasis kearifan dan nilai budaya lokal		Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A	N/A	16,63	17,43	104,81	8,07	17,86	221,31	19,56	24,78	126,69	24,89	30,36	121,98
2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A	N/A	16,63	17,43	104,81	8,07	17,86	221,31	19,56	24,78	126,69	24,89	30,36	121,98
2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70,00-71,00	77,5	110,71	70	88,4	126,29	72	87,5	121,53	74	87,5	118,24
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah																	
3.1	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Williamson (poin)	0,678	0,673	-	0,665	-	0,664	0,692	95,78	0,659	0,667	98,8	0,655	0,67	97,76



Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1.302	100,15	1.000	1.146,60	114,66	1.050	1.280,53	121,96	1.100	1.337,16	121,56
3.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen)	40,9	41	41,00 – 43,00	46,13	112,51	38	39,06	102,79	41	43,51	106,12	44	53,2	120,91
3.1.3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,64	0,65	0,67	103,08	0,68	0,69	101,47	0,7	0,72	102,86	0,71	0,7529	106,04
3.1.4	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	0	100	1	3	300	0	2	200	1	3	300
3.2	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	104,74	60,57	61,59	101,68	60,78	62,69	103,14	61,19	64,66	105,67
3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	104,74	60,57	61,59	101,68	60,78	62,69	103,14	61,19	64,66	105,67
		b.	Tingkat upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,02	2,38	2,8	3,85	137,5	3,82	3,87	101,31	4,29	4,23	101,42	4,75	5,86	81,06
		c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	N/A	N/A	-	-		50,6	52,28	103,32	51,7	53,14	102,79	52,8	53,14	100,64



Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A	N/A	1,192	1,192	99,97	1,193	1,1927	100	1,192	1,1913	99,92	1,191	1,1878	99,71
3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	166	165	152,13	92,2	150,5	145,82	96,92	149	134,94	110,42	147	131,69	111,63
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan																	
4.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)	5,33	5,66	5,40-5,80	5,07	93,89	-2,63	-2,52	104,18	3,15	3,74	118,73	3,92	5,45	139,03
4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	85,2	89	82,4	84,8	102,91	83,2	84,1	101,08	84	84,1	100,12	84,8	92,3	108,84
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	108,39	110,9	113,11	112,36	99,34	101,1	101,41	100,29	102,3	97,84	95,69	103,4	99,75	96,48
4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,71	2,85	2,30-3,00	6,84	297,39	2,65	2,85	107,55	2,91	2,84	97,59	2,99	3,01	100,67
4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	5,35	6,49	2,63	4,04	153,61	-4,49	-4,22	106,01	2,78	4,22	151,8	3,4	7	205,88
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,55	4,19	3	7,51	250,33	-7,96	-7,94	99,75	3,23	3,19	98,76	4,01	4,22	105,24
4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	449,37	473	495,4	535,72	108,14	490,2	493,96	100,78	501,5	547,93	109,25	515,3	576,9	111,95
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	18,06	20,1	21	21,1	100,48	19	19,41	102,16	19,9	21,67	108,89	20,5	21,62	105,46



Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota																	
5.1	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100,86	A	A	100
									-78,01			78,01	78,68		82,01		
5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100,86	A	A	100
									-78,01			78,01	78,68		82,01		
5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A	N/A	50	61,22	122,44	54	73,43	135,98	56	80,24	143,29	58	86,5	149,14

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026;
Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
BPS RI, diolah.



Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 5 (lima) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 merupakan tahap pembangunan terakhir dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan arah kebijakan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Tema tersebut berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.



Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tema lanjutan dari tema-tema Pembangunan Tahunan Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023. Dimana tahap awal pencapaian kemandirian masyarakat Jawa Barat ini sudah dicanangkan pada saat tahun pertama di tahun 2019.

Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh sektor pembangunan terutama ekonomi sehingga pada tahun 2021 dilakukan upaya dengan Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah. Selanjutnya setelah Pandemi COVID-19 mulai mereda, pada tahun 2022, tema Pembangunan Jawa Barat adalah Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian.

Kemandirian diwujudkan melalui pemerataan pembangunan yang dilakukan untuk menghindari kesenjangan dengan meningkatkan berbagai sektor diantaranya infrastruktur, agribisnis, kelautan, pariwisata, dan ekonomi melalui revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta digitalisasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui hal tersebut diharapkan pada tahun 2023, masyarakat Jawa Barat sudah dapat mencapai kemandirian melalui Inovasi dan Kolaborasi sehingga dapat terwujud masyarakat Jawa Barat Juara Lahir dan Batin yang siap meraih kemajuan di segala bidang untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 21 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas



dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta (8) Pembangunan Rendah Karbon.

Seperti yang kita ketahui bersama penyebaran pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga dalam perencanaan pembangunan. Pandemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru dalam melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang - peluang yang ada. Munculnya 10 (sepuluh) tren besar yang terjadi selama pandemi, diantaranya Industri 4.0; Digital dan Data; Kebangkitan Disrupsi Digital; Perangkat pintar dan Infra; Mengubah Keseimbangan Kekuatan Ekonomi; Revitalisasi Energi; Kesehatan; Tempat Tinggal; Globalisasi; dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sepuluh tren tersebut dijadikan peluang untuk pengembangan di Jawa Barat.

Adapun berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, dapat disimpulkan 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial;



3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal yang disebutkan serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diterjemahkan dalam arahan program-program prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.3
Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui: 1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tata kelola kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat; 2. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pekerja tertentu yang belum memiliki BPJS Kesehatan; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik; 4. Kajian Rumah Sakit rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana non alam, seperti COVID-19 5. Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		6. Penguatan sistem informasi kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. (Digitalisasi Kesehatan) 7. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; 8. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% <i>Universal Health Coverage</i> (UHC); 9. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M; 10. Penguatan peran puskesmas dalam optimalisasi preventif dan promotif kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana serta SDM kesehatan; 11. Percepatan penurunan <i>Stunting</i> menuju “ <i>Jabar Zero New Stunting</i> ” melalui penguatan 8 (delapan) aksi konvergensi dan membuka peluang kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> .
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui: 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK; 2. Pelatihan <i>digital marketing</i> , fasilitasi promosi bagi UMKM dan Koperasi; 3. Kemudahan akses dan prosedur perizinan usaha dan permodalan; 4. Fasilitasi pengembangan ekspor; 5. Pengembangan program petani milenial; 6. Pembentukan wirausaha pemula berkolaborasi dengan inkubator bisnis; 7. Pengendalian harga komoditas pertanian melalui fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan; 8. Penerapan teknologi pertanian; 9. Peningkatan kereampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja kompetensi, mandiri dan migran; 10. Penempatan tenaga kerja melalui <i>Job Fair/Bursa Kerja</i> ; 11. Perlindungan dan pengembangan PMI melalui <i>Migran Cervis Center</i> PMI; 12. Pengembangan kawasan transmigrasi 13. Melakukan <i>Link and Match</i> bagi industri besar dan IKM; 14. Peningkatan daya saing produk; 15. Fasilitasi pengembangan ekspor; 16. Penguatan Produksi melalui: Peningkatan Sistem Pangan Produksi pertanian; 17. Revitalisasi pasar rakyat, melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, menengah dan perbaikan sistem distribusi barang; 18. Kemampuan Berwirausaha, melalui penciptaan tenaga kerja yang terlatih dan mandiri;



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		19. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja, melalui: Peningkatan Pelayanan dan pelaksanaan Penanaman Modal; 20. Digitalisasi Umum, melalui program OPOP dan wirausaha baru; dan 21. Pengembangan Destinasi Wisata dan ekonomi Kreatif, melalui pengembangan destinasi wisata dan Ekonomi Kreatif yang memberi dampak kepada ekonomi masyarakat.
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Melakukan penguatan sistem ketahanan pangan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, aspek akses (distribusi), dan aspek pemanfaatan, melalui: 1. Penyediaan pangan baik secara mandiri ataupun mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor impor) serta menyediakan stok cadangan pangan; 2. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3. Pemberian insentif serta mempermudah akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk biaya produksi; 4. Mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan; 5. Peningkatan jaringan irigasi dan jalan usaha tani; 6. Peningkatan kualitas SDM (penyuluh dan petani); 7. Penerapan agriculture 4.0; 8. Membangun gudang penyimpanan sesuai komoditi; 9. Merancang perubahan pola rantai pasok; 10. Stabilisasi harga pangan; 11. Optimalisasi panganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan; 12. Membangun sistem informasi satu data pangan; 13. Pengembangan <i>Food Estate</i> dan pembentukan Klaster/Kawasan Pertanian; 14. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur; dan 15. Mengembangkan Pusat Distribusi Perdagangan dan Sistem Logistik Daerah.
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Melakukan penguatan sistem perlindungan sosial melalui: 1. Peningkatan bantuan tunai dan subsidi bagi keluarga miskin; 2. Peningkatan kapasitas ekonomi bagi keluarga miskin; dan 3. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Sosial.



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	A. Penguatan sistem pendidikan melalui: 1. Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah; 2. Penguatan program vokasi; dan 3. Bantuan hukum bagi tenaga pendidik. B. Pemajuan kebudayaan untuk pembentukan karakter melalui pemanfaatan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan.
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana melalui: 1. Pengembangan sistem mitigasi bencana; 2. Pemetaan (<i>mapping</i>) daerah rawan bencana; dan 3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan yang modern.
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Melakukan peningkatan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah melalui: 1. Digitalisasi pelayanan publik (administrasi hingga prosedur perizinan usaha); 2. Peningkatan sarana dan prasarana media digital; dan 3. Pelatihan digitalisasi bagi aparaturnya terkait.
8	Gerakan Membangun Desa	Mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Melakukan peningkatan pendidikan agama dan tempat ibadah melalui: 1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola/manajemen tempat ibadah; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial pendidikan keagamaan.
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui: 1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya; 2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi; 3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan; 4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota;



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota; 6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi di wilayah REBANA; 7. Bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota; 8. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon; 9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi; 10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya melalui Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 11. Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengembangan Perumahan; 12. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas; dan 13. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis.
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 2. Pembenahan amenitas, atraksi dan akses pariwisata; 3. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal; 4. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada <i>Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability</i> (CHSE); 5. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Pembangunan pusat budaya; 7. Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif; dan 8. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

Selain penjabaran pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 melalui 11 (sebelas) program Jabar Juara, meliputi Pemerintahan Juara, Pendidikan Juara, Kesehatan Juara, Gerbang Desa Juara, Keagamaan Juara, Lingkungan Juara, Ekonomi Juara, Pembiayaan dan Investasi Juara, Infrastruktur Juara, Kesejahteraan Juara, Tenaga Kerja Juara.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023



2.4 Kondisi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat, mencatatkan rekor Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jabar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Hal tersebut menjadi catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Raperda APBD karena pada umumnya persetujuan bersama selalu ditandatangani pada akhir November, namun Raperda APBD Jawa Barat Tahun 2023 sudah ditandatangani sejak akhir Oktober 2022. Banyak hal yang menjadi nilai plus dengan percepatan persetujuan bersama Raperda APBD tersebut. Selain kinerja pemerintah daerah dengan seluruh perangkatnya bisa berjalan lebih baik, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat pada awal tahun. Hal itu membuat penyerapan anggaran diharapkan dapat lebih tinggi dan ekonomi juga diharapkan dapat bergerak lebih cepat.

Raperda APBD Jawa Barat Tahun 2023 yang diajukan merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022.

Volume APBD tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp35,019 triliun, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp34,145 triliun yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain. Belanja daerah pada APBD Tahun 2023 diproyeksikan Rp33,931 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,458 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp873,283 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2022. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp1,087 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, yaitu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD.



APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada pelaksanaannya sampai dengan akhir Juni 2022 telah mengalami 5 (lima) kali pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi. Adapun yang menyebabkan pergeseran pertama adalah dalam rangka pengalokasian dana yang mendesak untuk kebutuhan operasional Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti berupa pemeliharaan jalan operasional dan sewa alat berat. Pergeseran kedua dilakukan untuk membiayai kebutuhan pemenuhan pendanaan sarana dan prasarana Asrama Haji di Daerah Kabupaten Indramayu, pengamanan dan penanganan konflik sosial di sekitar lokasi Masjid Raya Al-Jabbar, serta hibah ke Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Pergeseran ketiga dilakukan dalam rangka membiayai kebutuhan pemenuhan pendanaan pembinaan haji dan kelengkapan penunjang petugas jemaah haji asal daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, operasional pengelolaan Masjid Raya Al-Jabbar, serta operasional angkutan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Pergeseran keempat adalah untuk membiayai kebutuhan pemenuhan pendanaan kejadian luar biasa polio, perubahan tematik/bidang/subbidang dana alokasi khusus fisik, serta dalam rangka pengendalian inflasi yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran kelima dalam rangka membiayai pemenuhan pendanaan yang mendesak untuk kebutuhan operasional Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti dan menyesuaikan pencapaian rencana dengan target yang akan dicapai, yang kesemuanya dilakukan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Adapun rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mulai dari pergeseran pertama sampai dengan kelima dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4
Struktur Ikhtisar APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Pergeseran Pertama s.d Kelima

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Sebelum Perubahan	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Pergeseran 5
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.688.886.923.717	23.688.886.923.717	23.688.886.923.717	23.688.886.923.717	23.688.886.923.717	23.688.886.923.717
01.04.1901	Pajak Daerah	21.928.395.580.782	21.928.395.580.782	21.928.395.580.782	21.928.395.580.782	21.928.395.580.782	21.928.395.580.782
01.04.1902	Retribusi Daerah	55.800.551.443	55.800.551.443	55.800.551.443	55.800.551.443	55.800.551.443	55.800.551.443
01.04.1903	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	527.524.000.000	527.524.000.000	527.524.000.000	527.524.000.000	527.524.000.000	527.524.000.000
01.04.1904	Lain-lain PAD yang Sah	1.177.166.791.492	1.177.166.791.492	1.177.166.791.492	1.177.166.791.492	1.177.166.791.492	1.177.166.791.492
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665
02.04.1901	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665	10.428.245.888.665
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598
03.04.1901	Pendapatan Hibah	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598	28.796.717.598
	Jumlah Pendapatan	34.145.929.529.980	34.145.929.529.980	34.145.929.529.980	34.145.929.529.980	34.145.929.529.980	34.145.929.529.980
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	18.144.745.934.282	18.144.745.934.282	18.202.796.077.282	18.246.718.490.022	18.266.859.986.022	18.269.342.745.382
01.05.1901	Belanja Pegawai	7.243.901.941.481	7.243.901.941.481	7.243.901.941.481	7.243.901.941.481	7.243.901.941.481	7.243.901.941.481
01.05.1902	Belanja Barang dan Jasa	6.987.907.168.411	6.987.907.168.411	6.989.257.311.411	7.015.679.724.151	7.036.914.220.151	7.039.396.979.511
01.05.1904	Belanja Subsidi	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
01.05.1905	Belanja Hibah	3.656.302.582.390	3.656.302.582.390	3.713.002.582.390	3.730.502.582.390	3.729.409.582.390	3.729.409.582.390
01.05.1906	Belanja Bantuan Sosial	246.634.242.000	246.634.242.000	246.634.242.000	246.634.242.000	246.634.242.000	246.634.242.000
5.2	BELANJA MODAL	2.546.020.486.341	2.546.020.486.341	2.546.020.486.341	2.569.860.995.969	2.571.083.235.969	2.605.624.808.310
02.05.1901	Belanja Modal Tanah	52.138.105.296	52.138.105.296	52.138.105.296	52.138.105.296	52.138.105.296	52.138.105.296
02.05.1902	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	539.373.714.642	539.373.714.642	539.373.714.642	546.754.829.632	548.115.269.632	569.912.517.632
02.05.1903	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	742.564.972.311	742.564.972.311	742.564.972.311	757.897.105.339	756.913.138.558	756.913.138.558
02.05.1904	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	941.131.621.755	941.131.621.755	941.131.621.755	942.258.883.365	943.104.650.146	955.848.974.487
02.05.1905	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	269.665.961.937	269.665.961.937	269.665.961.937	269.665.961.937	269.665.961.937	269.665.961.937



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Sebelum Perubahan	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Pergeseran 5
02.05.1906	Belanja Modal Aset Lainnya	1.146.110.400	1.146.110.400	1.146.110.400	1.146.110.400	1.146.110.400	1.146.110.400
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	248.276.894.239	248.276.894.239	190.226.751.239	122.463.828.871	101.100.092.871	64.075.761.170
03.05.1901	Belanja Tidak Terduga	248.276.894.239	248.276.894.239	190.226.751.239	122.463.828.871	101.100.092.871	64.075.761.170
5.4	BELANJA TRANSFER	12.992.427.814.796	12.992.427.814.796	12.992.427.814.796	12.992.427.814.796	12.992.427.814.796	12.992.427.814.796
04.05.1901	Belanja Bagi Hasil	9.279.558.801.499	9.279.558.801.499	9.279.558.801.499	9.279.558.801.499	9.279.558.801.499	9.279.558.801.499
04.05.1902	Belanja Bantuan Keuangan	3.712.869.013.297	3.712.869.013.297	3.712.869.013.297	3.712.869.013.297	3.712.869.013.297	3.712.869.013.297
	Jumlah Belanja	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658
	Total Surplus/(Defisit)	214.458.400.322	214.458.400.322	214.458.400.322	214.458.400.322	214.458.400.322	214.458.400.322
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970
01.06.1901	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970	873.283.244.970
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292
02.06.1901	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
02.06.1902	Penyertaan Modal Daerah	231.000.000.000	231.000.000.000	231.000.000.000	231.000.000.000	231.000.000.000	231.000.000.000
02.06.1903	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	356.741.645.292	356.741.645.292	356.741.645.292	356.741.645.292	356.741.645.292	356.741.645.292
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292
	Pembiayaan Netto	-214.458.400.322	-214.458.400.322	-214.458.400.322	-214.458.400.322	-214.458.400.322	-214.458.400.322
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-		-	-	-	-

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2023;

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023



Adapun rincian APBD yang telah dijabarkan sebelumnya dan berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah Pada
APBD Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TA 2023
1	Dinas Pendidikan	10.079.437.376.160
2	Dinas Kesehatan	1.940.961.897.006
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1.219.960.573.916
4	Dinas Sumber Daya Air	358.133.860.227
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	855.928.221.134
6	Satuan Polisi dan Pamong Praja	39.242.588.215
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.610.100.126
8	Dinas Sosial	174.795.897.006
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	137.307.781.953
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	49.647.081.331
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	169.385.439.156
12	Dinas Lingkungan Hidup	153.666.677.273
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.021.898.388
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	129.687.511.930
15	Dinas Perhubungan	166.686.126.494
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	259.934.946.103
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	104.108.173.982
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.577.830.838
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	311.622.542.228
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	118.883.166.060
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.067.433.512
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	132.440.026.491
23	Dinas Perkebunan	90.459.794.259
24	Dinas Kehutanan	235.683.670.066
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	108.874.225.769
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	143.546.238.068
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	316.309.460.450
28	Sekretariat Daerah	1.484.654.161.373
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	575.927.353.080
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88.444.166.377
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.178.955.965.183
32	Badan Pendapatan Daerah	569.503.345.174
33	Badan Kepegawaian Daerah	71.493.330.116
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.600.861.254
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.202.110.509
36	Badan Penghubung	12.481.514.452
37	Inspektorat	101.974.070.446
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	297.253.713.553
	JUMLAH	33.931.471.129.658

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2023



2.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 untuk RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Tabel 2.6
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Ke Dalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
				4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Dinas Kesehatan
				2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
				2	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
				3	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
		6	Program Pengembangan Ekspor	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
		10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	
				3	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	
		11	Program Promosi Penanaman Modal	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		13	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		14	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
				2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
		16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		17 Program Pengembangan UMKM	1 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		18 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		20 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		21 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
			3 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
			4 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
		22 Program Penempatan Tenaga Kerja	1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
		23 Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24 Program Hubungan Industrial	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
				3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	
		25	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
		2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
		3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				2	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
				3	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				4	Kesejahteraan Hewan	
		5	Program Penyuluhan Pertanian	1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				2	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
				3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				4	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	
		8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
				3	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				4	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				5	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
				3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		10	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
		12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
				2	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		13	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		14	Program Penyuluhan Pertanian	1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
				2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
		15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
				2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
		16	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan
		17	Program Penyuluhan Pertanian	1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
				2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
		18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
		2	Program Pemberdayaan Sosial	1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Sosial
				2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
		3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Dinas Sosial
		4	Program Rehabilitasi Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
				2	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
				3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
				4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
	5	1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan
				2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
				3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
		2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dinas Pendidikan
		3	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		5	Program Pengelolaan Permuseuman	1	Pengelolaan Museum Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Badan Penanggulanagn Bencana Daerah
				2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Satuan Polisi dan Pamong Praja
				2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
		3	Program Penanganan Bencana	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Dinas Sosial
		4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1	Program Kepegawaian Daerah	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
				2	Mutasi dan Promosi ASN	
				3	Pengembangan Kompetensi ASN	
				4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
				2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
		3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
				2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
		4 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
		5 Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
			2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		6 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		7 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
		8 Program Penataan Organisasi	1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi
			2 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		9 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		10 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
			2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		11 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
			2 Pendampingan dan Asistensi	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		12	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				3	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		13	Program Pendaftaran Penduduk	1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
		14	Program Pencatatan Sipil	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
		16	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	Penyediaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pengendalian Penduduk	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
		20	Program Pengelolaan Arsip	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
				3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
		21	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		22	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
				2	Fasilitasi Bantuan Hukum	
		23	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
				2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		24	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				4	Peningkatan Kapasitas DPRD	
				5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
				8	Fasilitasi Tugas DPRD	
		25	Program Pelayanan Penghubung	1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		26	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		27	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
		28	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				3	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
				4	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		29	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				3	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
		30	Program Kesejahteraan Rakyat	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
				2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
				3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
		31	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
8	Gerakan Membangun Desa	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Daerah Kabupaten/Kota	
		3	Program Penataan Desa	1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		4	Program Peningkatan kerja sama Desa	1	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan	1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Lingkungan Hidup				Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
				2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
				3	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
				4	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
		2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
				3	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
				4	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
				5	Pembinaan dan Pengawasan	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
		4 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
			3 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		5 Program Penyelenggaraan Jalan	1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		6 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
			3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		7 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan
			2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
			3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
			4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			6 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
		8 Program Pengelolaan Perkeretaapian	1 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				2	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	
		9	Program Pengelolaan Pelayaran	1	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan
				2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				3	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	
		10	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		11	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		12	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		13	Program Pengelolaan Persampahan	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air
				2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
		15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
				2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
		16	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		18	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		20	Program Pengelolaan Hutan	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dinas Kehutanan
				2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
				4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
				5	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
				6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
				7	Perbenihan Tanaman Hutan	
		21	Program Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya	1	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan
		22	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan
		23	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
		25	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
		26	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		27	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman
		28	Program Pengembangan Perumahan	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
				3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		29	Program Kawasan Permukiman	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Permukiman
		30	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		3	Program Pemasaran Pariwisata	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



2.6 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal karena Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 memiliki sejumlah aspek perbedaan dibanding Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Perbedaan tersebut misalnya pada aspek jenis dan mutu layanan. Pada aspek yang dimaksud, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan tentang teknis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target, dan batas waktu capaian. Dalam aturan tersebut juga sudah menggambarkan soal mutu minimal layanan. Sedangkan dalam aspek yang sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian, serta batas waktu capaian yang hanya mencakup penerima layanan dasar. Namun, pada regulasi tersebut belum menggambarkan mutu minimal layanan.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.



Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah provinsi yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Program Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sumber Dana APBD 2023

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.767.505.134.557
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.597.479.002.261
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	196.524.136.467



No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	505.959.339.998
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			
3	SPM Pekerjaan Umum	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	17.450.000.000
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	4.600.000.000
4	SPM Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	358.059.875
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	249.770.462.335
5	SPM Trantibum-linas	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1	4.205.323.681



No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				(satu) Daerah Provinsi	
6	SPM Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.442.481.672
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	14.778.134.767
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.720.740.200
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.806.354.493
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.139.452.814

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah



BAB III

CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan setiap tahun dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target dari program dan kegiatan akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Guna mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*output*), program (*outcome*), dan sasaran (*impact*) maka Bappeda Provinsi Jawa Barat melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah Triwulan II Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Dalam pelaksanaannya, visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi, 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran. Setiap pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator kinerja untuk mengukur dampak (*impact*) dan targetnya per tahun selama 5 (lima) tahun, dengan perubahan RPJMD di tahun ketiga yaitu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Dengan berjalannya pembangunan daerah Tahun 2023, dapat disajikan capaian beberapa indikator kinerja makro pembangunan daerah untuk Triwulan II. Namun, tidak seluruh indikator



kinerja sasaran pembangunan dapat ditampilkan karena publikasi BPS sangat terbatas untuk publikasi per periode atau per triwulan dan beberapa data menggunakan rilis data pada periode sebelumnya.

Seiring dengan berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di fase penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin mendekati kondisi sebelum pandemi COVID-19 di berbagai sektor lapangan usaha. Beroperasinya infrastruktur strategis seperti Tol Cisumdawu, Pelabuhan Patimban sebagai simpul ekspor alat transportasi nasional yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sementara pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah memasuki fase percepatan pertumbuhan dan pemerataan, dimana perekonomian Jawa Barat dapat tumbuh dan berkembang yang didorong oleh realisasi investasi proyek-proyek strategis nasional, operasionalisasi KCIC Jakarta-Bandung, serta peningkatan skala besar untuk aktivitas sektor industri, perdagangan, jasa, dan transportasi.

Capaian perekonomian Jawa Barat tahun 2022 dan awal tahun 2023 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2021, hal ini ditandai dengan:

- a. Perkembangan output produksi perekonomian secara triwulanan sejak tahun 2022 terus bertumbuh positif;
- b. Kinerja sektor-sektor ekonomi sisi pengeluaran seperti investasi, ekspor, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan fase menuju tahap penormalan;
- c. Tahun 2022 juga masih diwarnai kebijakan PPKM yang berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat namun pada level paling rendah sehingga dampak yang dirasakan terhadap sektor konsumsi relatif kecil. Pada Bulan Desember 2022, Pemerintah telah mencabut kebijakan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, yang berimplikasi pada percepatan normalisasi pergerakan dan aktivitas masyarakat sampai saat ini.

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat

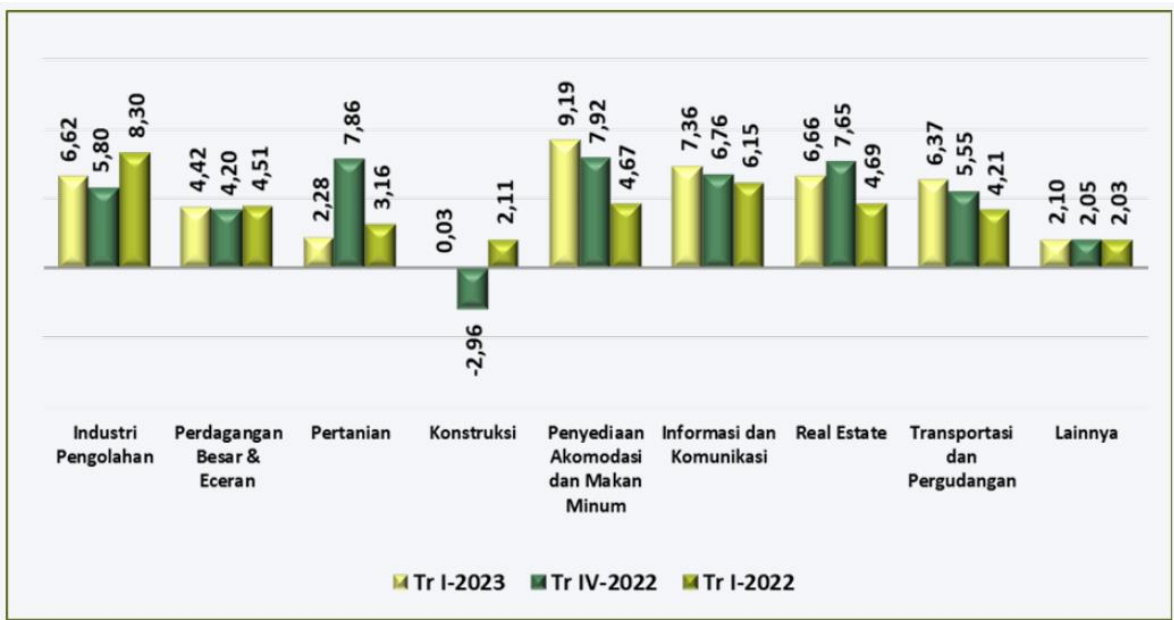
Ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2023 dibanding Triwulan I-2022 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha utama yang tumbuh cukup baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 6,62 persen;



perdagangan tumbuh 4,42 persen; pertanian tumbuh 2,28 persen dan konstruksi tumbuh 0,03 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,19 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen; Real Estate sebesar 6,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,37 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 42,53 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,42 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,50; dan Konstruksi sebesar 8,27 persen persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 73,71 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-t-c/persen)



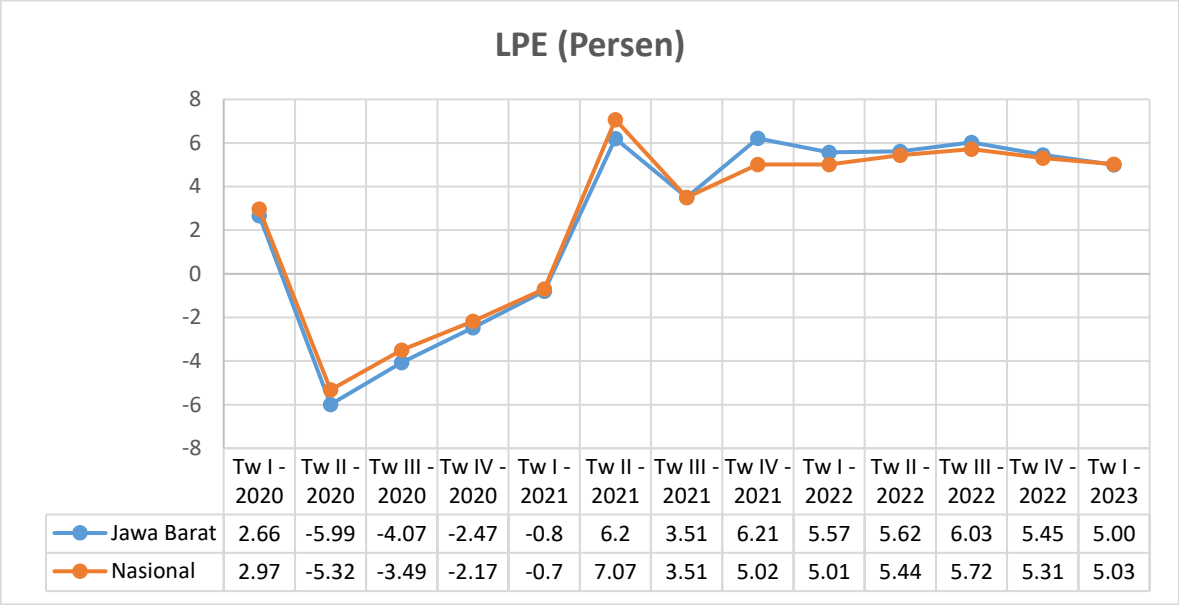
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 5,00 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen atau kinerja ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2023 melambat 5,00 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun, Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan



ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai normalnya kegiatan masyarakat dimana pada tahun lalu masih ada pembatasan-pembatasan, namun saat ini sudah tidak terlalu ketat sehingga aktivitas masyarakat juga mulai meningkat. Berikut grafik yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi mulai dari tahun 2020, tepat di saat masa pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini Triwulan I-2023.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam Triwulan
Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Januari 2023, diolah

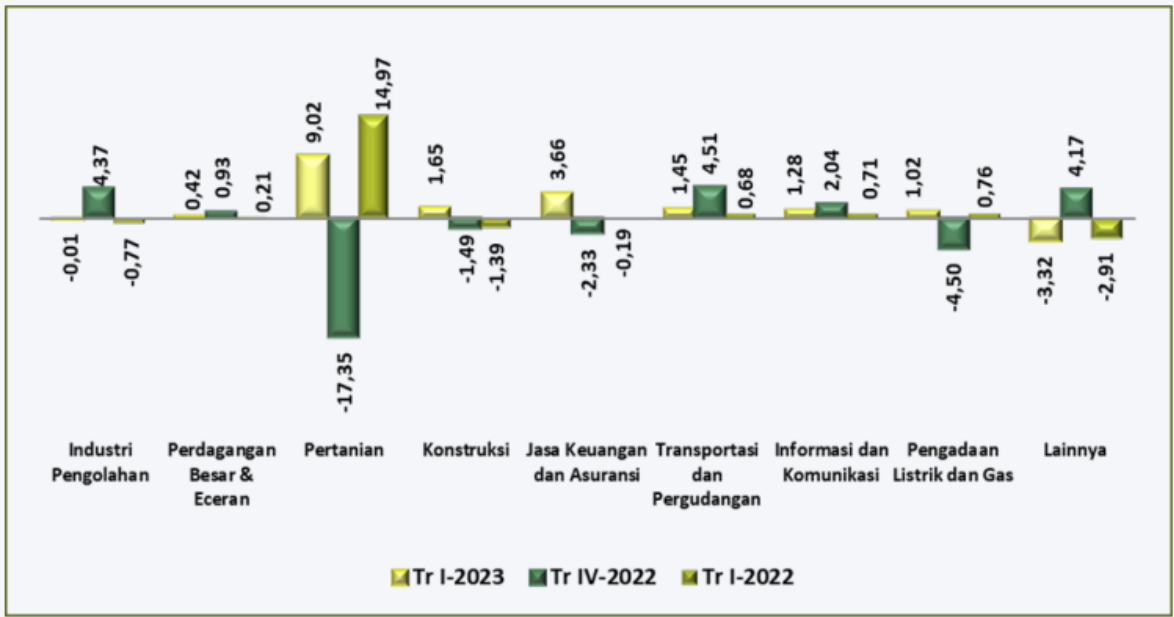
Di tengah kondisi global yang masih menghadapi berbagai krisis, perekonomian Jawa Barat masih mampu tumbuh positif di Triwulan I-2023, didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat menghadapi Bulan Ramadhan 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditopang oleh perbaikan kinerja Industri Pengolahan pada sisi produksi dan kinerja pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada sisi pengeluaran.

Perekonomian Jawa Barat pada Triwulan I-2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 0,52 persen jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2022. Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,02 persen. Di posisi berikutnya, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,66 persen; Konstruksi sebesar 1,65 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,45 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar



1,28 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan lapangan usaha dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar -0,01 persen dan 0,42 persen. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan PDRB di beberapa lapangan usaha.

Gambar 3.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-t-q/persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

3.1.2 Ekspor dan Impor

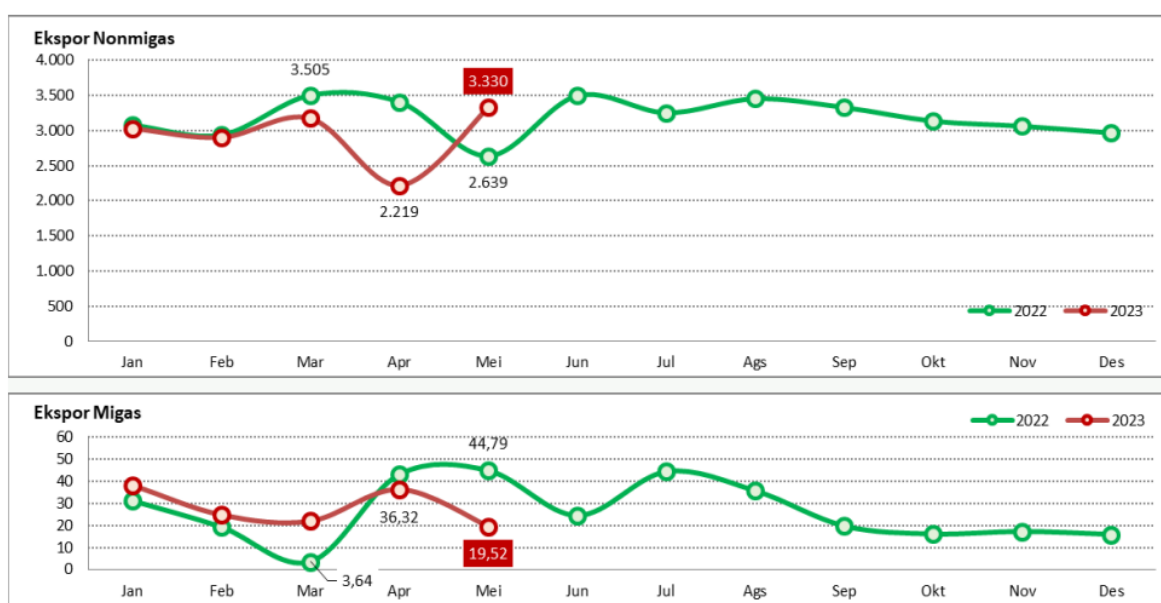
Ekspor Jawa Barat pada Mei 2023 naik sebesar 48,49 persen dibanding April 2023, yaitu dari USD 2,26 miliar menjadi USD 3,35 miliar. Demikian juga jika dibandingkan dengan Mei 2022, ekspor Jawa Barat naik 24,79 persen. Kenaikan ekspor pada Mei 2023 dibandingkan April 2023 disebabkan oleh meningkatnya ekspor Nonmigas 50,04 persen dengan kontribusi terhadap total ekspor mencapai 99,05 persen. Akan tetapi ekspor Migas turun sebesar 46,25 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Jawa Barat Januari-Mei 2023 mencapai USD 14,80 miliar atau menurun 5,82 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Demikian juga ekspor Nonmigas mencapai USD 14,66 miliar atau menurun 5,86 persen.

Kenaikan nilai ekspor Nonmigas terbesar terjadi pada Mei 2023 terhadap April 2023 yaitu untuk Golongan Kendaraan dan Bagiannya (USD 274,61 juta), diikuti Golongan Mesin dan Perlengkapan Elektrik (USD 106,31 juta) serta Golongan Mesin dan Peralatan Mekanis (USD 83,30 juta).



Menurut sektor, ekspor Nonmigas baik hasil pertanian, hasil industri pengolahan maupun hasil tambang dan lainnya pada bulan Mei 2023 mengalami kenaikan masing-masing 49,41 persen; 25,97 persen; serta 387,01 persen dibanding bulan yang sama tahun 2022. Ekspor Nonmigas Mei 2023 terbesar adalah ke Amerika Serikat, yaitu USD 556,57 juta, kemudian Filipina USD 294,09 juta, dan Jepang USD 287,56 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,18 persen.

Gambar 3.4
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Jawa Barat,
Januari 2022 – Mei 2023 (Juta USD)



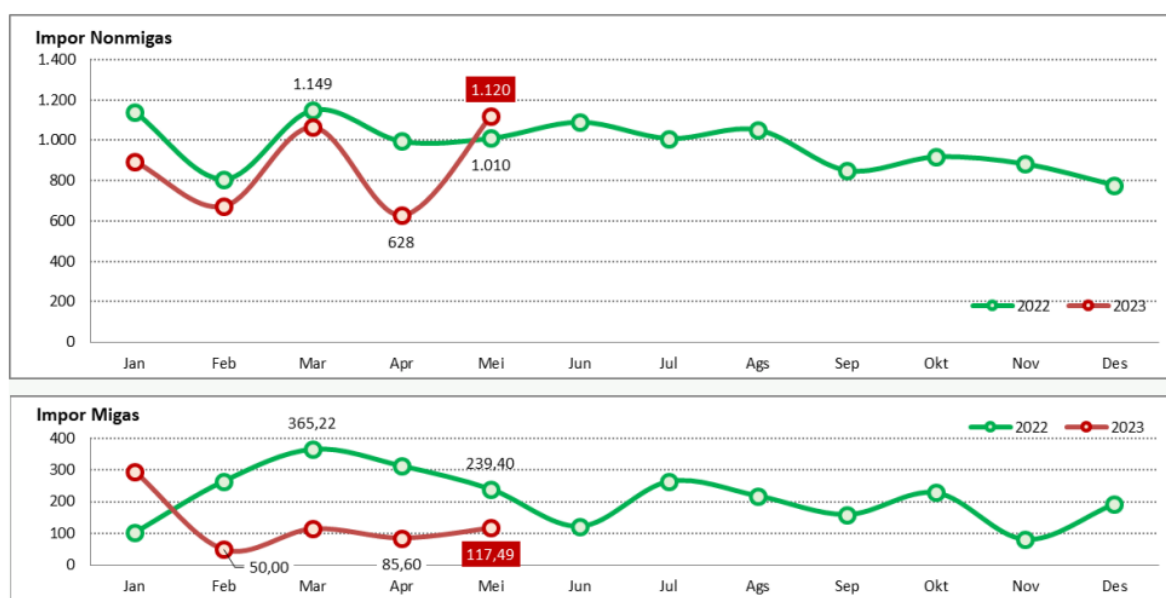
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Nilai impor Jawa Barat pada Mei 2023 mencapai USD 1,24 miliar atau meningkat 73,41 persen dibanding April 2023. Akan tetapi jika dibandingkan Mei 2022, nilai impor tersebut turun 0,90 persen. Impor Nonmigas pada Mei 2023 mencapai USD 1,12 miliar atau meningkat 78,34 persen dibanding April 2023. Demikian juga jika dibanding Mei 2022, nilainya naik 10,96 persen. Impor Migas Mei 2023 mencapai USD 117,49 juta atau naik 37,25 persen dibanding April 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Mei 2022, nilainya menurun 50,92 persen. Kenaikan nilai impor Nonmigas terbesar terjadi pada Mei 2023 terhadap April 2023 untuk Golongan Kendaraan dan Bagiannya (USD 71,41 juta), diikuti oleh Golongan Mesin dan Perlengkapan Elektrik (USD 60,80 juta), serta Golongan Mesin dan Peralatan Mekanis (USD 49,80 juta).



Negara pemasok barang impor Nonmigas terbesar selama Januari-Mei 2023 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai USD 1,31 miliar (29,79 persen), Jepang USD 0,74 miliar (16,82 persen), dan Korea Selatan USD 0,63 miliar (14,31persen). Nilai impor Nonmigas dari ASEAN bernilai 11,56 persen dari total Impor Nonmigas Jawa Barat. Nilai impor menurut golongan penggunaan, barang konsumsi serta barang modal pada Mei 2023 mengalami kenaikan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 96,96 persen dan 11,67 persen, sedangkan bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar 10,30 persen. Nilai neraca perdagangan luar negeri Jawa Barat pada Mei 2023 surplus USD 2,11 miliar, dengan demikian kumulatif Januari-Mei 2023 surplus mencapai USD 9,75 miliar.

Gambar 3.5
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Jawa Barat,
Januari 2022 – Mei 2023 (Juta USD)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

3.1.3 Inflasi

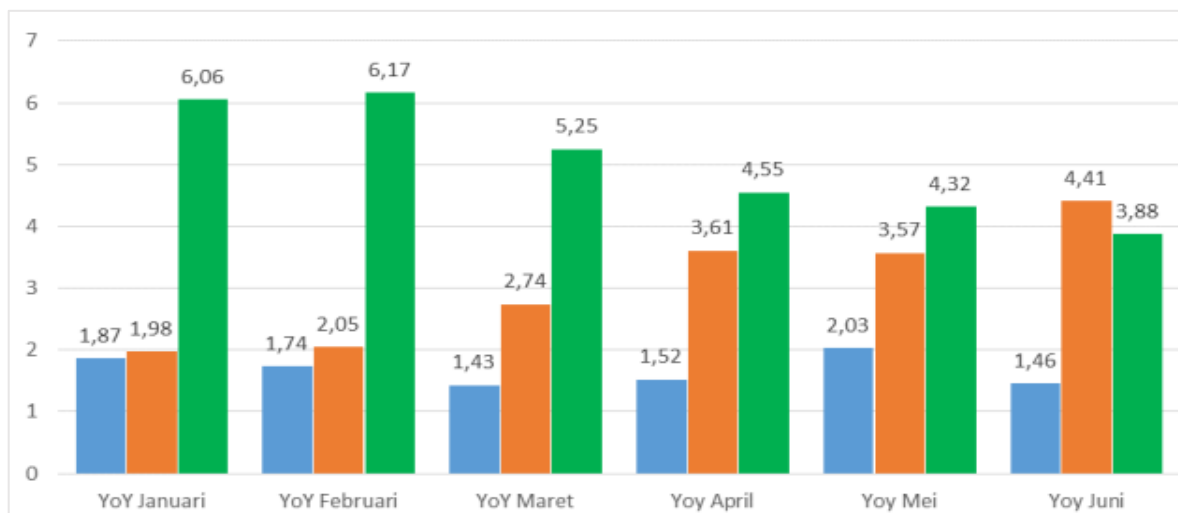
Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, pada Juni 2023 terjadi inflasi y-o-y sebesar 3,88 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,27 pada Juni 2022 menjadi 116,63 pada Juni 2023. Secara m-t-m, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,15 persen dan inflasi y-t-d sebesar 1,32 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang



ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,64 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,78 persen; kelompok transportasi sebesar 9,97 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,87 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,68 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan deflasi sebesar 0,02 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-o-y pada Juni 2023, diantaranya bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, tarif perguruan tinggi, sewa rumah, kontrak rumah, rokok putih, telur ayam ras, tarif kendaraan roda 2 (dua) *online*, angkutan antar kota, tukang bukan mandor, rokok kretek. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-o-y, diantaranya cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, daging sapi, laptop/notebook, bayam, kol putih/kubis, daun bawang. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-t-m pada Juni 2023, diantaranya kontrak rumah, daging ayam ras, telur ayam ras, rokok kretek filter, sewa rumah, jeruk, bawang putih, ketimun, ayam goreng. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-t-m, diantaranya bensin, bawang merah, cabai merah, melon, emas perhiasan, tomat, jengkol, pepaya, minyak goreng, air kemasan.

Gambar 3.6
Perkembangan Inflasi Jawa Barat,
Juni 2021 – Juni 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Barat. Penduduk usia kerja di Jawa Barat pada Februari 2023 sebanyak 38,05 juta orang, naik sebanyak 0,63 juta orang jika dibandingkan Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 25,40 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 12,65 juta orang. Komposisi angkatan kerja terdiri dari 23,39 juta orang penduduk yang bekerja dan 2,01 juta orang pengangguran.

Apabila dibandingkan dengan Februari 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 0,58 juta orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 0,65 juta orang, sementara pengangguran turun sebanyak 0,07 juta orang. Untuk lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah lapangan pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 0,20 juta orang. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 0,11 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 66,75 persen, naik 0,44 persen poin dibandingkan Februari 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya



penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2023, TPAK laki-laki sebesar 83,44 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 49,68 persen. Jika dibandingkan Februari 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,43 persen poin (dari 83,00 persen menjadi 83,44 persen) dan 0,45 persen poin (dari 49,23 persen menjadi 49,68 persen).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 7,89 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 (8,35 persen).

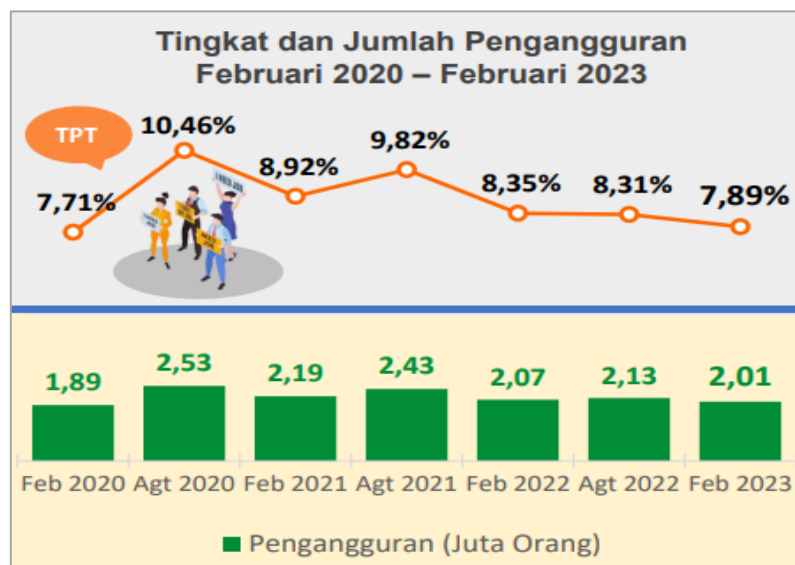
Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 8,38 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,05 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,74 persen poin sedangkan yang perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen poin jika dibandingkan Februari 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan (8,73 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (5,25 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal mengalami penurunan jika dibandingkan Februari 2022, masing-masing sebesar 0,58 persen poin dan 0,14 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 12,75 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 5,32 persen. Dibandingkan Februari 2022, penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu sebesar 2,46 persen poin.

Beberapa catatan peristiwa yang terjadi khususnya terkait Ketenagakerjaan diantaranya:

1. Luas panen padi Februari 2023 meningkat dibandingkan Februari 2022;
2. Mulai berjalannya proyek Kementan terkait pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan generasi muda di sektor pertanian;
3. Peningkatan tenaga kerja pendukung PLN unit induk distribusi Jawa Barat menjelang tahun baru Imlek awal tahun 2023;
4. Rekrutmen tenaga kerja pada proyek renovasi pembangunan rumah, sekolah, dan fasilitas umum pasca gempa bumi di Cianjur serta finalisasi proyek prioritas nasional seperti kereta cepat Bandung-Jakarta, Tol Cisumdawu-Cimalaka, dan Tol Bocimi;
5. Aktivitas sekolah, perkuliahan, perkantoran pasca pandemi COVID-19 kembali menggeliat berdampak pada meningkatnya tenaga kerja di sektor penyediaan makan minum serta festival berbagai makanan dan bahan baku lokal di Kota Bandung pada awal Februari 2023;
6. Perekrutan tenaga kerja administrasi, satuan pengamanan dan pramubakti KPU menyerap tenaga kerja di Jawa Barat pada Februari 2023;
7. Pembukaan beberapa aktivitas wisata baru dan aktifnya lokasi wisata pasca pandemi COVID-19 di Jawa Barat berdampak pada peningkatan jumlah pekerja.

Gambar 3.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat, 2020-2023 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023



3.1.5 Indeks Gini

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Barat yang diukur oleh Gini Ratio berada pada angka 0,425. Angka ini meningkat 0,013 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,412 dan meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,417. Untuk Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,439, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,427 dan juga naik jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,428, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,321, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,306 namun turun jika dibandingkan Gini Ratio pada Maret 2022 yang sebesar 0,322.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen. Tingkat ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen. Adapun tingkat ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 16,39 persen yang berarti tingkat ketimpangan Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase tersebut turun jika dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 16,78 persen dan juga turun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 16,46 persen.

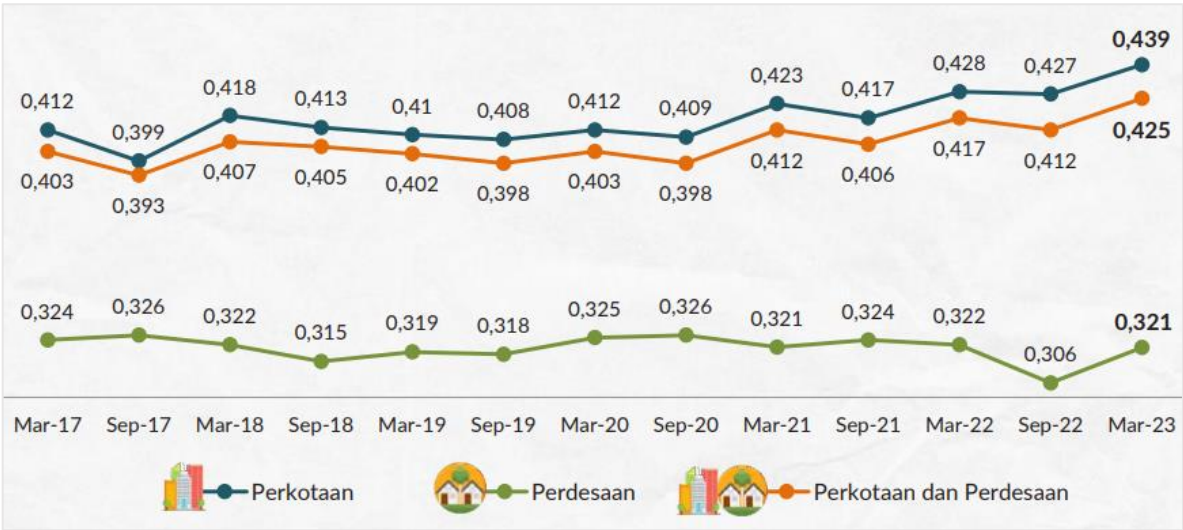
Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu ketimpangan di daerah perdesaan menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan di daerah perkotaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada Maret 2023 adalah 15,68 persen. Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2023 sebesar 20,83 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan



di Jawa Barat termasuk ke dalam ketimpangan sedang, sementara daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 (empat puluh) persen terbawah adalah sebesar 16,39 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,68 persen yang berarti juga tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Gambar 3.8
Perkembangan Indeks Gini September 2018 – September 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

3.1.6 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2023 sebesar 7,62 persen; menurun 0,36 persen poin terhadap September 2022 dan turun sebesar 0,44 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 berada pada angka 3,89 juta orang, menurun 165,02 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 182,39 ribu orang terhadap Maret 2022.

Untuk persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,57 persen, turun menjadi 7,19 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 9,88 persen, turun menjadi 9,30 persen pada Maret 2023.



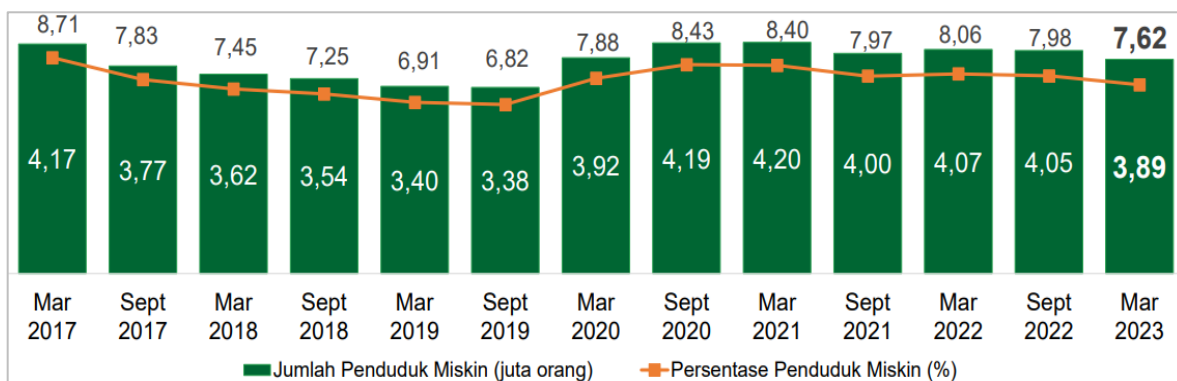
Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 96,12 ribu orang (dari 3,01 juta orang pada Maret 2022 menjadi 2,91 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 86,27 ribu orang (dari 1,06 juta orang pada Maret 2022 menjadi 0,97 juta orang pada Maret 2023). Untuk Garis Kemiskinan Jawa Barat pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp495.229/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.040 (74,12 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp128.189 (25,88 persen).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketercapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Realisasi belanja bantuan sosial dari APBD Jawa Barat pada triwulan I-2023 meningkat signifikan (*year on year*);
2. Laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Triwulan I 2023 sebesar 4,60 persen meningkat jika dibandingkan dengan Triwulan I 2022 yang sebesar 0,75 persen;
3. Secara *year on year*, pada Maret 2023 Nilai Tukar Petani meningkat 6,02 persen (105,71), dan Indeks Harga yang diterima petani meningkat 10,87 persen (120,29). Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan daya beli petani;
4. Produksi Padi sepanjang Januari-Maret 2023 sebesar 2,73 juta ton GKG, meningkat dibanding Januari-Maret 2022 yang sebesar 2,39 juta ton GKG (hasil Kerangka Sampel Area);
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode Februari 2022 ke Februari 2023 turun dari 8,35 persen menjadi 7,89 persen;
6. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kelompok Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau Maret 2023 sebesar 121,69 dan secara *year on year* Inflasi Kelompok Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau Maret 2023 sebesar 7,23 persen.



Gambar 3.9
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
Maret 2017 – Maret 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

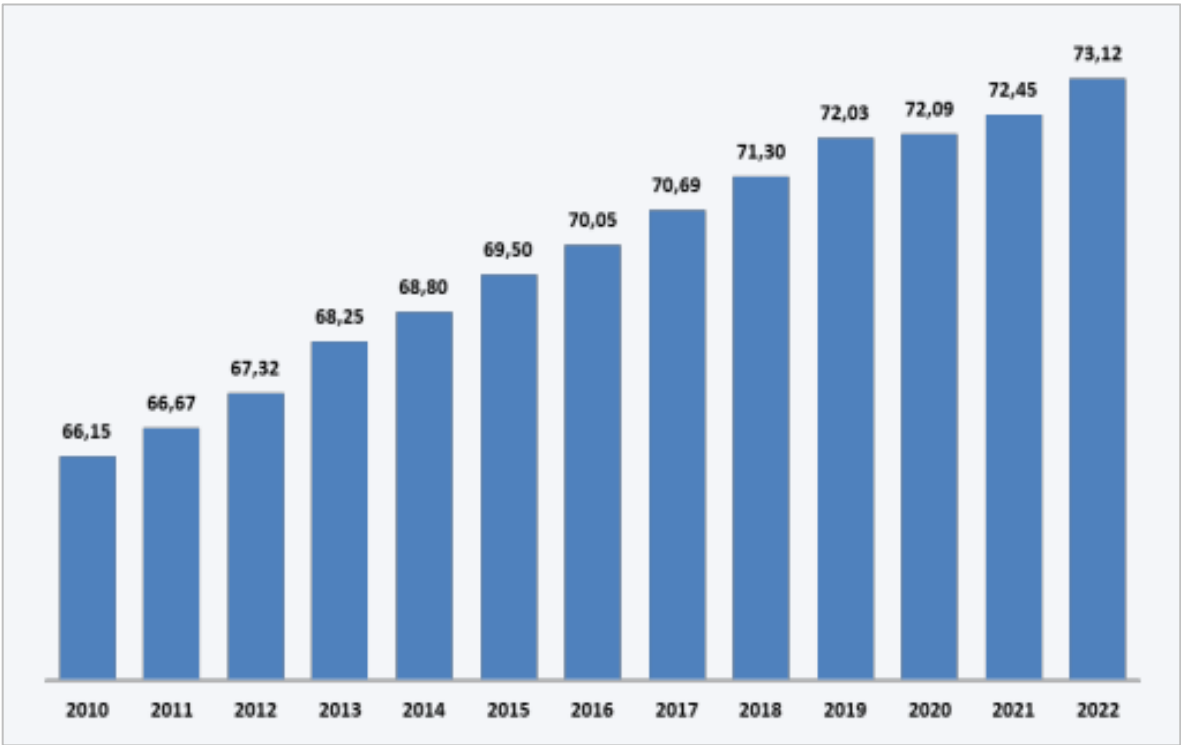
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Jawa Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Jawa Barat meningkat dari level “Sedang” menjadi “Tinggi”.

Selama 2010–2022 IPM Jawa Barat rata-rata meningkat sebesar 0,84 persen per tahun, dari 66,15 pada tahun 2010 menjadi 73,12 pada tahun 2022. Peningkatan IPM Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya mobilitas penduduk dan pemulihan ekonomi pasca pandemi virus COVID-19. Pada tahun 2022, tidak ada perubahan peringkat dan status capaian pembangunan manusia di Jawa Barat. IPM Jawa Barat menempati peringkat 10 nasional dengan status pembangunan berada pada level “tinggi”. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2010–2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

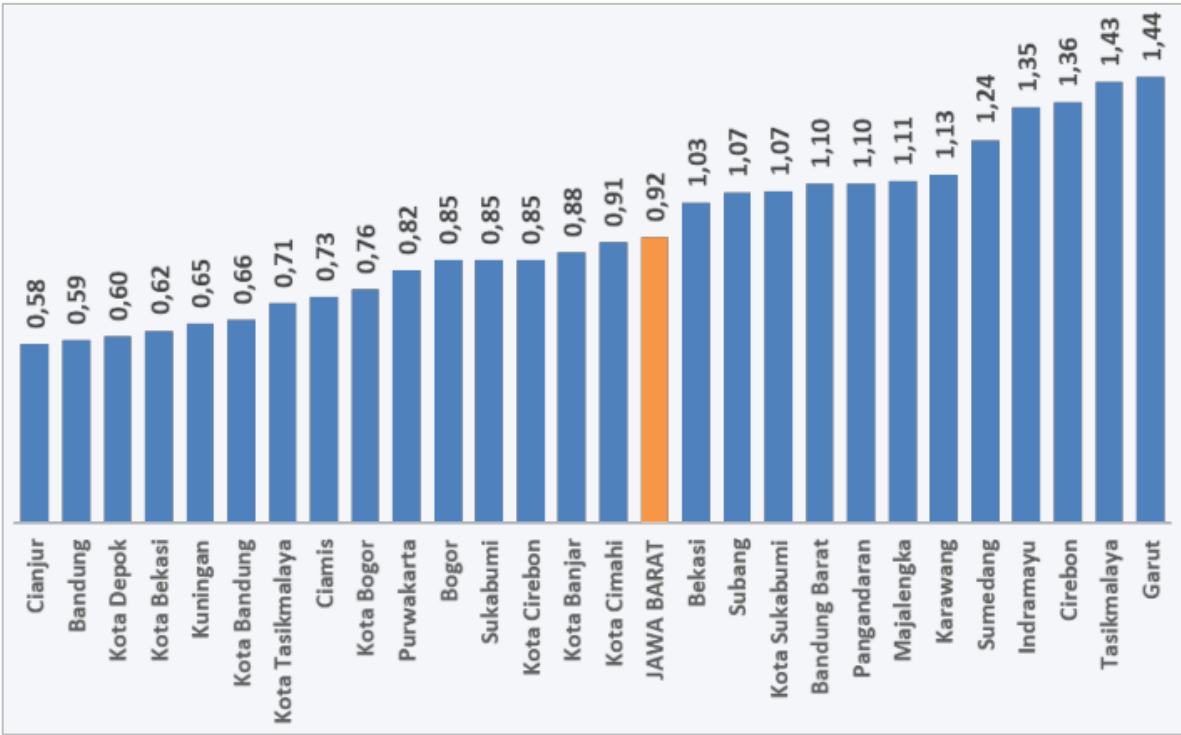


Gambar 3.10
Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2022, diolah

Gambar 3.11
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2022, diolah



3.2 Kemajuan Kinerja Pelaksanaan SPM pada Triwulan II Tahun 2023

Pelayanan dasar merupakan urusan wajib bagi Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan semua komponen dalam keseluruhan jenis pelayanan dasar untuk daerah provinsi yang termasuk dalam Pasal 3 dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Adapun jenis pelayanan yang dimaksud diantaranya:

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi;
4. Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/Kota;
6. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
7. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi;
8. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti;
9. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti;
10. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti;
11. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti;
12. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana.



SPM Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan sebagai *leading sector* pengampu pelayanan dasar yang meliputi pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah melaksanakan keseluruhan pelayanan dasar dimana pelayanan dimaksud berada pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar persen 21,96 persen. Terdapat perubahan program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dimana sebelumnya untuk pelayanan khusus termasuk di dalam Program Pengelolaan Pendidikan Khusus, akan tetapi mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa nomenklatur dalam jenis pelayanan dasar ini terdapat dalam Program Pengelolaan Pendidikan. Kinerja Pengelolaan Pendidikan pada Triwulan II tahun 2023 dibagi menjadi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Khusus.

Progres kinerja pelaksanaan SPM pada pelayanan dasar Bidang Kesehatan, yakni sebesar 46,71 persen dengan upaya yang dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Terkait dengan SPM Bidang Trantibumlimnas, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan capaian sebesar 49,02 persen. Untuk SPM pada pelayanan dasar Bidang Sosial, didukung dengan Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. Adapun capaian Program Rehabilitasi Sosial sampai dengan Triwulan II sebesar 44,55 persen. Untuk Program Penanganan Bencana didukung dengan adanya kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi yang sudah berjalan dengan cukup baik, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 73,06 persen.



SPM Bidang Pekerjaan Umum didukung dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional yang masing-masing sudah mencapai kinerja sebesar 13,54 persen dan 7,82 persen. Sedangkan untuk Bidang Perumahan didukung dengan pelaksanaan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi serta sosialisasi dan persiapan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana, dimana Program Pengembangan Perumahan yang mengampu kegiatan tersebut mencapai kinerja 52,62 persen.

Rata-rata tingkat capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan merupakan yang terendah dari semua bidang urusan SPM. Adapun kendala pencapaian kinerja tersebut, diantaranya karena adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan. Selain itu, kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan sistem penyediaan air minum dirasa kurang optimal. Ditambah lagi, kualitas air baku yang rendah dan kuantitas air baku berfluktuasi di beberapa tempat, serta sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk sehingga pendistribusian air minum belum optimal. Kemudian rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama menyangkut limbah serta masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah sistem setempat maupun sistem terpusat. Regulasi pengelolaan air limbah domestik di tingkat kabupaten/kota juga masih terbatas dan terkait pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) juga masih belum memenuhi standar dan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sumber Dana APBD pada Triwulan II Tahun 2023

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	5.581.659.393.285	1.225.718.104.875	21,96
2	SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	619.184.341.498	289.238.244.227	46,71



No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
		Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
3	SPM Pekerjaan Umum	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.450.000.000	2.362.671.010	13,54
		Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.600.000.000	359.584.093	7,82
4	SPM Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	250.128.522.210	131.625.568.303	52,62
5	SPM Trantibum-linas	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.774.672.140	7.733.486.318	49,02
6	SPM Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	26.407.691.619	11.765.769.585	44,55
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti				
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Program Penanganan Bencana	4.139.452.814	3.024.485.834	73,06

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah



3.3 Capaian Kinerja Program Pada Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan apakah target rencana kegiatan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD 2023 dapat mencapai sasaran pembangunan tahunan, berdasarkan program yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan II. Penilaian terhadap pelaksanaan program tersebut digunakan untuk mengetahui:

1. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja program yang dilaksanakan Perangkat Daerah melalui APBD Provinsi;
2. Tingkat capaian anggaran yaitu dengan membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dengan pagu anggaran yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan berdasarkan laporan realisasi APBD Provinsi.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan memberikan informasi realisasi kinerja program Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan rata-rata persentase tingkat capaian kinerjanya. Evaluasi diperoleh dari kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada DPA masing-masing Perangkat Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan evaluasi hasil RKPD Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi hasil Renja Triwulan II Tahun 2023;
2. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda;
3. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah;
4. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda;



- 6. Bappeda mengkompilasi dan menganalisis evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah menjadi evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023;
- 7. Bappeda menyusun laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 dan melaporkan kepada Gubernur.

Pelaporan evaluasi RKPD Tahun 2023 diarahkan pada data realisasi program yang dilaksanakan sampai dengan bulan Juni. Perangkat Daerah yang telah melaporkan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II sebanyak 38 dari 38 Perangkat Daerah. Dengan kata lain, seluruh Perangkat Daerah telah bekerjasama dengan baik menyampikan Laporan Evaluasi Kinerja. Pelaporan Biro di Sekretariat Daerah sudah digabung dalam Laporan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah. Jumlah program pada APBD Tahun 2023 berjumlah 203 program. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dari 203 program Perangkat Daerah, terdapat sebanyak 201 program telah dilaksanakan oleh 38 Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023, seperti tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program APBD Tahun 2023	Jumlah Program yang Sudah Berjalan/Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023	
			Program	Persentase
1	Dinas Pendidikan	3	3	100,00%
2	Dinas Kesehatan	5	5	100,00%
3	Dinas Sosial	7	7	100,00%
4	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	100,00%
5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	5	4	80,00%
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	14	14	100,00%
7	Dinas Sumber Daya Air	3	3	100,00%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	7	100,00%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	10	10	100,00%
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9	9	100,00%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	100,00%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	100,00%
13	Dinas Perhubungan	4	4	100,00%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100,00%



No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program APBD Tahun 2023	Jumlah Program yang Sudah Berjalan/Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023	
			Program	Persentase
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	8	8	100,00%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100,00%
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	4	100,00%
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	6	100,00%
19	Dinas Perkebunan	6	6	100,00%
20	Dinas Kehutanan	5	5	100,00%
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	100,00%
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	11	100,00%
23	Satuan Polisi dan Pamong Praja	2	2	100,00%
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	100,00%
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	4	80,00%
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	100,00%
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	8	100,00%
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100,00%
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	100,00%
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	100,00%
31	Inspektorat	3	3	100,00%
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	100,00%
33	Badan Penghubung	2	2	100,00%
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	100,00%
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	100,00%
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	100,00%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	100,00%
38	Sekretariat Daerah	8	8	100,00%
	JUMLAH	203	201	99,01%

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 36 Perangkat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan 2 (dua) Perangkat Daerah yang masih belum melaksanakan seluruh program yang terdapat pada Perangkat Daerah tersebut. Hal ini ditinjau dari realisasi (penyerapan) anggaran pada program Perangkat Daerah tersebut dimana realisasi anggaran program masih bernilai 0 (nol), maka diasumsikan bahwa program tersebut belum menunjukkan adanya kemajuan sampai dengan



Juni 2023. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja program yang sudah terlaksana oleh seluruh Perangkat Daerah mencapai 99,01 persen.

Adapun Perangkat Daerah yang belum melaksanakan keseluruhan program sampai dengan Triwulan II yaitu:

1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan **Program Penataan Bangunan Gedung;**
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan **Program Perizinan Penggunaan Arsip.**

Informasi lain yang diperoleh dari evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaitu pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing program yang telah dilaksanakan pada Triwulan II. Capaian kinerja Perangkat Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi dengan target kinerja yang dimuat dalam RKPD tahun 2023. Adapun capaian keuangan Perangkat Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi keuangan dan pagu yang dimuat dalam APBD tahun 2023. Penilaian tingkat kinerja dan predikat kinerja menggunakan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala nilai peringkat kinerja dibagi menjadi 5 (lima) kelompok mulai dari yang Sangat Rendah sampai dengan Sangat Tinggi.

Tabel 3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja/ Tingkat Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja/ Predikat Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil pelaporan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan pengolahan data dari kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja program Perangkat Daerah sebesar 42,16 persen. Nilai ini masih berada pada kriteria penilaian **Sangat**



Rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya sebelum Triwulan II berakhir, terdapat beberapa kegiatan masih dalam proses persiapan pelaksanaan maupun proses lelang dan pengadaan juga baru mulai berjalan;

2. Rata-rata tingkat capaian (penyerapan) anggaran kegiatan pada RKPD Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II sebesar 43,87 persen. Nilai tersebut masuk kriteria penilaian **Sangat Rendah**. Pada umumnya hal ini terjadi karena adanya pentahapan untuk proses pencairan keuangan dalam pengaturan arus kas anggaran.

Tingkat capaian anggaran dan kinerja Program Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	TRIWULAN II	
		KEUANGAN	KINERJA
1	Dinas Pendidikan	34,67	36,84
2	Dinas Kesehatan	29,49	28,92
3	Dinas Sosial	46,79	55,51
4	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	51,23	23,70
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	47,33	35,06
6	Dinas Sumber Daya Air	39,14	58,81
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56,05	53,14
8	Satuan Polisi dan Pamong Praja	54,24	9,48
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52,25	55,88
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	39,99	27,11
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	40,22	47,13
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	56,33	32,61
13	Dinas Lingkungan Hidup	29,40	38,09
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62,18	41,61
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	45,35	39,04
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	76,17	69,24
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47,29	40,19
18	Dinas Perhubungan	42,34	30,68
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54,16	39,98
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53,85	45,14
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	43,40	29,33
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	50,65	20,70
23	Dinas Kehutanan	48,41	31,97
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	45,50	37,07
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55,90	38,34
26	Dinas Perkebunan	57,48	49,86



NO	PERANGKAT DAERAH	TRIWULAN II	
		KEUANGAN	KINERJA
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	43,47	43,62
28	Sekretariat Daerah	55,69	32,19
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34,86	29,44
30	Badan Kepegawaian Daerah	48,70	47,15
31	Badan Pendapatan Daerah	37,38	49,65
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	49,50	53,74
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49,02	33,50
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42,48	55,94
35	Badan Penghubung	51,30	49,68
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,73	40,63
37	Inspektorat	43,69	35,49
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94,34	68,22
RATA-RATA		43,87	42,16

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan capaian anggaran dan kinerja Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran Program Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 43,87 persen;
2. Predikat tingkat capaian anggaran seluruh Perangkat Daerah masih Sangat Rendah dengan nilai capaian masih berada di bawah 50 persen;
3. Penyerapan atau realisasi anggaran sampai dengan mencapai Rp14.885.861.138.335,- atau baru tercapai sebesar 43,87 persen dari total Anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp33.931.471.129.658,-
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran terbesar pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu sebesar Rp280.440.440.207,- atau sekitar 94,34 persen dari pagu anggaran Rp297.253.713.553,- dan penyerapan anggaran terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp45.177.013.192,- dari total pagu anggaran Rp153.666.677.273,- atau sekitar 29,40 persen.
5. Untuk rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 42,16 persen;
6. Predikat tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah masih Sangat Rendah dengan nilai capaian masih berada di bawah 50 persen;
7. Kinerja Perangkat Daerah tertinggi dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga dengan nilai kinerja sebesar 69,24 persen dan capaian kinerja terendah pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai kinerja 9,48 persen.



Rendahnya capaian anggaran dan kinerja Program Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala umum yang dihadapi antara lain: kekurangcermatan SDM bidang perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau penempatan anggaran yang belum tepat sesuai rencana kegiatan. Selain itu, kendala sumber daya yang terbatas seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil, baik dalam kompetensi teknis maupun administratif serta ketersediaan anggaran di beberapa program Perangkat Daerah yang sangat terbatas. Kendala lain yaitu proses pengadaan yang mengalami keterlambatan, bahkan di beberapa kegiatan masih terdapat proses pengadaan belum dimulai. Ditambah lagi, banyak kegiatan yang sifatnya penyediaan, sedangkan di awal-awal tahun pelaksanaan kegiatan masih minim. Proses rotasi atau mutasi pejabat struktural yang sangat dinamis juga berpengaruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan.

Selain hal tersebut di atas, terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perangkat Daerah tidak hanya melaksanakan kegiatan reguler sesuai tugas pokok fungsinya, tetapi harus bertanggung jawab terhadap kegiatan seperti bantuan sosial, hibah maupun belanja transfer. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya realisasi (penyerapan) anggaran di beberapa kegiatan. Begitu juga permasalahan belum terampilnya SDM keuangan dalam mengoperasikan sistem SIPD perencanaan dan penganggaran serta jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Perangkat Daerah. Adanya penyesuaian PPTK yang sebelumnya diampu oleh Pejabat Pengawas yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional serta pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa masih belum optimal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaporkan, dari 38 Perangkat Daerah maka diketahui total penyerapan anggaran Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai Rp14.885.861.138.335,- dari total anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp33.931.471.129.658,-. Rincian realisasi penyerapan anggaran program di setiap Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program Pada Setiap Perangkat Daerah
Pada Triwulan II Tahun 2023

KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.696.907.915.790	5.356.253.464.214	36,44	SANGAT RENDAH
1.01.0.00.0.00. 01.0000	DINAS PENDIDIKAN	10.079.437.376.160	3.494.272.439.922	34,67	SANGAT RENDAH
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.492.777.982.875	2.267.182.978.247	50,46	SANGAT RENDAH
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.581.659.393.285	1.225.718.104.875	21,96	SANGAT RENDAH
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.000.000.000	1.371.356.800	27,43	SANGAT RENDAH
1.02.0.00.0.00. 01.0000	DINAS KESEHATAN	1.940.961.897.006	572.424.851.461	29,49	SANGAT RENDAH
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.224.780.323.617	240.361.320.856	19,62	SANGAT RENDAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	619.184.341.498	289.238.244.227	46,71	SANGAT RENDAH
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	94.860.003.811	41.936.445.919	44,21	SANGAT RENDAH
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	169.262.000	81.001.000	47,86	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.967.966.080	807.839.459	41,05	SANGAT RENDAH
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	174.795.897.006	81.788.587.441	46,79	SANGAT RENDAH
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	131.626.977.906	60.854.098.383	46,23	SANGAT RENDAH
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.646.794.248	5.631.180.876	65,12	RENDAH
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	141.182.700	71.899.360	50,93	SANGAT RENDAH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	26.407.691.619	11.765.769.585	44,55	SANGAT RENDAH
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.615.391.799	332.670.943	9,20	SANGAT RENDAH
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.139.452.814	3.024.485.834	73,06	SEDANG
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	218.405.920	108.482.460	49,67	SANGAT RENDAH
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	1.219.960.573.916	624.999.868.853	51,23	RENDAH
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.064.728.677	70.234.351.355	49,79	SANGAT RENDAH
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	501.460.081	-	0,00	SANGAT RENDAH
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.070.170.845.239	552.979.321.340	51,67	RENDAH
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.498.539.919	524.654.521	21,00	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.725.000.000	1.261.541.637	22,04	SANGAT RENDAH
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	853.765.623.134	404.164.554.950	47,34	SANGAT RENDAH
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.450.000.000	2.362.671.010	13,54	SANGAT RENDAH
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	10.384.703.130	514.757.888	4,96	SANGAT RENDAH
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.600.000.000	359.584.093	7,82	SANGAT RENDAH
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	550.000.000	110.144.980	20,03	SANGAT RENDAH
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	223.655.242.260	170.470.884.750	76,22	TINGGI
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	206.953.278.800	53.688.568.559	25,94	SANGAT RENDAH
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.930.576.734	40.642.751.396	33,33	SANGAT RENDAH
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	250.128.522.210	131.625.568.303	52,62	RENDAH
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.500.499.000	3.970.552.393	27,38	SANGAT RENDAH
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.612.801.000	419.071.578	11,60	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	39.242.588.215	21.283.360.372	54,24	RENDAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.467.916.075	13.549.874.054	57,74	RENDAH
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.774.672.140	7.733.486.318	49,02	SANGAT RENDAH
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	358.133.860.227	140.161.458.758	39,14	SANGAT RENDAH
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91.226.190.170	49.362.460.265	54,11	RENDAH
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	265.199.553.661	90.039.784.603	33,95	SANGAT RENDAH
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.708.116.396	759.213.890	44,45	SANGAT RENDAH
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.610.100.126	17.158.342.457	56,05	RENDAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.901.501.705	12.697.695.484	57,98	RENDAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.239.890.798	4.177.706.973	50,70	SANGAT RENDAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	468.707.623	282.940.000	60,37	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.576.618.328.389	818.370.576.093	51,91	RENDAH
2.11.0.00.0.00. 03.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	153.666.677.273	45.177.013.192	29,40	SANGAT RENDAH
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.116.732.714	30.177.339.422	51,05	RENDAH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.337.007.450	547.330.619	40,94	SANGAT RENDAH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.402.254.900	1.876.707.397	42,63	SANGAT RENDAH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	355.000.000	165.884.800	46,73	SANGAT RENDAH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.091.000	52.212.573	40,76	SANGAT RENDAH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	812.580.000	475.384.862	58,50	RENDAH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	147.960.000	53.552.100	36,19	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	827.574.000	375.628.254	45,39	SANGAT RENDAH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	447.566.700	160.100.665	35,77	SANGAT RENDAH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.808.442.500	1.204.941.505	42,90	SANGAT RENDAH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	83.283.468.009	10.087.930.995	12,11	SANGAT RENDAH
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.162.598.000	945.523.231	43,72	SANGAT RENDAH
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	122.852.000	39.595.806	32,23	SANGAT RENDAH
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	524.029.000	312.320.957	59,60	RENDAH
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	250.000.000	174.416.809	69,77	SEDANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.265.717.000	419.189.659	33,12	SANGAT RENDAH
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	136.807.781.848	73.734.043.814	53,90	RENDAH
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114.687.201.892	62.839.465.381	54,79	RENDAH
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.000.000	199.523.425	99,76	SANGAT TINGGI



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.547.452.838	4.607.230.031	61,04	RENDAH
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.007.377.793	4.031.097.068	40,28	SANGAT RENDAH
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.878.179.920	762.155.300	40,58	SANGAT RENDAH
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.487.569.405	1.294.572.609	52,04	RENDAH
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	49.647.081.331	22.516.742.095	45,35	SANGAT RENDAH
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.133.277.882	12.903.047.446	53,47	RENDAH
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.747.645.000	623.425.100	35,67	SANGAT RENDAH
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	897.272.280	614.901.051	68,53	SEDANG
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	51.298.800	23.375.000	45,57	SANGAT RENDAH
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	465.800.000	220.733.100	47,39	SANGAT RENDAH
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	250.649.000	185.050.400	73,83	SEDANG
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.319.680	143.876.312	31,74	SANGAT RENDAH
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	11.078.415.000	3.953.500.057	35,69	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	181.622.200	49.650.994	27,34	SANGAT RENDAH
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	10.387.781.489	3.799.182.635	36,57	SANGAT RENDAH
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	104.394.124.709	49.954.961.190	47,85	SANGAT RENDAH
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.300.946.619	47.201.423.841	52,86	RENDAH
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	300.000.000	5.594.000	1,86	SANGAT RENDAH
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	11.863.343.870	1.357.969.220	11,45	SANGAT RENDAH
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	480.746.450	230.685.850	47,98	SANGAT RENDAH
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.449.087.770	1.159.288.279	47,34	SANGAT RENDAH
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.021.898.388	7.849.124.838	52,25	RENDAH
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.367.553.751	7.019.208.174	52,51	RENDAH
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	420.000.000	202.234.026	48,15	SANGAT RENDAH
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	394.344.637	223.999.368	56,80	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	765.000.000	340.333.870	44,49	SANGAT RENDAH
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	75.000.000	63.349.400	84,47	TINGGI
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	129.687.511.930	80.642.615.836	62,18	RENDAH
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.419.530.534	28.155.224.976	52,71	RENDAH
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	797.000.000	341.557.275	42,86	SANGAT RENDAH
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	72.000.000	13.712.500	19,05	SANGAT RENDAH
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	46.187.081.515	36.686.801.922	79,43	TINGGI
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	29.211.899.881	15.445.319.163	52,87	RENDAH
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	166.686.126.494	70.577.063.744	42,34	SANGAT RENDAH
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.560.865.785	48.382.018.908	53,42	RENDAH
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	70.109.818.065	20.669.934.970	29,48	SANGAT RENDAH
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.725.405.962	889.721.082	23,88	SANGAT RENDAH
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.290.036.682	635.388.784	27,75	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.16.2.21.2.20. 01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	259.934.946.103	104.555.099.643	40,22	SANGAT RENDAH
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.010.079.584	29.601.962.084	53,81	RENDAH
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	86.033.355.505	30.732.978.974	35,72	SANGAT RENDAH
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	112.862.388.374	41.661.205.290	36,91	SANGAT RENDAH
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.272.316.740	920.687.750	40,52	SANGAT RENDAH
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.756.805.900	1.638.265.545	43,61	SANGAT RENDAH
2.17.0.00.0.00. 01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	104.108.173.982	58.640.347.158	56,33	RENDAH
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.596.172.638	17.614.139.295	45,64	SANGAT RENDAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	300.030.000	31.794.042	10,60	SANGAT RENDAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	599.899.750	230.675.942	38,45	SANGAT RENDAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000.125	139.820.592	46,61	SANGAT RENDAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	43.999.999.880	33.580.040.505	76,32	TINGGI



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6.342.728.589	1.140.365.822	17,98	SANGAT RENDAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.449.343.000	3.232.282.315	43,39	SANGAT RENDAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.520.000.000	2.671.228.645	40,97	SANGAT RENDAH
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	48.577.830.838	22.972.494.449	47,29	SANGAT RENDAH
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.791.207.838	21.581.230.093	50,43	SANGAT RENDAH
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.501.900.000	368.337.920	24,52	SANGAT RENDAH
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.150.474.000	268.494.083	12,49	SANGAT RENDAH
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	700.000.000	343.623.294	49,09	SANGAT RENDAH
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	959.400.000	262.221.470	27,33	SANGAT RENDAH
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	474.849.000	148.587.589	31,29	SANGAT RENDAH
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	311.622.542.228	237.367.262.496	76,17	TINGGI
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.622.087.381	22.035.584.446	58,57	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	24.926.599.329	13.772.559.804	55,25	RENDAH
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	241.528.855.518	194.561.352.746	80,55	TINGGI
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	7.545.000.000	6.997.765.500	92,75	SANGAT TINGGI
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	57.067.433.512	30.908.292.602	54,16	RENDAH
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.076.926.416	28.859.377.216	53,37	RENDAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.106.472.048	1.562.752.068	74,19	SEDANG
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	85.683.000	10.871.887	12,69	SANGAT RENDAH
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	677.232.348	475.291.431	70,18	SEDANG
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	121.119.700	-	0,00	SANGAT RENDAH
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	37.233.601.753	12.529.991.805	33,65	SANGAT RENDAH
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.367.604.378	8.768.626.841	50,49	SANGAT RENDAH
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.588.139.875	2.553.416.118	20,28	SANGAT RENDAH
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.677.692.500	169.204.694	4,60	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.600.165.000	1.038.744.152	28,85	SANGAT RENDAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.174.454.293.962	556.283.149.234	55,75	RENDAH
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	500.000.105	203.175.677	40,64	SANGAT RENDAH
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.105	203.175.677	40,64	SANGAT RENDAH
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	64.991.314.447	17.784.712.687	27,36	SANGAT RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	40.936.741.692	11.176.488.720	27,30	SANGAT RENDAH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.359.728.353	2.126.335.861	14,81	SANGAT RENDAH
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6.978.841.785	3.944.880.520	56,53	RENDAH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.716.002.617	537.007.586	19,77	SANGAT RENDAH
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	316.309.460.450	137.510.279.590	43,47	SANGAT RENDAH
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	156.375.839.831	84.478.625.328	54,02	RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.018.206.560	1.639.976.559	18,19	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.866.880.653	5.086.253.948	10,20	SANGAT RENDAH
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.453.087.012	14.157.790.552	53,52	RENDAH
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	133.770.836	70.400.000	52,63	RENDAH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	74.461.675.558	32.077.233.203	43,08	SANGAT RENDAH
3.27.0.00.0.00. 02.0000	DINAS PERKEBUNAN	90.459.794.259	51.993.287.227	57,48	RENDAH
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.615.062.674	30.138.784.615	61,99	RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.956.858.245	10.791.000.441	56,92	RENDAH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.850.100.929	7.210.605.072	48,56	SANGAT RENDAH
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.519.055.411	2.365.959.106	67,23	SEDANG
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	110.350.000	64.702.231	58,63	RENDAH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.408.367.000	1.422.235.762	32,26	SANGAT RENDAH
3.28.0.00.0.00. 01.0000	DINAS KEHUTANAN	235.683.670.066	114.090.703.110	48,41	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	213.013.897.007	109.631.199.329	51,47	RENDAH
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	21.539.773.184	4.133.590.091	19,19	SANGAT RENDAH
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	200.000.000	95.439.250	47,72	SANGAT RENDAH
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	529.999.875	180.775.440	34,11	SANGAT RENDAH
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	400.000.000	49.699.000	12,42	SANGAT RENDAH
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	108.874.225.769	55.142.063.001	50,65	SANGAT RENDAH
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.118.033.145	43.446.697.292	54,23	RENDAH
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	2.414.357.722	1.071.958.446	44,40	SANGAT RENDAH
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.284.100.049	1.090.883.588	47,76	SANGAT RENDAH
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	7.325.166.461	3.479.649.027	47,50	SANGAT RENDAH
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	16.732.568.392	6.052.874.648	36,17	SANGAT RENDAH
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	143.546.238.068	80.242.066.108	55,90	RENDAH
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105.283.871.301	52.082.459.090	49,47	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	339.338.860	193.227.770	56,94	RENDAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	261.334.000	113.235.420	43,33	SANGAT RENDAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.648.383.226	10.425.677.510	97,91	SANGAT TINGGI
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	5.238.721.554	2.503.897.504	47,80	SANGAT RENDAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	11.197.210.140	10.025.278.461	89,53	TINGGI
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.206.030.200	996.639.320	45,18	SANGAT RENDAH
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.829.528.984	3.696.571.613	47,21	SANGAT RENDAH
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	237.642.653	108.806.400	45,79	SANGAT RENDAH
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	304.177.150	96.273.020	31,65	SANGAT RENDAH
3.25.3.25.3.25.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	132.440.026.491	60.257.403.733	45,50	SANGAT RENDAH
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.568.822.311	37.172.496.442	53,43	RENDAH
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11.819.689.236	5.238.098.472	44,32	SANGAT RENDAH
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	37.898.869.838	13.067.735.755	34,48	SANGAT RENDAH
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9.401.607.126	2.976.911.737	31,66	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.193.056.800	1.157.111.684	52,76	RENDAH
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.557.981.180	645.049.643	41,40	SANGAT RENDAH
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	81.649.564.307	39.059.458.101	47,84	SANGAT RENDAH
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.296.860.498	28.025.824.071	56,85	RENDAH
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.560.904.826	1.510.232.655	15,80	SANGAT RENDAH
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	10.495.651.295	4.165.516.708	39,69	SANGAT RENDAH
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	12.296.147.688	5.357.884.667	43,57	SANGAT RENDAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.060.581.514.453	1.027.515.863.993	49,87	SANGAT RENDAH
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	575.927.353.080	200.747.485.735	34,86	SANGAT RENDAH
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	281.288.174.651	136.141.331.123	48,40	SANGAT RENDAH
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	294.639.178.429	64.606.154.612	21,93	SANGAT RENDAH
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	1.484.654.161.373	826.768.378.258	55,69	RENDAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	507.016.807.964	237.128.308.178	46,77	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.023.548.678	1.131.496.097	28,12	SANGAT RENDAH
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	25.011.400.000	6.296.621.042	25,18	SANGAT RENDAH
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	920.701.731.948	572.610.446.366	62,19	RENDAH
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.581.217.325	2.282.930.645	34,69	SANGAT RENDAH
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	12.675.265.778	3.686.121.875	29,08	SANGAT RENDAH
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.885.100.000	3.191.740.365	40,48	SANGAT RENDAH
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	759.089.680	440.713.690	58,06	RENDAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.023.681.293.065	6.802.442.472.185	48,51	SANGAT RENDAH
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.178.955.965.183	6.460.623.714.997	49,02	SANGAT RENDAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.332.500.052	36.275.572.161	39,29	SANGAT RENDAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.073.380.553.817	6.421.395.297.705	49,12	SANGAT RENDAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13.242.911.314	2.952.845.131	22,30	SANGAT RENDAH
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	569.503.345.174	212.873.155.251	37,38	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	496.111.845.406	199.149.149.436	40,14	SANGAT RENDAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	73.391.499.768	13.724.005.815	18,70	SANGAT RENDAH
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	26.202.110.509	12.969.025.377	49,50	SANGAT RENDAH
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.179.897.550	9.656.519.442	47,85	SANGAT RENDAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.022.212.959	3.312.505.935	55,00	RENDAH
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	12.481.514.452	6.402.821.728	51,30	RENDAH
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.693.773.432	5.508.148.821	51,51	RENDAH
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.787.741.020	894.672.907	50,04	SANGAT RENDAH
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	88.444.166.377	42.218.797.609	47,73	SANGAT RENDAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.043.793.811	31.122.644.875	51,83	RENDAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	14.516.609.651	5.944.588.251	40,95	SANGAT RENDAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.883.762.915	5.151.564.483	37,10	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	71.493.330.116	34.813.787.521	48,70	SANGAT RENDAH
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.157.517.610	29.412.806.746	54,31	RENDAH
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	17.335.812.506	5.400.980.775	31,16	SANGAT RENDAH
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	76.600.861.254	32.541.169.702	42,48	SANGAT RENDAH
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.402.248.402	27.923.996.349	50,40	SANGAT RENDAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.198.612.852	4.617.173.353	21,78	SANGAT RENDAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	101.974.070.446	44.555.172.409	43,69	SANGAT RENDAH
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	101.974.070.446	44.555.172.409	43,69	SANGAT RENDAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.883.001.369	28.953.722.950	43,29	SANGAT RENDAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	29.950.735.042	13.959.422.538	46,61	SANGAT RENDAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.140.334.035	1.642.026.921	31,94	SANGAT RENDAH
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	297.253.713.553	280.440.440.207	94,34	SANGAT TINGGI
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	297.253.713.553	280.440.440.207	94,34	SANGAT TINGGI



KODE URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM	TA. 2023		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.652.044.038	13.665.058.042	53,27	RENDAH
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.473.500.000	2.039.444.896	58,71	RENDAH
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	247.785.274.115	246.396.382.169	99,44	SANGAT TINGGI
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	16.347.014.925	15.870.663.900	97,09	SANGAT TINGGI
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.738.884.075	2.084.176.500	76,10	TINGGI
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.256.996.400	384.714.700	30,61	SANGAT RENDAH
TOTAL ANGGARAN/RATA-RATA CAPAIAN		33.931.471.129.658	14.885.861.138.335	43,87	SANGAT RENDAH

Sumber: Hasil Pengolahan Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023



Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dengan 11 (sebelas) Prioritas pembangunan adalah: (1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah; (2) Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan; (4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; (5) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; (6) Reformasi Sistem Kesiap Siagaan Penanggulangan Risiko Bencana; (7) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah; (8) Gerakan Membangun Desa; (9) Pendidikan Agama Dan Tempat Ibadah Juara; (10) Pengembangan Infra Struktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata. Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 11 (sebelas) prioritas pembangunan dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program
Triwulan II Tahun 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	REFORMASI SISTEM KESEHATAN DAERAH					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.224.780.323.617	240.361.320.856	33,42	19,62	Dinas Kesehatan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	619.184.341.498	289.238.244.227	28,20	46,71	Dinas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	94.860.003.811	41.936.445.919	27,00	44,21	Dinas Kesehatan
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	169.262.000	81.001.000	19,50	47,86	Dinas Kesehatan
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.967.966.080	807.839.459	36,50	41,05	Dinas Kesehatan
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.133.277.882	12.903.047.446	47,68	53,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	24.133.277.882	12.903.047.446	34,80	27,34	Dinas Pemberdayaan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10.387.781.489	3.799.182.635	34,40	36,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
9.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.747.645.000	623.425.100	38,43	35,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
10.	Program Perlindungan Perempuan	897.272.280	614.901.051	59,60	68,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
11.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	51.298.800	23.375.000	43,33	45,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
12.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	465.800.000	220.733.100	37,84	47,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
13.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	250.649.000	185.050.400	56,20	73,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan,
14.	Program Perlindungan Khusus Anak	453.319.680	143.876.312	9,05	31,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 1 (Reformasi Sistem Kesehatan Daerah)			36,14		
2	PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS INOVASI					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	114.687.201.892	62.839.465.381	48,43	54,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	200.000.000	199.523.425	99,00	99,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.547.452.838	4.607.230.031	42,11	61,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	10.007.377.793	4.031.097.068	27,92	40,28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Program Hubungan Industrial	1.878.179.920	762.155.300	29,90	40,58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	2.487.569.405	1.294.572.609	54,27	52,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	599.899.750	230.675.942	30,51	45,64	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	599.899.750	230.675.942	21,11	38,45	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
9.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	43.999.999.880	33.580.040.505	74,41	76,32	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
10.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.342.728.589	1.140.365.822	15,26	17,98	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
11.	Program Pengembangan UMKM	7.449.343.000	3.232.282.315	33,00	43,39	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.791.207.838	19.583.771.232	52,81	50,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.501.900.000	9.243.230	1,54	24,52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Program Promosi Penanaman Modal	2.150.474.000	228.885.300	31,75	12,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Program Pelayanan Penanaman Modal	700.000.000	214.392.162	15,47	49,09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	959.400.000	266.758.819	73,16	27,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	474.849.000	179.545.070	66,38	31,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terpadu Satu Pintu
18.	Program Perekonomian dan Pembangunan	12.675.265.778	3.686.121.875	41,68	29,08	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
19.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	105.283.871.301	52.082.459.090	36,40	49,47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	339.338.860	193.227.770	46,73	56,94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	261.334.000	113.235.420	31,15	43,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10.648.383.226	10.425.677.510	59,84	97,91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23.	Program Pengembangan Ekspor	5.238.721.554	2.503.897.504	39,36	47,80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	11.197.210.140	10.025.278.461	52,58	89,53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.206.030.200	996.639.320	13,09	45,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.829.528.984	3.696.571.613	36,23	47,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	237.642.653	108.806.400	40,63	45,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	304.177.150	96.273.020	27,35	31,65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 2 (Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi)			40,79		
3	PENGUATAN SISTEM KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	69.568.822.311	37.172.496.442	48,92	53,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.819.689.236	5.238.098.472	61,16	44,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	37.898.869.838	13.067.735.755	40,97	34,48	Dinas Kelautan dan Perikanan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	9.401.607.126	2.976.911.737	9,01	31,66	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.193.056.800	1.157.111.684	11,85	52,76	Dinas Kelautan dan Perikanan
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	89.300.946.619	47.201.423.841	35,36	52,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
7.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	11.863.343.870	1.357.969.220	40,08	11,45	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
8.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	480.746.450	230.685.850	38,65	47,98	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
9.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.449.087.770	1.159.288.279	63,61	47,34	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.850.100.929	7.210.605.072	37,28	48,56	Dinas Perkebunan
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	40.936.741.692	11.176.488.720	1,54	27,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.359.728.353	2.126.335.861	14,40	14,81	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
13.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.978.841.785	3.944.880.520	40,03	56,53	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
14.	Program Penyuluhan Pertanian	2.716.002.617	537.007.586	17,12	19,77	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
15.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.018.206.560	1.639.976.559	50,4	18,19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
17.	Program Penyuluhan Pertanian	74.461.675.558	32.077.233.203	31,31	43,08	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
18.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.956.858.245	10.791.000.441	50,12	56,92	Dinas Perkebunan
19.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.850.100.929	7.210.605.072	37,28	48,56	Dinas Perkebunan
20.	Program Perizinan Usaha Pertanian	110.350.000	64.702.231	73,33	58,63	Dinas Perkebunan
21.	Program Penyuluhan Pertanian	4.408.367.000	1.422.235.762	21,01	32,26	Dinas Perkebunan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 3			36,17		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan)					
4	REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL					
1.	Program Pemberdayaan Sosial	8.646.794.248	5.631.180.876	99,00	65,12	Dinas Sosial
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	141.182.700	71.899.360	49,57	50,93	Dinas Sosial
3.	Program Rehabilitasi Sosial	26.407.691.619	11.765.769.585	45,00	44,55	UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.615.391.799	332.670.943	40,63	9,20	Dinas Sosial
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 4 (Reformasi Sistem Perlindungan Sosial)			58,55		
5	REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN					
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	5.581.659.393.285	1.225.718.104.875	43,09	21,96	Dinas Pendidikan
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000.000	1.371.356.800	27,16	27,43	Dinas Pendidikan
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	12.588.139.875	2.553.416.118	19,59	20,28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.677.692.500	169.204.694	17,81	4,60	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	3.600.165.000	1.038.744.152	7,09	28,85	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 5 (Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan)			22,95		
6	REFORMASI SISTEM KESIAP SIAGAAN PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA					
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.774.672.140	7.733.486.318	10,59	49,02	Satuan Polisi dan Pamong Praja
2.	Program Penanggulangan Bencana	8.239.890.798	4.177.706.973	44,81	50,70	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
3.	Program Penanganan Bencana	4.139.452.814	3.024.485.834	42,52	73,06	Dinas Sosial
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	26.453.087.012	14.157.790.552	59,00	53,52	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.519.055.411	2.365.959.106	55,81	67,23	Dinas Perkebunan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 6 (Reformasi Sistem Kesiap Siagaan Penanggulangan Risiko Bencana)			42,55		
7	INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PENATAAN DAERAH					
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	501.460.081	-	0	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.725.000.000	1.261.541.637	19,76	22,04	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
3.	Program Pendaftaran Penduduk	420.000.000	202.234.026	48,41	48,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Program Pencatatan Sipil	394.344.637	223.999.368	53,32	56,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	765.000.000	340.333.870	42,66	44,49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	75.000.000	63.349.400	85,47	84,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Program Pengendalian Penduduk	11.078.415.000	3.953.500.057	29,10	35,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
8.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	524.029.000	312.320.957	53,60	59,60	Dinas Perumahan dan Permukiman
9.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	250.000.000	174.416.809	68,26	69,77	Dinas Perumahan dan Permukiman
10.	Program Penatagunaan Tanah	1.265.717.000	419.189.659	36,36	33,12	Dinas Perumahan dan Permukiman
11.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	86.033.355.505	30.732.978.974	45,83	35,72	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	112.862.388.374	41.661.205.290	37,72	36,91	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	24.926.599.329	13.772.559.804	54,31	55,25	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	241.528.855.518	194.561.352.746	79,80	80,55	Dinas Pemuda dan Olahraga
15.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	7.545.000.000	6.997.765.500	92,00	92,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
16.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.272.316.740	920.687.750	56,28	40,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.756.805.900	1.638.265.545	60,38	43,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.076.926.416	28.859.377.216	47,02	53,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.106.472.048	1.562.752.068	70,23	74,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	85.683.000	10.871.887	12,69	12,69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Program Pengelolaan Arsip	677.232.348	475.291.431	69,98	70,18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	121.119.700	-	0,00	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.819.689.236	5.238.098.472	61,16	44,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
25.	Program Penataan Organisasi	4.023.548.678	1.131.496.097	43,87	28,12	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi
26.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	25.011.400.000	6.296.621.042	6,28	25,18	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
27.	Program Kesejahteraan Rakyat	920.701.731.948	572.610.446.366	18,51	62,19	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
28.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6.581.217.325	2.282.930.645	74,91	34,69	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
29.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	7.885.100.000	3.191.740.365	0	40,48	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
30.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	281.288.174.651	136.141.331.123	36,35	48,40	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
31.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	294.639.178.429	64.606.154.612	22,53	21,93	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14.516.609.651	5.944.588.251	37,88	40,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.073.380.553.817	6.421.395.297.705	17,18	49,12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	13.242.911.314	2.952.845.131	35,28	22,30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	73.391.499.768	13.724.005.815	57,00	18,70	Badan Pendapatan Daerah
36.	Program Kepegawaian Daerah	17.335.812.506	5.400.980.775	40,30	31,16	Badan Kepegawaian Daerah
37.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.198.612.852	4.617.173.353	64,01	21,78	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.022.212.959	3.312.505.935	52,93	55,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
39.	Program Pelayanan Penghubung	1.787.741.020	894.672.907	57,00	50,04	Badan Penghubung
40.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	29.950.735.042	13.959.422.538	28,13	46,61	Inspektorat
41.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	5.140.334.035	1.642.026.921	32,51	31,94	Inspektorat
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 7 (Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah)			41,64		
8 GERAKAN MEMBANGUN DESA						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.652.044.038	13.665.058.042	13,81	53,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	147.960.000	53.552.100	37,81	36,19	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Program Penataan Desa	797.000.000	341.557.275	42,76	42,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	72.000.000	13.712.500	12,51	19,05	Dinas Pemberdayaan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Masyarakat dan Desa
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	46.187.081.515	36.686.801.922	78,98	79,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	29.211.899.881	15.445.319.163	60,00	52,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 8 (Gerakan Membangun Desa)			40,98		
9 PENDIDIKAN AGAMA DAN TEMPAT IBADAH JUARA						
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.473.500.000	2.039.444.896	55,47	58,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	247.785.274.115	246.396.382.169	99,00	99,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.738.884.075	2.084.176.500	97,00	76,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.256.996.400	384.714.700	76,10	30,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 9 (Pendidikan Agama Dan Tempat Ibadah Juara)			81,89		
10 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	141.064.728.677	70.234.351.355	40,39	49,79	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	1.070.170.845.239	552.979.321.340	41,88	51,67	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
3.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.498.539.919	524.654.521	16,45	21,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	265.199.553.661	90.039.784.603	68,37	33,95	Dinas Sumber Daya Air
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.450.000.000	2.362.671.010	27,71	13,54	Dinas Perumahan dan Permukiman



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	10.384.703.130	514.757.888	6,40	4,96	Dinas Perumahan dan Permukiman
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.600.000.000	359.584.093	11,50	7,82	Dinas Perumahan dan Permukiman
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	550.000.000	110.144.980	17,81	20,03	Dinas Perumahan dan Permukiman
9.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.337.007.450	547.330.619	41,55	40,94	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.402.254.900	1.876.707.397	41,44	42,63	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	355.000.000	165.884.800	48,27	46,73	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	128.091.000	52.212.573	23,63	40,76	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	812.580.000	475.384.862	55,82	58,50	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	147.960.000	53.552.100	37,81	36,19	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	827.574.000	375.628.254	45,65	45,39	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	447.566.700	160.100.665	32,31	35,77	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Program Pengelolaan Persampahan	2.808.442.500	1.204.941.505	40,02	42,90	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Program Pengelolaan Hutan	21.539.773.184	4.133.590.091	18,71	19,19	Dinas Kehutanan
19.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	70.109.818.065	20.669.934.970	25,22	29,48	Dinas Perhubungan
20.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.725.405.962	889.721.082	36,67	23,88	Dinas Perhubungan
21.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.290.036.682	635.388.784	19,35	27,75	Dinas Perhubungan
22.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	200.000.000	95.439.250	47,72	47,72	Dinas Kehutanan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	529.999.875	180.775.440	34,11	34,11	Dinas Kehutanan
24.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	400.000.000	49.699.000	12,42	12,42	Dinas Kehutanan
25.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.414.357.722	1.071.958.446	32,50	44,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.284.100.049	1.090.883.588	29,48	47,76	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.325.166.461	3.479.649.027	20,09	47,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	16.732.568.392	6.052.874.648	10,73	36,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 10 (Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)			31,57		
11	PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA					
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.560.904.826	1.510.232.655	23,98	15,80	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Program Pemasaran Pariwisata	10.495.651.295	4.165.516.708	31,01	39,69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.296.147.688	5.357.884.667	34,61	43,57	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 11 (Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata)			29,87		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Pelaksanaan prioritas pembangunan yang dihitung berdasarkan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada triwulan II Tahun 2023, adapun rincian rata-rata capaian kinerja berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah sebesar 36,14 persen; (2) Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi sebesar 40,79 persen; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan sebesar 36,17 persen; (4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sebesar 58,55 persen; (5) Reformasi Sistem



Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan sebesar 22,95 persen; (6) Reformasi Sistem Kesiap Siagaan Penanggulangan Risiko Bencana sebesar 42,55 persen; (7) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah sebesar 41,64 persen; (8) Gerakan Membangun Desa sebesar 40,98 persen; (9) Pendidikan Agama Dan Tempat Ibadah Juara sebesar 81,89 persen; (10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 31,57 persen; serta (11) Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata sebesar 29,87 persen.

Selain dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2027 bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur yang dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja program. Sampai dengan dengan triwulan II tahun 2023 ini, ketercapaian indikator kinerja program pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk hasil (*outcome*) sebagian besar masih belum tercapai. Hal ini dapat disebabkan bahwa indikator program tersebut baru akan tercapai pada akhir tahun 2023 dan masih berprogres sampai dengan saat ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pada Setiap Perangkat Daerah
Pada Triwulan II Tahun 2023

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	DINAS PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	4,5	Nilai	0	Belum tercapai
	Indeks Reformasi Birokrasi	58	Poin	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	90	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	6,1	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,61	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,55	Nilai	0	Belum tercapai
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar	100	Persen	50	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	78,46	Persen	39,23	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Persen	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,86	Persen	3,43	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,54	Persen	3,27	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,7	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,71	Nilai	0	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,35	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,28	Nilai	0	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,42	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,57	Nilai	3,285	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,33	Nilai	3,165	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,38	Nilai	3,19	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	56,68	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,74	Nilai	3,37	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Nilai Mutu SMK	6,67	Nilai	3,335	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,76	Nilai	3,38	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,82	Nilai	3,41	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	58,7	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	2,515	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,83	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,52	Nilai	0	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,84	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,55	Nilai	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,16	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,39	Nilai	0	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,76	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,71	Nilai	0	Belum tercapai
	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	47,5	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Nilai Mutu SLB	5,03	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMA	6,16	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai Mutu SMK	6,39	Nilai	0	Belum tercapai
	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Persentase Sekolah Yang Memanfaatkan Fasilitas Digital	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	DINAS KESEHATAN				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai Sakip Dinas Kesehatan Jawa Barat	87,5	Poin	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	93	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	96	Persen	93,43	Belum tercapai
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	93	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	100	Persen	0	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	69	Persen	51,64	Belum tercapai
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	90	Persen	70,38	Belum tercapai
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	95	Persen	97	Tercapai
	UPTD PELATIHAN KESEHATAN				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Penyediaan Sarana. Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	80	Persen	40	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD Upelkes	4,99	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Penyediaan Sarana. Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	0	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RSUD Pameungpeuk	9	Hari	4	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RSUD Pameungpeuk	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Kesehatan Kerja)	9	Hari	3	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RS Kesehatan Kerja	30	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RSUD Jampangkulon	9	Hari	3,18	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RSUD Jampang Kulon	75	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Jiwa	21	Hari	15	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RS Jiwa	70	Hari	0	Belum tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Paru	9	Hari	3	Belum tercapai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan UPTD RS Paru	100	Persen	25	Belum tercapai
	RSUD AL IHSAN				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	50	Belum tercapai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RSUD Al Ihsan	9	Hari	3	Belum tercapai
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase Peralatan Kebinamargaan yang tersedia	75,73	Persen	37,865	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	68,08	Belum tercapai
	Presentase Unit Kerja Yang mendapatkan pelayanan Administrasi Keiangan dan Umum	12	Bulan	6	Belum tercapai
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Terpantaunya pengelolaan lingkungan hidup Pasca Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Tahap IV)	1	Kawasan	1	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
	Persentase sumber daya konstruksi yang terlatih	100	Persen	8,39	Belum tercapai
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota	89,86	Persen	45	Belum tercapai
	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang	60,1	Persen	15,2	Belum tercapai
	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang	100	Persen	25	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD I	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	49,61	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	1979,11	KM	1979,11	Tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	12,45	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD II	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	45,03	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	1979,11	KM	1979,11	Tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	12,45	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD III	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	27,64	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1979,18	KM	1979,18	Tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	12,45	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD IV	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	31,03	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1979,18	KM	1979,18	Tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	12,45	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD V	100	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	19,69	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1979,18	KM	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	24,9	Tercapai
	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	IKM di wilayah UPTD VI	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	18,27	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1979,18	KM	1979,18	Tercapai
	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24,9	Persen	12,45	Belum tercapai
	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	100	Persen	0	Belum tercapai
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Persentase Panjang Jalan Yang Dilakukan Pengujian Mutu	100	Persen	6	Belum tercapai
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	50	Persen	100	Tercapai
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	74,6	Persen	0	Belum tercapai
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	0	Persen	0	Tercapai
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Persentase Luas genangan yang tertangani	77	Persen	0	Belum tercapai
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	85	Persen	0	Belum tercapai
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (% PBL)	67,5	Persen	0	Belum tercapai
	DINAS SUMBER DAYA AIR				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	76,5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	27	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Sumber Daya Air	80	Persen	40	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di dinas sumber daya air	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
	Kualitas Konstruksi Yang Baik	100	Persen	44	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Citarum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase SITU yang Terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Citanduy	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	100	Persen	50	Belum tercapai
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69,77	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Situ yang terpelihara	10,95	Persen	5,475	Belum tercapai
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	Persen	50	Belum tercapai
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Persen	0	Belum tercapai
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	76	Persen	0	Belum tercapai
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	49,63	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Penghuni Rusunawa) Terhadap Setiap Jenis Layanan UPT P3JB	80	Poin	0	Belum tercapai
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA				
	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	50	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	71	Persen	0	Belum tercapai
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di BPBD Provinsi Jawa Barat	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan di BPBD Provinsi Jawa Barat	100	Persen	50	Belum tercapai
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	100	Persen	40	Belum tercapai
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Persentase Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	DINAS SOSIAL				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	95	Persen	47,5	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pengadaan barang milik daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	Terselenggaranya kinerja Dinas Sosial dengan optimal	100	Persen	50	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos	68	Persen	0	Belum tercapai
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	1,35	Persen	0	Belum tercapai
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	38,7	Persen	16,1	Belum tercapai
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Persentase Korban Bencana yang mendapat kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	Persen	25	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Jasa Penunjang Kantorapatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	25	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Umum	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	25	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosialnya	100	Persen	25	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pengadaan barang milik daerah	100	Persen	25	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	25	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa penunjang	100	Persen	25	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	100	Persen	25	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARSA				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum UPTD PRSABH	100	Persen	50	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah UPTD PRSABH	100	Persen	25	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa penunjang UPTD PRSABH	100	Persen	25	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA RAMAH ANAK				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Jasa Penunjang Kantor UPTD PPSGRA dan 4 Satuan Pelayanan	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Umum UPTD PPSGRA	100	Persen	50	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan Berfungsi Sosial	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANSIA				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pengadaan barang milik daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	Terselenggaranya operasional kantor UPTD PPSGL dan Satuan Pelayanan	12	Bulan	2	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah UPTD PRSLU	100	Persen	50	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa penunjang UPTD PRSLU	100	Persen	50	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	100	Persen	50	Belum tercapai
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Tingkat pengelolaan makam pahlawan	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pengadaan barang milik daerah UPTD PRSPD	100	Persen	50	Belum tercapai
	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Jasa Penunjang UPTD Pusyansos Griya Harapan Difabel	100	Persen	50	Belum tercapai
	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD Pusyansos Griya Harapan Difabel	100	Persen	50	Belum tercapai
	Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor	12	Bulan	6	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Panti Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	105	Orang	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA WANITA MANDIRI				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum UPTD PPSGWM dan Satuan Pelayanan	100	Persen	50	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah UPTD PPSGWM dan Satuan Pelayanan RTS	100	Persen	50	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa penunjang UPTD PPSGWM dan Satuan Pelayanan RTS	12	Bulan	6	Belum tercapai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	100	Persen	25	Belum tercapai
	UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum UPTD PPKS	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pengadaan barang milik daerah UPTD PPKS	100	Persen	0	Belum tercapai
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa pemeliharaan barang milik daerah UPTD PPKS	100	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	persentase Unit Kerja yang mendapatkan jasa penunjang UPTD PPKS	100	Persen	0	Belum tercapai
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS	68	Persen	34	Belum tercapai
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	64,29	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	64,29	Belum tercapai
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	Persen	50	Belum tercapai
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	100	Persen	31,8	Belum tercapai
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	88305	Orang	41693	Belum tercapai
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	90	Persen	45	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	12,17	Belum tercapai
	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,98	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	150,36	Tercapai
	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,98	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	3,34	Belum tercapai
	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,98	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	17,72	Belum tercapai
	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,8	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,8	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	53,75	Tercapai
	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	20	Persen	10,02	Belum tercapai
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOMPETENSI				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,8	Belum tercapai
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	100	Persen	16,6	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,98	Belum tercapai
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	100	Persen	76,92	Belum tercapai
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Disnakertrans	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	49,98	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	49,98	Belum tercapai
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	88305	Orang	3859	Belum tercapai
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	Nilai	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	51,85	Persen	0	Belum tercapai
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	1,88	Persen	0	Belum tercapai
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspa) Di Jawa Barat	27	Kab/Kota	0	Belum tercapai
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	100	Persen	0	Belum tercapai
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Belum tercapai
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	0,21	Rasio	0	Belum tercapai
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DP3AKB PROVINSI JAWA BARAT				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase kebutuhan ketatausahaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang terpenuhi	100	Persen	0	Belum tercapai
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	100	Persen	0	Belum tercapai
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	100	Persen	0	Belum tercapai
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran Dinas	2450	Unit	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	0	Belum tercapai
	Presentase perencanaan dan pelaporan yang akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku	100	Persen	0	Belum tercapai
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
	Jumlah dokumen kajian mendukung kemandirian pangan	1	Dokumen	0	Belum tercapai
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	Persentase Cadangan Pangan	50	Persen	0	Belum tercapai
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
	Persentase desa rawan pangan yang dintervensi	3	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di UPTD BKHKMOV	143	Unit	14	Belum tercapai
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	82,4	Poin	13,75	Belum tercapai
	UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di BPPKP Cikole Lembang	163	Unit	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di UPTD BPMKP	497	Unit	217	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	85	Poin	90,01	Tercapai
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
	Persentase peningkatan sertifikasi PSAT	12,67	Persen	12,67	Tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang perkantoran UPTD BPPTDK MARGAWATI	83	Unit	0	Belum tercapai
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati	84,75	Poin	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di BPPTU Jatiwangi	162	Unit	0	Belum tercapai
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	82,8	Poin	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah dukungan penunjang perkantoran di BPTSPHPT Cikole Lembang	121	Unit	0	Belum tercapai
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap UPTD BPTSPHPT Cikole Lembang	89,5	Poin	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	0	Belum tercapai
	Presentase perencanaan dan pelaporan yang akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku	100	Persen	63	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	82,3	poin	0	Belum tercapai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	82,3	poin	0	Belum tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di BPMKP/BPCikole Lembang	614	Jenis	307	Belum tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang perkantoran di BPMKP/BP Cikole Lembang	614	Jenis	307	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	84,5	Poin	93,5	Tercapai
	Jumlah pemenuhan administrasi perkantoran di UPTD BPPIBTSP Bunikasih	84,5	Poin	89,8	Tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran di BPPIBTSP Bunikasih	84,5	Poin	89,8	Tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran di BPPIBTSP Bunikasih perkantoran di UPTD BPPIBTSP Bunikasih	115	Jenis	67	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	84,5	Poin	88,8	Tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran di BPPIBTSP Ciamis	171	Unit	101,76	Belum tercapai
	Jumlah pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran di BPPIBTSP Bunikasih	115	Jenis	101,76	Belum tercapai
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	82,4	Poin	88,8	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	85	Persen	0	Belum tercapai
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				
	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	100	Persen	0	Belum tercapai
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				
	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	100	Persen	0	Belum tercapai
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Pembangunan Strategis Di Jawa Barat	66,67	Persen	0	Belum tercapai
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	0	Belum tercapai
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	belum tercapai	Tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Lingkungan Hidup	100	Persen	16	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	17,22	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Lingkungan Hidup	100	Persen	14,29	Belum tercapai
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100	Persen	11,21	Belum tercapai
	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan	100	Persen	0	Belum tercapai
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	100	Persen	13,8	Belum tercapai
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	Persen	15,31	Belum tercapai
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100	Persen	11,62	Belum tercapai
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	100	Persen	17,13	Belum tercapai
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota	100	Persen	8,52	Belum tercapai
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki desa berbudaya lingkungan	100	Persen	16,2	Belum tercapai
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	100	Persen	12,09	Belum tercapai
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	100	Persen	12,28	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional	100	Persen	12,49	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional	100	Persen	14,14	Belum tercapai
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	100	Persen	4,27	Belum tercapai
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	100	Persen	13,59	Belum tercapai
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji	100	Persen	12,49	Belum tercapai
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	83,25	Persen	0	Belum tercapai
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,25	Persen	0	Belum tercapai
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	84,78	Persen	0	Belum tercapai
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	100	Persen	66,67	Belum tercapai
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Kualitas Informasi dan Umum Sesuai Standar	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	100	Persen	0	Belum tercapai
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				
	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi	100	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	Persen	0	Belum tercapai
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	100	Persen	0	Belum tercapai
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
	Persentase Desa yang menerima Bantuan Keuangan Desa	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Kab/ Kota yang terbina dalam pengembangan Inovasi Desa	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Tim PPBDes Kabupaten yang terbina dalam Penegakan batas Desa	100	Persen	0	Belum tercapai
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	60	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa	100	Persen	0	Belum tercapai
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	64,07	Persen	0	Belum tercapai
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang telah dilakukan DP3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota	100	Persen	0	Belum tercapai
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
	Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DP3AKB Jawa Barat Di Kabupaten Kota	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	DINAS PERHUBUNGAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	26,13	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	persen	100	0	Belum tercapai
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Nilai V/C ratio di Jalan Provinsi	0.18 - 0.82	Nilai	0	Belum tercapai
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi	87,85	Persen	0	Belum tercapai
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Persentase dermaga yang terpenuhi standar	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase lintas penyeberangan yang beroperasi	100	Persen	60	Belum tercapai
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PJK NUSAWIRU)	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP LLASDP)	100	Persen	50	Belum tercapai
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	87,85	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	87,85	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	100	Persen	0	Belum tercapai
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	87,85	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	87,85	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	100	Persen	0	Belum tercapai
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Jumlah dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan	14	Dokumen	0	Belum tercapai
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	70	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Pada UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial	100	Persen	0	Belum tercapai
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	90	Persen	0	Belum tercapai
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	60	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Pada UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial	100	Persen	0	Belum tercapai
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	60	Persen	0	Belum tercapai
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional	9	Persen	0	Belum tercapai
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
	Tingkat kepatuhan koperasi	4,5	Persen	0	Belum tercapai
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	55	Persen	0	Belum tercapai
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,9	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	37	Persen	0	Belum tercapai
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	6,5	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	35	Persen	0	Belum tercapai
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	85	Persen	7,00	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	8,00	Belum tercapai
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	Indikator Daya Saing (Peringkat Ease Of Doing Business)	2	Peringkat	0	Belum tercapai
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	10	Persen	0	Belum tercapai
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase tingkat penyelesaian perizinan tepat waktu	70-75	Persen	36,00	Belum tercapai
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	15	Persen	7,5	Belum tercapai
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	88,2	Persen	73,00	Belum tercapai
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	3	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	72	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	18	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	12	Persen	0	Belum tercapai
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	12	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	10	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPNAS	20	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	87	Persen	0	Belum tercapai
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam Kepramukaan	17	Persen	0	Belum tercapai
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	0	Belum tercapai
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	96,9	Persen	0	Belum tercapai
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)	30,79	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	31,2	Persen	0	Belum tercapai
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	26,09	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT				
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai WBTB Nasional, Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah yang dilestarikan dan seni budaya yang dilindungi)	30,79	Persen	0	Belum tercapai
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	26,09	Persen	0	Belum tercapai
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
	Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi	23,18	Persen	0	Belum tercapai
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	0	Belum tercapai
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
	Tingkat Kebiasaan Membaca	66	Poin	0	Belum tercapai
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	55	Poin	0	Belum tercapai
	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	71	Poin	0	Belum tercapai
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	23	Persen	0	Belum tercapai
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	45	Persen	0	Belum tercapai
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	70	Persen	0	Belum tercapai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	7	Belum tercapai
	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
	Jumlah Produksi Garam	284750,29	Ton	411,03	Belum tercapai
	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	83,51	Persen	167,02	Tercapai
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	186558,07	Ton	32128,64	Belum tercapai
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923,42	Ton	199198	Belum tercapai
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	85	Persen	95,71	Tercapai
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	30,93	KG/KAP/TH	19,48	Belum tercapai
	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
	Jumlah Produksi Garam	284750,29	Ton	411,03	Belum tercapai
	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	83,51	Persen	41,755	Belum tercapai
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923,42	Ton	199198	Belum tercapai
	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	25	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	100	Persen	25	Belum tercapai
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
	Jumlah Produksi Garam	284750,29	Ton	411,03	Belum tercapai
	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	83,51	Persen	41,755	Belum tercapai
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923,42	Ton	199198	Belum tercapai
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	186558,07	Ton	32128,64	Belum tercapai
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MUARA CIASEM				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	186558,07	Ton	32128,64	Belum tercapai
	UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	85	Persen	95,71	Tercapai
	UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
	ersentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	85	Persen	95,71	Tercapai
	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	30,93	KG/KAP/TH	19,48	Belum tercapai
	UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923,42	Ton	199198	Belum tercapai
	UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA				
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76	Poin	14	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923,42	Ton	199198	Belum tercapai
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	29,27	Persen	0	Belum tercapai
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Persentase Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	28,57	Persen	0	Belum tercapai
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	22,22	Persen	0	Belum tercapai
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Presentase performa ternak yang sesuai standar dalam peningkatan Produksi Peternakan	85	Persen	0	Belum tercapai
	rata-rata peforma ternak yang sesuai standart	44	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Presentase pemenuhan penataan prasarana klaster peternakan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	5	Persen	0	Belum tercapai
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Presentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	25	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Presentase pemenuhan penataan prasarana gedung dan peralatan laboratorium keswan dan kesmavet	100	Persen	10	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Persentase peforma ternak domba	87	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Presentase pemenuhan penataan prasarana peralatan ternak domba	50	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Presentase pemenuhan penataan prasarana gedung dan peralatan operasional ternak unggas	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Persentase peforma ternak perah BPPTSPHPT Cikole lembang yang sesuai standart	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Persentase pemenuhan penataan prasarana gedung dan peternakan ternak sapi perah Cikole	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Jumlah pemenuhan dukungan sarana prasarana di BPMKP/BP Cikole Lembang	1	Unit	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Presentase performa ternak sapi perah di BPPIBTSP Bunikasih yangsesuai standar	22	Persen	15,5	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan	90	Persen	3,65	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Persentase performa ternak sapi potong yang sesuai standart	0,918055556	Persen	30,8	Tercapai
	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	5	Persen	0	Belum tercapai
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Produktivitas Tanaman Pangan	58,76	KW/HA	55,68	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Indeks Pertanaman (IP)	2	Persen	0	Belum tercapai
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	4,5	Persen	0	Belum tercapai
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	2,13	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	94,17	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	20,41	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	90,34	KW/HA	131,44	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Luas Panen Tanaman Hortikultura	199.271	HA	91.758	Belum tercapai
	UPTD BALAI BENIH KENTANG				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	90,34	KW/HA	131,44	Belum tercapai
	UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Produktivitas Tanaman Pangan	58,76	KW/HA	55,68	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Luas Panen Tanaman Pangan	1.892.521	HA	997.767	Belum tercapai
	UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	20,41	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	82,21	Persen	0	Belum tercapai
	Produktivitas Tanaman Pangan	58,76	KW/HA	55,68	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Luas Panen Tanaman Pangan	1.892.521	HA	997.767	Belum tercapai
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Produktivitas Tanaman Pangan	58,76	KW/HA	55,68	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Luas Panen Tanaman Pangan	1.892.521	HA	997.767	Belum tercapai
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	4,5	Persen	0	Belum tercapai
	DINAS PERKEBUNAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana perkebunan	25	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana perkebunan	20	Persen	0	Belum tercapai
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	25	Persen	0	Belum tercapai
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
	Persentase Perkebunan Besar yang mendapat izin usaha	20	Persen	0	Belum tercapai
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	25	Persen	0	Belum tercapai
	Presentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	25	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai IKM Dinas Perkebunan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana perkebunan	25	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana perkebunan	20	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai IKM Dinas Perkebunan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	5	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Persentase Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Sertifikasi Pembenihan Perkebunan	20	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai IKM Dinas Perkebunan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Persentase Petani Perkebunan yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	25	Persen	0	Belum tercapai
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
	DINAS KEHUTANAN				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	685	Orang	0	Belum tercapai
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Penurunan gangguan keamanan hutan	640	HEKTAR	0	Belum tercapai
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat ketersediaan dokumen arahan pengelolaan hutan dan lahan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
	Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa liar	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	5	Persen	0	Belum tercapai
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	120	Orang	0	Belum tercapai
	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	120	Orang	0	Belum tercapai
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai	36,55	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	10	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan Hutan	100	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	5	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat ketersediaan dokumen arahan pengelolaan hutan dan lahan	100	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat ketersediaan dokumen arahan pengelolaan hutan dan lahan	100	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	10	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat ketersediaan dokumen arahan pengelolaan hutan dan lahan	100	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kerusakan Hutan	0,5	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat ketersediaan dokumen arahan pengelolaan hutan dan lahan	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	120	Orang	0	Belum tercapai
	UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD TAMAN HUTAN RAYA IRH DJUANDA				
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	65	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan	60	Persen	78,08	Tercapai
	Rasio Sumur Imbuhan terhadap Sumur Produksi	20,64	Persen	56,23	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib Administrasi	60	Persen	45,77	Belum tercapai
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib teknis	48	Persen	26,67	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Reduksi CO2 dari bidang energi (tidak termasuk sektor transportasi)	2.175.21	Ton CO2EQ	0	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	100	Persen	28,08	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan	98	Persen	100	Tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	60	Persen	81,6	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	60	Persen	44,44	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	23,81	SBM	13,38	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	100	Persen	66,67	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	100	Persen	55,1	Belum tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah II Bogor	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	60	Persen	66,34	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	60	Persen	50	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	23,81	SBM	0	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	100	Persen	66,67	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah II Bogor	100	Persen	52,49	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjang	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	60	Persen	110,69	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	60	Persen	56,25	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	23,81	SBM	5,48	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	100	Persen	50	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	100	Persen	73,21	Belum tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	60	Persen	83,13	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	60	Persen	36	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	23,81	SBM	36,59	Tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	100	Persen	75	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	100	Persen	56,26	Belum tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	60	Persen	60,61	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	60	Persen	41,46	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	23,81	SBM	25,01	Tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	100	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	100	Persen	48,97	Belum tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	60	Persen	44,25	Belum tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	60	Persen	61,11	Tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	23,81	SBM	2,48	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	100	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	100	Persen	53,33	Belum tercapai
	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	60	Persen	70,17	Tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	60	Persen	48,15	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	23,81	SBM	0	Belum tercapai
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	100	Persen	32,34	Belum tercapai
	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	100	Persen	84,9	Belum tercapai
	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum Pada Cabang Dinas UPTD Laboratorium	100	Persen	50	Belum tercapai
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
	Persentase sample air tanah yang diuji kualitasnya	3	Persen	1,48	Belum tercapai
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
	Persentase pengujian kualitas bahan tambang di Jawa Barat	40	Persen	30,25	Belum tercapai
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				
	Persentase komoditas EBT yang diuji unjuk kinerja sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang energi	100	Persen	50	Belum tercapai
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan	100	Persen	50	Belum tercapai
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	7	Persen	0	Belum tercapai
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5	Persen	7,31	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	10,84	Milyar USD	7,61	Belum tercapai
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80	Persen	40	Belum tercapai
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	9,76	Persen	24	Tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG				
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80	Persen	40	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON				
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80	Persen	40	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR				
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80	Persen	40	Belum tercapai
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80	Persen	40	Belum tercapai
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	150	Unit Usaha	63	Belum tercapai
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
	Persentase Izin Usah Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	1,6	Persen	1,27	Belum tercapai
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nasional	50	Persen	48,27	Belum tercapai
	UPTD INDUSTRI LOGAM				
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	50	Unit Usaha	41	Belum tercapai
	UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN				
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	50	Unit Usaha	37	Belum tercapai
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
	Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian yang Direalisasikan	95	Persen	50	Belum tercapai
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Bahan kebijakan lingkup penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang ditindaklanjuti	100	Persen	0	Belum tercapai
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
	Persentase Bahan Kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	90	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	100	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase pelayanan kebutuhan pimpinan dan aparatur , dan kualitas data dan pelaporan keuangan perencanaan Biro Hukum dan HAM	100	Persen	50	Belum tercapai
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
	Peresentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	100	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indeks Kepuasan Layanan	baik	Nilai	baik	Tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Ditindaklanjuti	85	Persen	15	Belum tercapai
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang ditindaklanjuti	85	Persen	0	Belum tercapai
	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90	Persen	0	Belum tercapai
	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti.	90	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	97	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan	76	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Administrasi Pembangunan	60	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO PEREKONOMIAN				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	Persen	59,86	Belum tercapai
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan	76	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	Persen	0	Belum tercapai
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ	90	Persen	0	Belum tercapai
	Level Maturitas UKPBJ	4	Level	0	Belum tercapai
	BIRO ORGANISASI				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100	Persen	50	Belum tercapai
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien	95	Persen	0	Belum tercapai
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	baik	Kategori	baik	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
	BIRO UMUM				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	B	Nilai	0	Belum tercapai
4.02	SEKRETARIAT DPRD				
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Predikat	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Anggota DPRD yang mendapat pelayanan keuangan, kesejahteraan, dan administrasi secara tepat waktu	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	0	Belum tercapai
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan kelembagaan DPRD serta penjangkaran aspirasi	100	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	Persen	0	Belum tercapai
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	80	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada Bappeda Provinsi Jawa Barat	80	Persen	0	Belum tercapai
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Rata-Rata Tingkat kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	100	Persen	0	Belum tercapai
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	0	Belum tercapai
5.02	KEUANGAN				
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	70	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat	tepat waktu	Waktu	belum tercapai	Belum tercapai
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu	80	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu	100	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	100	Persen	100	Tercapai
	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu	tepat waktu	Waktu	tercapai	Tercapai
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	6	Persen	0	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	80	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,36	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	100	Persen	0	Belum tercapai
	UPTD PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	70	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	100	Tercapai
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	80	Persen	0	Belum tercapai
	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,36	Persen	0	Belum tercapai
	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	100	Persen	0	Belum tercapai
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappenda	84,4	Poin	91,62	Tercapai
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	1	Dokumen	50	Tercapai
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	69,5	Persen	33,76	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	48	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	48	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	50	Belum tercapai
	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	Persen	48	Belum tercapai
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100	Persen	48	Belum tercapai
5.03	KEPEGAWAIAN				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023) Triwulan II	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120	Poin	60	Belum tercapai
	Nilai Kriteria Pengembangan Karir	110	Poin	60	Belum tercapai
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	120	Poin	60	Belum tercapai
	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40	Poin	24	Belum tercapai
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	Persen	47,87	Belum tercapai
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Persentase Pelaksana Sertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	90	Persen	21,7	Belum tercapai
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	0	Belum tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen	50	Belum tercapai
	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan	100	Persen	42,51	Belum tercapai
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan	100	Persen	56,67	Belum tercapai



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan	100	Persen	53,34	Belum tercapai
	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Teknologi dan Hasil Kelitbangan	100	Persen	68,33	Belum tercapai
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
	BADAN PENGHUBUNG				
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	100	Persen	50	Belum tercapai
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, dan Promosi Informasi Yang Difasilitasi	100	Persen	50	Belum tercapai
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
	INSPEKTORAT				
	INSPEKTORAT				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	16,55	Belum tercapai
	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	16,55	Belum tercapai
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	100	Persen	29,26	Belum tercapai
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Terselenggara kegiatan pembinaan dan pengawasan	100	Persen	10,94	Belum tercapai
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2023)	Ketercapaian
		Kinerja	Satuan	Triwulan II	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Persen	0	Belum tercapai
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	Persen	0	Belum tercapai
8.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	0,0046	Persen	0	Belum tercapai
8.01.03	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	0,0114	Persen	0	Belum tercapai
8.01.04	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	0,0058	Persen	0	Belum tercapai
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,0068	Persen	0	Belum tercapai
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	0,007	Persen	0	Belum tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 pada Aplikasi E-Monev Jabar, diolah



Dari 38 Perangkat Daerah yang mengumpulkan laporan evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 serta yang telah menginput data realisasi kinerja pada aplikasi E-Monev Jabar, maka diperoleh informasi berikut:

1. Belum semua Perangkat Daerah mampu memahami cara penggunaan aplikasi E-Monev Jabar dalam pelaporan kinerja Perangkat Daerah sehingga tingkat keterisian data realisasi kinerja masih Sangat Rendah;
2. Beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah tidak tercantum pada aplikasi E-Monev Jabar sehingga Perangkat Daerah tidak dapat menginput data hasil realisasi. Hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah tidak menginput data indikator kinerja baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah tersebut;
3. Selain permasalahan indikator kinerja yang tidak dicantumkan pada DPA, masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak menginput target kinerja yang akan dicapai sehingga masih terdapat indikator kinerja yang targetnya 0 (nol);
4. Adanya perbedaan persepsi terkait penggunaan data realisasi anggaran pada aplikasi E-Monev Jabar. Data realisasi anggaran yang dicantumkan pada aplikasi menggunakan data berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sedangkan pelaporan data realisasi anggaran oleh Perangkat Daerah biasanya menggunakan data Surat Pertanggungjawaban (SPJ)-3. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara data realisasi anggaran berdasarkan SP2D dan SPJ-3;
5. Beberapa Perangkat Daerah masih mengalami kebingungan dalam menetapkan target kinerja secara bulanan, seperti yang harus diinput pada aplikasi E-Monev Jabar. Hal ini dikarenakan target kinerja yang selama ini direncanakan biasanya bersifat tahunan;
6. Rekapitulasi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.8
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Setiap Program di
Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023

KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36,44	SANGAT RENDAH	36,24	SANGAT RENDAH
1.01.0.00.0. 00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	34,67	SANGAT RENDAH	36,84	SANGAT RENDAH
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50,46	SANGAT RENDAH	40,28	SANGAT RENDAH
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21,96	SANGAT RENDAH	43,09	SANGAT RENDAH
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27,43	SANGAT RENDAH	27,16	SANGAT RENDAH
1.02.0.00.0. 00.01.0000	DINAS KESEHATAN	29,49	SANGAT RENDAH	28,92	SANGAT RENDAH
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,62	SANGAT RENDAH	33,42	SANGAT RENDAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46,71	SANGAT RENDAH	28,20	SANGAT RENDAH
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	44,21	SANGAT RENDAH	27,00	SANGAT RENDAH
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	47,86	SANGAT RENDAH	19,50	SANGAT RENDAH
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41,05	SANGAT RENDAH	36,50	SANGAT RENDAH
1.06.0.00.0. 00.01.0000	DINAS SOSIAL	46,79	SANGAT RENDAH	55,51	RENDAH
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46,23	SANGAT RENDAH	54,22	RENDAH
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	65,12	RENDAH	99,00	SANGAT TINGGI
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50,93	SANGAT RENDAH	49,57	SANGAT RENDAH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	44,55	SANGAT RENDAH	45,00	SANGAT RENDAH
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9,20	SANGAT RENDAH	40,63	SANGAT RENDAH
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	73,06	SEDANG	42,52	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	49,67	SANGAT RENDAH	57,60	RENDAH
1.03.0.00.0. 00.01.0000	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	51,23	RENDAH	23,70	SANGAT RENDAH
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49,79	SANGAT RENDAH	40,39	SANGAT RENDAH
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	SANGAT RENDAH	0,00	SANGAT RENDAH
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	51,67	RENDAH	41,88	SANGAT RENDAH
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21,00	SANGAT RENDAH	16,45	SANGAT RENDAH
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	22,04	SANGAT RENDAH	19,76	SANGAT RENDAH
1.04.1.03.2. 10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	47,34	SANGAT RENDAH	23,56	SANGAT RENDAH
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13,54	SANGAT RENDAH	27,71	SANGAT RENDAH
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4,96	SANGAT RENDAH	6,40	SANGAT RENDAH
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,82	SANGAT RENDAH	11,50	SANGAT RENDAH
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20,03	SANGAT RENDAH	17,81	SANGAT RENDAH
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	76,22	TINGGI	46,19	SANGAT RENDAH
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25,94	SANGAT RENDAH	23,99	SANGAT RENDAH
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33,33	SANGAT RENDAH	38,89	SANGAT RENDAH
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	52,62	RENDAH	44,22	SANGAT RENDAH
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27,38	SANGAT RENDAH	7,94	SANGAT RENDAH
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11,60	SANGAT RENDAH	10,91	SANGAT RENDAH
1.05.0.00.0. 00.01.0000	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	54,24	RENDAH	9,48	SANGAT RENDAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57,74	RENDAH	8,36	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49,02	SANGAT RENDAH	10,59	SANGAT RENDAH
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	39,14	SANGAT RENDAH	58,81	RENDAH
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54,11	RENDAH	58,92	RENDAH
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33,95	SANGAT RENDAH	68,37	SEDANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	44,45	SANGAT RENDAH	49,15	SANGAT RENDAH
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56,05	RENDAH	53,14	RENDAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57,98	RENDAH	54,85	RENDAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	50,70	SANGAT RENDAH	44,81	SANGAT RENDAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	60,37	RENDAH	59,77	RENDAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51,91	RENDAH	42,21	SANGAT RENDAH
2.11.0.00.0.00.03.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29,40	SANGAT RENDAH	38,09	SANGAT RENDAH
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,05	RENDAH	41,00	SANGAT RENDAH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	40,94	SANGAT RENDAH	41,55	SANGAT RENDAH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	42,63	SANGAT RENDAH	41,44	SANGAT RENDAH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	46,73	SANGAT RENDAH	48,27	SANGAT RENDAH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	40,76	SANGAT RENDAH	23,63	SANGAT RENDAH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	58,50	RENDAH	55,82	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	36,19	SANGAT RENDAH	37,81	SANGAT RENDAH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45,39	SANGAT RENDAH	45,65	SANGAT RENDAH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35,77	SANGAT RENDAH	32,31	SANGAT RENDAH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42,90	SANGAT RENDAH	40,02	SANGAT RENDAH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12,11	SANGAT RENDAH	11,51	SANGAT RENDAH
1.04.1.03.2. 10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	43,72	SANGAT RENDAH	46,57	SANGAT RENDAH
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	32,23	SANGAT RENDAH	28,05	SANGAT RENDAH
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	59,60	RENDAH	53,60	RENDAH
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	69,77	SEDANG	68,26	SEDANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	33,12	SANGAT RENDAH	36,36	SANGAT RENDAH
2.07.3.32.0. 00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	53,90	RENDAH	50,27	SANGAT RENDAH
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54,79	RENDAH	48,43	SANGAT RENDAH
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	99,76	SANGAT TINGGI	99,00	SANGAT TINGGI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	61,04	RENDAH	42,11	SANGAT RENDAH
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	40,28	SANGAT RENDAH	27,92	SANGAT RENDAH
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	40,58	SANGAT RENDAH	29,90	SANGAT RENDAH
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	52,04	RENDAH	54,27	RENDAH
2.08.2.14.0. 00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,	45,35	SANGAT RENDAH	39,04	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
	PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,47	RENDAH	47,68	SANGAT RENDAH
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35,67	SANGAT RENDAH	38,43	SANGAT RENDAH
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	68,53	SEDANG	59,60	RENDAH
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45,57	SANGAT RENDAH	43,33	SANGAT RENDAH
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	47,39	SANGAT RENDAH	37,84	SANGAT RENDAH
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	73,83	SEDANG	56,20	RENDAH
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	31,74	SANGAT RENDAH	9,05	SANGAT RENDAH
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	35,69	SANGAT RENDAH	29,10	SANGAT RENDAH
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	27,34	SANGAT RENDAH	34,80	SANGAT RENDAH
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	36,57	SANGAT RENDAH	34,40	SANGAT RENDAH
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	47,85	SANGAT RENDAH	35,94	SANGAT RENDAH
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52,86	RENDAH	35,36	SANGAT RENDAH
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1,86	SANGAT RENDAH	2,00	SANGAT RENDAH
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	11,45	SANGAT RENDAH	40,08	SANGAT RENDAH
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	47,98	SANGAT RENDAH	38,65	SANGAT RENDAH
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	47,34	SANGAT RENDAH	63,61	RENDAH
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52,25	RENDAH	55,88	RENDAH
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52,51	RENDAH	49,56	SANGAT RENDAH
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	48,15	SANGAT RENDAH	48,41	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	56,80	RENDAH	53,32	RENDAH
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	44,49	SANGAT RENDAH	42,66	SANGAT RENDAH
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	84,47	TINGGI	85,47	TINGGI
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62,18	RENDAH	41,61	SANGAT RENDAH
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52,71	RENDAH	13,81	SANGAT RENDAH
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	42,86	SANGAT RENDAH	42,76	SANGAT RENDAH
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	19,05	SANGAT RENDAH	12,51	SANGAT RENDAH
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	79,43	TINGGI	78,98	TINGGI
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	52,87	RENDAH	60,00	RENDAH
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	42,34	SANGAT RENDAH	30,68	SANGAT RENDAH
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,42	RENDAH	41,49	SANGAT RENDAH
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29,48	SANGAT RENDAH	25,22	SANGAT RENDAH
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	23,88	SANGAT RENDAH	36,67	SANGAT RENDAH
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	27,75	SANGAT RENDAH	19,35	SANGAT RENDAH
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40,22	SANGAT RENDAH	47,13	SANGAT RENDAH
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,81	RENDAH	35,45	SANGAT RENDAH
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	35,72	SANGAT RENDAH	45,83	SANGAT RENDAH
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	36,91	SANGAT RENDAH	37,72	SANGAT RENDAH
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40,52	SANGAT RENDAH	56,28	RENDAH
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	43,61	SANGAT RENDAH	60,38	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
2.17.0.00.0. 00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	56,33	RENDAH	32,61	SANGAT RENDAH
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45,64	SANGAT RENDAH	30,51	SANGAT RENDAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10,60	SANGAT RENDAH	11,68	SANGAT RENDAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38,45	SANGAT RENDAH	21,11	SANGAT RENDAH
2.17.04	PROGRAM PENilaian KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	46,61	SANGAT RENDAH	42,31	SANGAT RENDAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	76,32	TINGGI	74,41	SEDANG
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	17,98	SANGAT RENDAH	15,26	SANGAT RENDAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	43,39	SANGAT RENDAH	33,00	SANGAT RENDAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	40,97	SANGAT RENDAH	32,62	SANGAT RENDAH
2.18.0.00.0. 00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47,29	SANGAT RENDAH	40,19	SANGAT RENDAH
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50,43	SANGAT RENDAH	52,81	RENDAH
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	24,52	SANGAT RENDAH	1,54	SANGAT RENDAH
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12,49	SANGAT RENDAH	31,75	SANGAT RENDAH
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	49,09	SANGAT RENDAH	15,47	SANGAT RENDAH
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	27,33	SANGAT RENDAH	73,16	SEDANG
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31,29	SANGAT RENDAH	66,38	SEDANG
2.19.0.00.0. 00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	76,17	TINGGI	69,24	SEDANG
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58,57	RENDAH	50,85	SANGAT RENDAH
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	55,25	RENDAH	54,31	RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	80,55	TINGGI	79,80	TINGGI
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	92,75	SANGAT TINGGI	92,00	SANGAT TINGGI
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54,16	RENDAH	39,98	SANGAT RENDAH
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,37	RENDAH	47,02	SANGAT RENDAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	74,19	SEDANG	70,23	SEDANG
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	12,69	SANGAT RENDAH	12,69	SANGAT RENDAH
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	70,18	SEDANG	69,98	SEDANG
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	SANGAT RENDAH	0,00	SANGAT RENDAH
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	33,65	SANGAT RENDAH	23,69	SANGAT RENDAH
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50,49	SANGAT RENDAH	50,27	SANGAT RENDAH
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	20,28	SANGAT RENDAH	19,59	SANGAT RENDAH
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4,60	SANGAT RENDAH	17,81	SANGAT RENDAH
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	28,85	SANGAT RENDAH	7,09	SANGAT RENDAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	55,75	RENDAH	34,98	SANGAT RENDAH
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40,64	SANGAT RENDAH	40,00	SANGAT RENDAH
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	40,64	SANGAT RENDAH	40,00	SANGAT RENDAH
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	27,36	SANGAT RENDAH	18,27	SANGAT RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27,30	SANGAT RENDAH	1,54	SANGAT RENDAH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14,81	SANGAT RENDAH	14,40	SANGAT RENDAH
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	56,53	RENDAH	40,03	SANGAT RENDAH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	19,77	SANGAT RENDAH	17,12	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	43,47	SANGAT RENDAH	43,62	SANGAT RENDAH
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54,02	RENDAH	48,88	SANGAT RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18,19	SANGAT RENDAH	50,42	SANGAT RENDAH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10,20	SANGAT RENDAH	19,08	SANGAT RENDAH
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	53,52	RENDAH	59,00	RENDAH
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	52,63	RENDAH	53,00	RENDAH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	43,08	SANGAT RENDAH	31,31	SANGAT RENDAH
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN	57,48	RENDAH	49,86	SANGAT RENDAH
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61,99	RENDAH	61,62	RENDAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	56,92	RENDAH	50,12	SANGAT RENDAH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	48,56	SANGAT RENDAH	37,28	SANGAT RENDAH
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	67,23	SEDANG	55,81	RENDAH
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	58,63	RENDAH	73,33	SEDANG
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	32,26	SANGAT RENDAH	21,01	SANGAT RENDAH
3.28.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEHUTANAN	48,41	SANGAT RENDAH	31,97	SANGAT RENDAH
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,47	RENDAH	46,88	SANGAT RENDAH
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19,19	SANGAT RENDAH	18,71	SANGAT RENDAH
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	47,72	SANGAT RENDAH	47,72	SANGAT RENDAH
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	34,11	SANGAT RENDAH	34,11	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	12,42	SANGAT RENDAH	12,42	SANGAT RENDAH
3.29.0.00.0. 00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	50,65	SANGAT RENDAH	20,70	SANGAT RENDAH
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54,23	RENDAH	10,69	SANGAT RENDAH
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	44,40	SANGAT RENDAH	32,50	SANGAT RENDAH
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	47,76	SANGAT RENDAH	29,48	SANGAT RENDAH
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	47,50	SANGAT RENDAH	20,09	SANGAT RENDAH
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	36,17	SANGAT RENDAH	10,73	SANGAT RENDAH
3.31.3.30.0. 00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55,90	RENDAH	38,34	SANGAT RENDAH
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49,47	SANGAT RENDAH	36,40	SANGAT RENDAH
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	56,94	RENDAH	46,73	SANGAT RENDAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	43,33	SANGAT RENDAH	31,15	SANGAT RENDAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	97,91	SANGAT TINGGI	59,84	RENDAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	47,80	SANGAT RENDAH	39,36	SANGAT RENDAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89,53	TINGGI	52,58	RENDAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	45,18	SANGAT RENDAH	13,09	SANGAT RENDAH
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	47,21	SANGAT RENDAH	36,23	SANGAT RENDAH
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	45,79	SANGAT RENDAH	40,63	SANGAT RENDAH
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	31,65	SANGAT RENDAH	27,35	SANGAT RENDAH
3.25.3.25.3. 25.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	45,50	SANGAT RENDAH	37,07	SANGAT RENDAH
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,43	RENDAH	48,92	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44,32	SANGAT RENDAH	61,16	RENDAH
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	34,48	SANGAT RENDAH	40,97	SANGAT RENDAH
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	31,66	SANGAT RENDAH	9,01	SANGAT RENDAH
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	52,76	RENDAH	11,85	SANGAT RENDAH
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	41,40	SANGAT RENDAH	50,49	SANGAT RENDAH
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	47,84	SANGAT RENDAH	34,97	SANGAT RENDAH
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56,85	RENDAH	50,27	SANGAT RENDAH
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	15,80	SANGAT RENDAH	23,98	SANGAT RENDAH
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	39,69	SANGAT RENDAH	31,01	SANGAT RENDAH
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	43,57	SANGAT RENDAH	34,61	SANGAT RENDAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	49,87	SANGAT RENDAH	30,82	SANGAT RENDAH
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34,86	SANGAT RENDAH	29,44	SANGAT RENDAH
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48,40	SANGAT RENDAH	36,35	SANGAT RENDAH
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21,93	SANGAT RENDAH	22,53	SANGAT RENDAH
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	55,69	RENDAH	32,19	SANGAT RENDAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46,77	SANGAT RENDAH	38,96	SANGAT RENDAH
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	28,12	SANGAT RENDAH	43,87	SANGAT RENDAH
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	25,18	SANGAT RENDAH	6,28	SANGAT RENDAH
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	62,19	RENDAH	18,51	SANGAT RENDAH
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	34,69	SANGAT RENDAH	74,91	SEDANG
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	29,08	SANGAT RENDAH	41,68	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	40,48	SANGAT RENDAH	0,00	SANGAT RENDAH
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	58,06	RENDAH	33,33	SANGAT RENDAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	48,51	SANGAT RENDAH	47,18	SANGAT RENDAH
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49,02	SANGAT RENDAH	33,50	SANGAT RENDAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39,29	SANGAT RENDAH	48,03	SANGAT RENDAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	49,12	SANGAT RENDAH	17,18	SANGAT RENDAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	22,30	SANGAT RENDAH	35,28	SANGAT RENDAH
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37,38	SANGAT RENDAH	49,65	SANGAT RENDAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40,14	SANGAT RENDAH	42,31	SANGAT RENDAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18,70	SANGAT RENDAH	57,00	RENDAH
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49,50	SANGAT RENDAH	53,74	RENDAH
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47,85	SANGAT RENDAH	54,54	RENDAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	55,00	RENDAH	52,93	RENDAH
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	51,30	RENDAH	49,68	SANGAT RENDAH
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,51	RENDAH	42,35	SANGAT RENDAH
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	50,04	SANGAT RENDAH	57,00	RENDAH
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47,73	SANGAT RENDAH	40,63	SANGAT RENDAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,83	RENDAH	49,83	SANGAT RENDAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	40,95	SANGAT RENDAH	37,88	SANGAT RENDAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	37,10	SANGAT RENDAH	34,19	SANGAT RENDAH



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	48,70	SANGAT RENDAH	47,15	SANGAT RENDAH
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54,31	RENDAH	54,00	RENDAH
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	31,16	SANGAT RENDAH	40,30	SANGAT RENDAH
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	42,48	SANGAT RENDAH	55,94	RENDAH
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50,40	SANGAT RENDAH	47,87	SANGAT RENDAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21,78	SANGAT RENDAH	64,01	RENDAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	43,69	SANGAT RENDAH	35,49	SANGAT RENDAH
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	43,69	SANGAT RENDAH	35,49	SANGAT RENDAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43,29	SANGAT RENDAH	45,83	SANGAT RENDAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	46,61	SANGAT RENDAH	28,13	SANGAT RENDAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	31,94	SANGAT RENDAH	32,51	SANGAT RENDAH
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	94,34	SANGAT TINGGI	68,22	SEDANG
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	94,34	SANGAT TINGGI	68,22	SEDANG
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53,27	RENDAH	51,15	RENDAH
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	58,71	RENDAH	55,47	RENDAH
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	99,44	SANGAT TINGGI	99,00	SANGAT TINGGI
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	97,09	SANGAT TINGGI	97,00	SANGAT TINGGI
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	76,10	TINGGI	76,10	TINGGI



KODE URUSAN/ ORGANISASI / PROGRAM	URUSAN/ORGANISASI/ PROGRAM	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	30,61	SANGAT RENDAH	30,61	SANGAT RENDAH
	TOTAL ANGGARAN/RATA-RATA CAPAIAN	43,87	SANGAT RENDAH	42,16	SANGAT RENDAH

Sumber: Hasil Pengolahan Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

7. Diketahui bahwa tingkat capaian kinerja pada seluruh program Perangkat Daerah yang diperoleh berdasarkan penginputan pada aplikasi E-Monev dan penyampaian laporan evaluasi Renja pada Triwulan II Tahun 2023, sebanyak 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah berada pada kriteria atau predikat capaian Sangat Rendah, 6 (enam) Perangkat Daerah dengan predikat Rendah dan 2 (dua) Perangkat Daerah dengan predikat Sedang, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, yang telah dikelompokkan berdasarkan predikat dan urutan capaian kinerja tertinggi hingga terendah.

Tabel 3.9
Pengelompokan Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Program pada Triwulan II Tahun 2023

NO	PREDIKAT PENILAIAN CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	-----
2	Tinggi	76% ≤ 90%	-----
3	Sedang	66% ≤ 75%	1. Dinas Pemuda dan Olahraga (69,24%) 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (68,22%)
4	Rendah	51% ≤ 65%	1. Dinas Sosial (55,51%) 2. Dinas Sumber Daya Air (58,81%) 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (53,14%) 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (55,88%) 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (53,74%) 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (55,94%)
5	Sangat Rendah	≤ 50%	1. Dinas Pendidikan (36,84%) 2. Dinas Kesehatan (28,92%)



NO	PREDIKAT PENILAIAN CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
			3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (23,70%) 4. Dinas Perumahan dan Permukiman (35,06%) 5. Satuan Polisi dan Pamong Praja (9,48%) 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (27,11%) 7. Dinas Komunikasi dan Informatika (47,13%) 8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (32,61%) 9. Dinas Lingkungan Hidup (38,09%) 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (41,61%) 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (39,04%) 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (40,19%) 13. Dinas Perhubungan (30,68%) 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (39,98%) 15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (45,14%) 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (29,33%) 17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (20,70%) 18. Dinas Kehutanan (31,97%) 19. Dinas Kelautan dan Perikanan (37,07%) 20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (38,34%) 21. Dinas Perkebunan (49,86%) 22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (43,62%) 23. Sekretariat Daerah (32,19%) 24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (29,44%) 25. Badan Kepegawaian Daerah (47,15%) 26. Badan Pendapatan Daerah (49,65%) 27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (33,50%) 28. Badan Penghubung (49,68%) 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (40,63%) 30. Inspektorat (35,49%)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

8. Diketahui bahwa tingkat capaian anggaran pada seluruh program Perangkat Daerah yang diperoleh dari aplikasi E-Monev dan penyampaian laporan evaluasi Renja dari seluruh Perangkat Daerah, sebanyak 25 Perangkat Daerah berada pada predikat capaian Sangat



Rendah, 12 (dua belas) Perangkat Daerah dengan predikat Rendah, 1 (satu) Perangkat Daerah dengan predikat Tinggi dan 1 (satu) Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, yang telah dikelompokkan berdasarkan predikat dan urutan capaian anggaran tertinggi hingga terendah.

Tabel 3.10
Pengelompokan Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Capaian Anggaran Program pada Triwulan II Tahun 2023

NO	PREDIKAT PENILAIAN CAPAIAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (94,34%)
2	Tinggi	76% ≤ 90%	1. Dinas Pemuda dan Olahraga (76,17%)
3	Sedang	66% ≤ 75%	-----
4	Rendah	51% ≤ 65%	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (51,23%) 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (56,05%) 3. Satuan Polisi dan Pamong Praja (54,24%) 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (52,25%) 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (56,33%) 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(62,18%) 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (54,16%) 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (53,85%) 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (55,90%) 10. Dinas Perkebunan (57,48%) 11. Sekretariat Daerah (55,69%) 12. Badan Penghubung (51,30%)
5	Sangat Rendah	≤ 50%	1. Dinas Pendidikan (34,67%) 2. Dinas Kesehatan (29,49%) 3. Dinas Sosial (46,79%) 4. Dinas Perumahan dan Permukiman (47,33%) 5. Dinas Sumber Daya Air (39,14%) 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (39,99%) 7. Dinas Komunikasi dan Informatika (40,22%) 8. Dinas Lingkungan Hidup (29,40%) 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (45,35%) 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (47,29%)



NO	PREDIKAT PENILAIAN CAPAIAN ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
			11. Dinas Perhubungan (42,34%) 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (43,40%) 13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (50,65%) 14. Dinas Kehutanan (48,41%) 15. Dinas Kelautan dan Perikanan (45,50%) 16. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (43,47%) 17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (34,86%) 18. Badan Kepegawaian Daerah (48,70%) 19. Badan Pendapatan Daerah (37,38%) 20. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (49,50%) 21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (49,02%) 22. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42,48%) 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (47,73%) 24. Inspektorat (43,69%)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

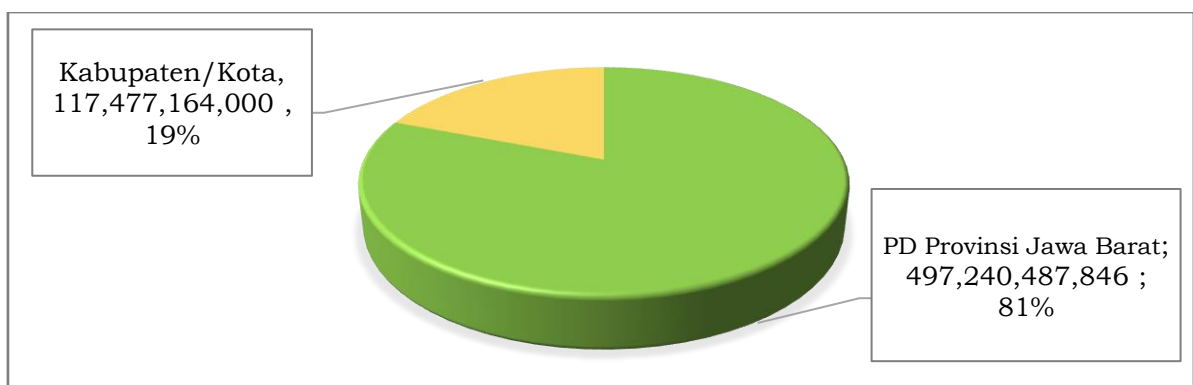
Penilaian tingkat capaian kinerja terendah terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebesar 9,48 persen. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sarana dan prasarana sebagai penunjang pokok keberhasilan capaian kinerja sangat kurang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Selain itu, alokasi anggaran dirasa belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah terutama dalam upaya mencapai Indeks Ketenteraman dan Ketertiban sejak tahun 2022 yang menjadi Indikator Kinerja Daerah sebesar 74 poin (Kategori NYAMAN). Untuk capaian kinerja anggaran terendah terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun kendala yang dihadapi yaitu faktor administrasi (persuratan lintas dinas, status kepemilikan aset, dll.) mengakibatkan pelaksanaan sering tidak sesuai rencana. Selain itu, terdapat kegiatan yang bergantung terhadap kegiatan lain atau lembaga lain. Ditambah lagi, terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan mengalami keterlambatan karena penanganan riviui LKPJ 2023.



Capaian kinerja tertinggi diperoleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dukungan ditunjukkan dengan adanya komitmen yang besar dari Pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera melaksanakan kegiatan sehingga target yang direncanakan dapat tercapai, bahkan ada yang melebihi target. Selain itu, adanya kolaborasi kegiatan pemasalan olahraga dengan kabupaten/kota yang menyebabkan realisasi kinerja sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk capaian kinerja anggaran tertinggi diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Faktor pendorong keberhasilan kinerja disebabkan oleh tersedianya anggaran yang sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. Selain itu, adanya sinergitas antar pemangku kebijakan (*stakeholder*) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, Pemerintah melaksanakan proyek prioritas dinamakan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar adalah untuk pembangunan fisik dan tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk tahun 2023 ini terdapat 48 kegiatan yang dikategorikan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat dengan 37 kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan skema Belanja Bantuan Keuangan.

Gambar 3.12
Sandingan Alokasi Pendanaan Proyek Strategis
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

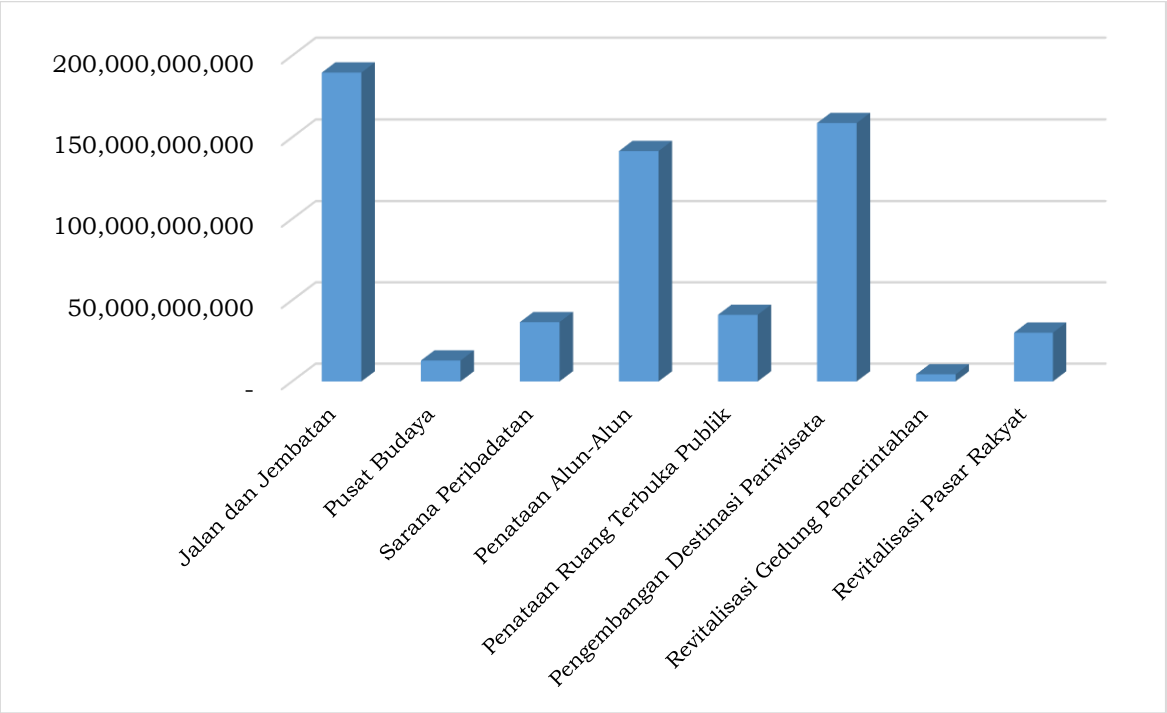


Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah



Apabila dilihat dari kelompok Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2023, kelompok Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai alokasi terbesar, kemudian alokasi kelompok Pengembangan Destinasi Pariwisata terbesar kedua, sedangkan yang terkecil adalah alokasi dana untuk bidang Revitalisasi Gedung Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.13
Alokasi Pendanaan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
Berdasarkan Kelompok Proyek



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Sampai dengan triwulan II Tahun 2023 pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat bervariasi, ada yang menunjukkan deviasi positif dan ada juga yang pelaksanaannya dilaksanakan terlambat. Beberapa kondisi yang menjadi tantangan dan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek diantaranya permasalahan proses lelang yang mengakibatkan konstruksi mundur dari rencana yang ditetapkan, adanya perubahan beberapa item pekerjaan, kurangnya tenaga kerja dan ketersediaan material di beberapa proyek, cuaca yang kurang mendukung, dsb.



Berbagai upaya untuk mengantisipasi deviasi negatif pelaksanaan pekerjaan terus dilakukan mengingat Proyek Strategis akan menjadi daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Seluruh item pekerjaan telah rutin dievaluasi dan disusun rencana penyelesaiannya, khususnya untuk keterlambatan pengadaan material. Koordinasi yang intens juga dilakukan antar stakeholder, baik konsultan perencana, pelaksana, konsultan pengawas dan Perangkat Daerah pengampu sehingga jika terdapat kekeliruan, keterlambatan ataupun penyimpangan pekerjaan dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pihak pelaksana dihimbau untuk menguasai rencana kerja (*schedule*) yang telah ditetapkan serta melakukan pemilihan metode kerja yang tepat untuk menghindari keterlambatan. Perhatian dan kepatuhan terhadap Spesifikasi Teknis atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen kontrak lainnya juga ditekankan kepada semua pihak yang terlibat. Ditambah lagi, setiap pekerjaan diawasi dan hasilnya direviu untuk memastikan semua tahapan terlaksana dengan baik. Adapun rencana percepatan penyelesaian proyek pekerjaan terus diupayakan mengingat beberapa proyek akan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat sebelum masa kepemimpinan berakhir.

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat
Pada Triwulan II Tahun 2023

NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
Jalan dan Jembatan				189.648.704.146				
1	Pembangunan Pedestrian Lembang	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	20.600.000.000	50,86	60,93	10,07	
2	Pembangunan Jembatan Walahar	Kabupaten Karawang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang	36.067.127.000			0,00	Proses lelang kontruksi, perkiraan kontrak di awal bulan Juli.
3	Pembangunan Jembatan Sodong-Kopo	Kabupaten Pangandaran	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	80.000.000.000	18,37	18,35	-0,01	1. Desain masih proses asistensi tim KKJTJ 2. Perubahan item pekerjaan karena adanya saran perubahan desain dari tim KKJTJ



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
4	Pembangunan Jembatan Cihoe	Kabupaten Bogor	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	15.200.000.000	34,70	15,66	-19,04	Relokasi tiang kabel udara milik PT. PLN, baru dapat direalisasikan tanggal 22 Juni 2023, sehingga terjadi keterlambatan pengeboran disisi abutmen arah Jonggol selama 12 hari kalender, yang diakibatkan lokasi rencana pemindahan tiang kabel udara PT. PLN terhalang oleh pohon milik warga yang harus ditebang sebanyak 6 pohon dan dapat terealisasi tanggal 14 Juni 2023.
5	Penataan Pedestrian Ruas Jl Arief Rahman Hakim Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi	11.000.000.000	62,49	66,58	4,10	
6	Penataan Pedestrian Ruas Jl Sudirman Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi	11.000.000.000	60,96	65,93	4,97	
7	Penataan Pedestrian Ruas Jl Siliwangi Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi	4.900.000.000	78,66	69,71	-8,95	Terkendala area kerja yang terbatas dikarenakan arus lalu lintas yang padat.
8	Penataan Pedestrian Ruas Jl Veteran Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi	7.200.000.000	54,54	55,94	1,40	
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Perkemahan Kiara Payung	Kabupaten Sumedang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	3.681.577.146	81,20	100	18,80	
Pusat Budaya				12.868.437.000				
1	Pembangunan Pusat Budaya Karangkamulyan	Kabupaten Ciamis		12.868.437.000	59,17	74,87	15,70	
Sarana Peribadatan				36.500.000.000				
1	Pembangunan Menara Masjid Al-Kamil Kawasan Jati Gede (Lanjutan)	Kabupaten Sumedang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang	11.500.000.000			0,00	
2	Pembangunan Jembatan Masjid Al-Kamil Kawasan Jati Gede (Lanjutan)	Kabupaten Sumedang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang	5.000.000.000			0,00	



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
3	Pembangunan Masjid Margonda	Kota Depok	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	20.000.000.000			0,00	1. Serah terima dokumen DED belum selesai; 2. Belum ada kesepakatan bersama antara wali siswa dengan Pemkot Depok mengenai relokasi siswa SD Pondok Cina 1.
Penataan Alun-Alun				141.582.000.000				
1	Penataan Alun-Alun Ciparay Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	10.000.000.000			0,00	Pekerjaan belum dilaksanakan karena menunggu izin PBG selesai.
2	Penataan Alun-Alun Kab. Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	14.000.000.000	66,31	50,32	-15,99	1. Kinerja Tenaga Kerja di lapangan kurang efektif 2. Kurangnya tenaga kerja di hari minggu pada pekerjaan erection baja 3. Excavator tidak beroperasi karena tidak tersedia bahan bakar di lokasi 4. Kurangnya air kerja di Lokasi
3	Penataan Alun-Alun Ciamis Kab. Ciamis	Kabupaten Ciamis	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	16.000.000.000	59,32	53,93	-5,39	1. Kurangnya tenaga kerja, sehingga pelaksanaan di lapangan kurang maksimal 2. Material paving tipe E belum tersedia di lokasi
4	Penataan Alun-Alun Ciranjang Kab. Cianjur	Kabupaten Cianjur	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	16.000.000.000	66,03	49,67	-16,36	Kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat pekerjaan terutama di pertengahan minggu menuju akhir pekan dan hujan di malam hari yang berdampak di pekerjaan pagi hari
5	Penataan Alun-Alun Pataraksa Kab. Cirebon (Lanjutan)	Kabupaten Cirebon		5.000.000.000			0,00	Proses lelang di Biro PBJ.



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
6	Penataan Alun-Alun Karawang Kab. Karawang (Lanjutan)	Kabupaten Karawang	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	8.000.000.000	39,77	40,94	1,17	1. Material Granite belum tersedia di lapangan 2. Area Toilet sudah siap untuk dipasang keramik namun belum dikerjakan 3. Area lantai toilet sudah siap dikerjakan lantai Kerja beton Site Mix t.5cm Camp. 1Pc2Ps3Kr (K-125) namun di lapangan belum dikerjakan 4. Untuk Sign Letter Karawang, belum ada informasi sedang dikerjakan, mengingat pengerjaannya cukup sulit dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama 5. Untuk pekerjaan struktur dan arsitektur belum tersedia gambar shopdrawing
7	Penataan Alun-Alun Taman Benteng Pancasila Kab. Subang	Kabupaten Subang	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	21.200.000.000	58,19	51,71	-6,49	1. Pemasangan atap gedung pengelola menunggu masa beton 2. Drop material terlambat akibat cuaca mulai kembali hujan sehingga material masuk diatas jam 12.00 3. Kurangnya pekerjaan pada pekerjaan pasang reng sehingga pemasangan atap genteng pendopo belum dapat dikerjakan 4. Area skate park belum bisa dikerjakan karena masih digunakan untuk mobilisasi material
8	Penataan Alun-Alun Gadobangkong Kab. Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	18.500.000.000			0,00	Tender ulang dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang lolos evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.
9	Penataan Alun-Alun Cimahi Kota Cimahi	Kota Cimahi	Dinas Perumahan dan Permukiman	16.882.000.000	95,47	86,59	-8,88	1. Deviasi terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kontrak



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
			Provinsi Jawa Barat					addendum tambah 2. Air mancur kering (<i>Dry Fountain</i>) terkendala dikarenakan proses pengerjaan system air mancur dan aksesoris tidak dikerjakan di lapangan (fabrikasi di workshop)
10	Penataan Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	16.000.000.000	69,73	67,70	-2,03	1. Pekerjaan beton porous masih tertunda telah ada hasil uji dan sedang akan mengajukan Request for work kepada pengawas dengan melampirkan hasil uji beton porous. 2. Pekerjaan wall climbing akan dilaksanakan setelah dilakukan addendum.
Penataan Ruang Terbuka Publik				41.000.000.000				
1	Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Lanjutan)	Kota Bandung	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	28.500.000.000	15,30	10,52	-4,78	1. Overlay Kondisi Pohon Eksisting yang berada dengan Desain rencana pada area festive Plaza 2. Gambar struktur DPT area Festive Plaza pada gambar tidak sesuai untuk kondisi lapangan tentunya berdampak pada kekuatan struktur tersebut sehingga pekerjaan DPT tertunda
2	Pembangunan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) Gasibu-Monpera	Kota Bandung	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12.500.000.000			0,00	Kegiatan kemungkinan tidak akan dilaksanakan karena belum ada izin dari KemenPUPR.
Pengembangan Destinasi Pariwisata				158.754.010.700				
1	Pengembangan Agro Edu Wisata Perbaikan Laboratorium Kimia Agro	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	8.565.000.000			0,00	Proses penyusunan dokumen lelang.
2	Pengembangan Agro Edu Wisata Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia Agro	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	5.144.287.200			0,00	



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
3	Pengembangan Agro Edu Wisata Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Sapi Perah dan Hijau Pakan Ternak Cikole	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	1.000.000.000			0,00	Proses lelang di Biro PBJ.
4	Situ Kemang	Kabupaten Bogor	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	5.000.000.000	19,30	40,66	21,36	
5	Situ Panjalu	Kabupaten Ciamis	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	15.000.000.000			0,00	Proses penandatanganan kontrak belum dilaksanakan (tertunda selama 2 minggu) karena pihak penyedia jasa belum dapat melampirkan dokumen jaminan bank.
6	Situ Cisaat	Kabupaten Purwakarta	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	3.000.000.000			0,00	Rencana penandatanganan kontrak berubah menjadi 14 Agustus (semula 14 Juli) karena pokja membutuhkan waktu untuk melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga
7	Situ Jatijajar	Kota Depok	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	5.000.000.000	63,25	66,40	3,15	
8	Situ Kandang Sapi	Kabupaten Bogor	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	3.000.000.000	60,58	61,39	0,81	
9	Situ Taman	Kabupaten Bogor	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	5.000.000.000	24,38	24,43	0,04	
10	Pembangunan Embung Sindangsari (Bumi Perkemahan Kiara Payung)	Kabupaten Sumedang	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	7.000.000.000	2,35	0,33	-2,02	1. Lambatnya pengukuran ulang untuk mereview pola design mebung dikarenakan adanya perubahan pola embung dari rencana awal 2. Kurang maksimalnya tenaga kerja di lapangan dan penggalian tanah menggunakan alat berat



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
11	Amphiteater Ciletuh (Lanjutan)	Kabupaten Sukabumi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	10.498.885.300	81,02	67,94	-13,08	1. Keterlambatan pemesanan material bambu dan kayu, setelah di pesan ada proses treatment perendaman selama 1 bulan bambu, dan 2 minggu untuk kayu. 2. Terlambatnya penambahan tenaga kerja di masing masing zona 3. Kesulitan mencari spesialis tukang kayu untuk area guest house
12	Gunung Padang (Lanjutan)	Kabupaten Cianjur	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	22.853.188.600	88,08	83,25	-4,83	1. Faktor cuaca menjadi kendala, sehingga pekerjaan tertunda karena area pekerjaan yang berada di tempat terbuka; 2. Pekerjaan ME belum dilaksanakan 3. Material sering terlambat
13	Pusat Pencak Silat Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	32.251.049.600	58,23	58,61	0,38	Jalur angkutan material terkendala oleh pekerjaan Jalan yg sedang dikerjakan oleh kontraktor jalan.
14	Pantai Gebang Mekar	Kabupaten Cirebon	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	5.000.000.000	24,49	36,29	11,80	Kondisi tanah area promenade yang terendam air laut menjadi lebih lunak diperparah dengan adanya rembesan yang berlanjut akibat pada bagian sambungan antara dinding dan pondasi dinding promenade memiliki celah akibat terkikis oleh air laut
15	Pantai Pangumbahan (Lanjutan)	Kabupaten Sukabumi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	5.000.000.000	78,67	77,76	-0,91	Terjadi keterlambatan pada pemasangan atap bitumen dikarenakan material datang terlambat.
16	Pantai Karangtawulan	Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya	10.000.000.000	59,50	53,03	-6,47	



NO	NAMA PROYEK	KABUPATEN/ KOTA LOKASI PROYEK	PD PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
17	Penataan Kawasan Kampung Bali	Kota Bekasi	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2.941.600.000			0,00	Proses lelang belum dilaksanakan karena dokumen lelang belum di TTD oleh pejabat terkait yang sedang melaksanakan ibadah haji.
18	Penataan Taman Hutan Raya Juanda	Kota Bandung	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	12.500.000.000			0,00	Proses Lelang PBJ dengan Rencana penandatanganan kontrak 12 Agustus 2023
Revitalisasi Gedung Pemerintahan				4.364.500.000				
1	Pembangunan Gedung laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (Lanjutan)	Kota Bandung	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	2.000.000.000	72,40	100,00	27,60	
2	Pengadaan Peralatan Mebeulair dan Peralatan Gedung laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (Lanjutan)	Kota Bandung	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	1.500.000.000			0,00%	
3	Pengembangan Laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (Lanjutan)	Kota Bandung	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	864.500.000	42,11	36,19	-5,92	
Revitalisasi Pasar Rakyat				30.000.000.000				
1	Pasar Ciranjang (Lanjutan)	Kabupaten Cianjur	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	15.000.000.000	89,76	84,82	-4,94	Kurangnya tenaga kerja dan material
2	Pasar Harapan Jaya (Lanjutan)	Kota Bekasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	15.000.000.000	24,95	25,88	0,94	
JUMLAH				614.717.651.846				

Sumber: Pelaporan Unit Manajemen Proyek Strategis (UMPS) Triwulan II 2023, diolah



BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 dilaporkan dalam bentuk Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Monev, sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi sampai dengan bulan Juni, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian kinerja setiap program Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran program Perangkat Daerah kurang lebih hampir sama, dimana tingkat capaian kinerja masih berpredikat Sangat Rendah.

Dalam pelaksanaan program pada Triwulan II Tahun 2023, Perangkat Daerah menemui berbagai kendala, baik secara eksternal maupun internal yang dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian kinerja, serta hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah, anggaran yang tersedia sesuai rencana kegiatan, pemanfaatan teknologi, dsb. perlu diidentifikasi sehingga dapat dipacu dan ditingkatkan untuk mendukung pencapaian kinerja yang memenuhi target. Begitu juga faktor penghambat seperti proses pencairan dana yang terkendala, permasalahan dalam mengelola aplikasi SIPD, terbatasnya jumlah SDM yang terampil dalam mengurus perencanaan dan penganggaran, proses lelang yang tertunda, dsb. juga perlu diidentifikasi sehingga dapat dicari solusi agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Terkait dengan faktor pendorong dan penghambat setiap Perangkat Daerah telah diidentifikasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Renja yang disampaikan. Untuk penjelasan yang lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Dinas Pendidikan	• Kesepakatan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, seperti pihak internal organisasi, <i>stakeholder</i>, dan masyarakat; • Komunikasi yang efektif dan terbuka antara semua pihak yang terlibat, termasuk pihak manajemen dan karyawan; • Pelaporan pengelolaan keuangan oleh sekolah-sekolah kepada KCD seperti pengelolaan dana BOPD dan BPMU sudah dilaporkan dengan cukup baik serta terfasilitasi melalui Rekonsiliasi yang rutin dilaksanakan; • Pemantauan dan evaluasi cukup rutin dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta kemampuan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.	• Sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil; • Ketidakkonsistenan indikator kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; • Adanya pemantauan atau evaluasi yang cukup terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, namun tidak disediakan anggaran khusus untuk pengawasan di setiap bidang; • Adanya kendala penyusunan Juknis misalnya untuk penambahan ruang kelas baru (belum ada standar berapa biaya untuk pembangunan 1 (satu) ruang ataupun Juknis untuk kegiatan lomba yang menunggu dari Pusat; • Adanya keterlambatan proses lelang; • Kebutuhan Tim Ahli dan Sewa Hosting (Server IWS) untuk penyelenggaraan proses belajar dan ujian membutuhkan biaya yang besar. Kalau menggunakan server fisik akan terkendala di biaya pemeliharaan.; • Adanya kendala proses seleksi ujian bagi peserta didik dimana masih ada yang tidak jujur, dan ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan; • Proses pencairan keuangan atau SI membutuhkan waktu yang lumayan cukup panjang.
2	Dinas Kesehatan	• Dinas Kesehatan memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD; • Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan belanja Kesehatan sebesar 10 persen dari belanja APBD Provinsi Jawa Barat; • Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Kesehatan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas; • Alat pendukung seperti alat pengolah data, internet dsb dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah	• Pengadaan barang mengalami beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya baik dari sisi waktu, sumberdaya, dan kelengkapan lainnya; • Ada beberapa kegiatan yang pencapaian realisasinya sangat ditentukan oleh pihak eksternal sehingga menyebabkan target tidak dapat tercapai sesuai waktu yang diharapkan; • Masih ada beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah dibuat sehingga menyebabkan keterlambatan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		tersedia di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat; • Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk memprioritaskan anggaran bagi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan; • Potensi besar pembiayaan CSR dalam mendukung pembangunan kesehatan.	
3	Dinas Sosial	• Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; • Penyelesaian kegiatan tepat waktu; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.	• Penyusunan rencana anggaran kas yang kurang tepat dalam proses pengajuan dan pencairan anggaran serta beberapa kegiatan gagal lelang.
4	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	• Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, Biro Barang dan Jasa dalam proses pengadaan; • Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; • Adanya Kegiatan Pelatihan dan Diklat dan Bimbingan Teknik Peningkatan Sumber Daya Aparatur.	• Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP; • Diperlukan perbaikan mutu untuk hasil yang lebih optimal dan program belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena keterbatasan anggaran; • Adanya beberapa paket yang waktu pelaksanaannya tidak mencukupi sehingga sisa pekerjaan diluncurkan tahun anggaran 2022 yaitu paket tahun jamak; • Permasalahan cuaca sering menghambat proses pelaksanaan khususnya di kawasan Jabar Selatan; • Pengadaan biasanya terbentur dari pembayaran yang telat, lintas bulan; • Peralatan banyak yang rusak yang mempengaruhi kinerja; • Adanya permasalahan pembebasan lahan dan kendala pelelangan ulang; • Pihak Penyedia tidak mengajukan permintaan uang muka/termin pembayaran; • Pihak Penyedia tidak mampu memenuhi spesifikasi hasil kerja yang disepakati dalam kontrak; • Terdapat pembangunan jembatan yang menggunakan dana DAU, namun anggaran dari Kemenkeu sampai saat ini belum turun sehingga sampai saat ini belum menyerahkan uang muka ke pihak penyedia; • AMP dipakai bergiliran dan kadang membuat keterlambatan; • Peralatan sudah lama dan volume kurang seperti <i>dump truck</i> yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan rutin, namun karena



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			sudah lama sehingga tidak dapat digunakan secara intensif.
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	- Kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan - Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan - Cermatnya aparaturnya dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran (target keuangan fisik, RUP dan RAK) - Cermatnya aparaturnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola.	- Terdapat beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan tetapi masih dalam proses penagihan; - Beberapa pekerjaan tidak jadi dilaksanakan dan akan dikembalikan di perubahan anggaran; - Beberapa paket yang gagal lelang sehingga dilaksanakan lelang ulang: - Penyusunan Kajian Lingkungan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Bekarpur; - Pembangunan Pasar Harapan Jaya; - Penataan Alun-Alun Gadobangkong Kabupaten Sukabumi. - Terdapat beberapa pekerjaan yang memerlukan penjadwalan ulang akibat adanya addendum tambah pekerjaan; - Pengiriman material untuk pekerjaan fisik terhambat karena kendala cuaca.
6	Dinas Sumber Daya Air	Beberapa Sub Kegiatan sesuai dengan rencana dan mempunyai Kinerja yang baik	Berdasarkan evaluasi hasil Renja perangkat daerah Tahun 2023 Triwulan II yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya belum ada hambatan dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih dalam persiapan pekerjaan di Triwulan II Tahun Anggaran 2023.
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan.	- Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di BPBD Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja; - Adanya pelaksanaan kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama sementara sebagaimana pada poin a terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparaturnya; - Adanya pandemi Covid-19 yang menjadi keterbatasan kerja dengan membatasi hubungan sosial.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
8	Satuan Polisi dan Pamong Praja	- Adanya <i>Political Will</i> dari pimpinan daerah terhadap pengejawantahan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja daerah, dengan ditetapkannya Indeks Ketenteraman dan Ketertiban dalam RPJMD 2018 – 2023; - Koordinasi dan kolaborasi yang tercipta antara unit kerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan yang keanggotannya terdiri dari unit kerja sehingga proses perumusan dan penetapan program dan kegiatan termasuk di dalamnya penetapan kinerja dapat dilaksanakan secara sinergi pada unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; - Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda, BPKAD dan Biro Organisasi untuk memperlancar proses <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i> serta penyusunan komponen - komponen yang harus ditetapkan dengan regulasi berupa SBU dan SBK.	- Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP, komitmen Narasumber menjadi permasalahan karena adanya Narasumber yang tidak hadir/memenuhi undangan; - Alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,- belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam upaya mencapai Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) tahun 2022 yang menjadi Indikator Kinerja Daerah sebesar 74 poin (Kategori NYAMAN); - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana sebagai penunjang pokok keberhasilan capaian kinerja sangat tidak memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas; - Aplikasi SIPD Kemendagri versi terakhir mengharuskan kegiatan dirinci dalam satuan komponen dan tidak berlaku satuan paket, hal ini memunculkan hambatan; - Struktur sumber daya aparatur Satpol PP sebagian besar berlatarbelakang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan lulusan Sarjana dengan jumlah terbatas.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	- Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK); - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Pihak Penyedia terlambat mengajukan penagihan pembayaran.
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan dari program/kegiatan/subkegiatan; - Melaksanakan Konsolidasi antara pengelola administrasi keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Bendahara Pengeluaran yang diawasi oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrasi	- Penyerapan anggaran semester I lingkup DKPP sebesar 36,58% terhadap target sebesar 45,14%, sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 8,56%. Proses pengerjaan berakhir di akhir bulan Juni sehingga proses administrasi pertanggungjawaban belum terekap di Triwulan II. - Perlu diceknya jumlah pelimpahan disetiap bulannya agar sesuai dengan target anggaran kas. - Dalam proses pertanggungjawaban masih banyak terjadi human error



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			sehingga memperlambat proses realisasi kegiatan. • Konsolidasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan masing-masing kepala TU di Unit Kerja tentang ketatausahaan. Jangan sampai terlewat urusan- urusan kepegawaian, umum, keuangan dan penganggaran. Harap punya komunikasi tersendiri dan agenda terkait ke TU an. • Terdapat kasus anthrax di Yogyakarta agar dapat ditindaklanjuti kesiagaan di Jawa Barat agar tidak terjadi juga.
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian; • Pemberlakuan SOP dalam pelaksanaan kegiatan disusun secara lengkap dan jelas; • Tingkat pemahaman pimpinan terhadap keamanan informasi (<i>security awareness</i>) sangat baik; • Pelaksanaan pekerjaan sudah sejalan dengan program SPBE dari KemenPAN-RB.	• Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK); • Perjalanan Dinas rendah karena bentuknya undangan (undangan) dan banyaknya undangan yang dilaksanakan dengan <i>zoom meeting</i>; • P3K dianggarkan 17 (tujuh belas) orang, yang lulus cuma 10 (sepuluh) orang, namun belum ada kabar kapan mulai bekerja karena menunggu kebijakan Pusat; • Ada prioritas terkait pengadaan mebel yang berubah akibat intervensi Pimpinan sehingga tidak terserap; • Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan; • Keterkaitan dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terkadang mengalami keterlambatan; • Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; • Terkait penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggaran dirasa kurang karena lisensi saja membutuhkan 200 juta. Anggaran paling besar untuk komunikasi publik dan pengelolaan <i>e-government</i> dan kehumasan sehingga anggaran ini dirasa kecil untuk mengakomodir semuanya.
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	• Adanya dukungan dari pimpinan terkait kelancaran program dan kegiatan dinas; • Jumlah personel yang cukup dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; • Respon para peserta yang positif dalam pelaksanaan kegiatan.	• Sinkronisasi kegiatan antar kabupaten/kota dengan Provinsi belum optimal; • Tingkat pemahaman peserta belum merata dan proses identifikasi peserta dalam mengikuti kegiatan, lingkupnya masih terlalu besar; Permasalahan UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan Kewirausahaan:



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			• Terkait realisasi e-katalog, dirasa pihak ketiga kurang responsif (lift) dan begitu juga untuk M-Biz (pengadaan barang yang bentuknya tidak lelang) dimana pihak ketiga telat respon dan permasalahan pada server yang lama <i>loading</i>; • Terdapat kesalahan penganggaran dan belum mendapatkan pihak ketiga; • Adanya permasalahan Juknis dimana ternyata terkait inkubasi harus dibentuk dari Provinsi.
13	Dinas Lingkungan Hidup	• Pelaksana kegiatan memahami tugas dan fungsinya serta adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait; • Sarana dan prasarana kerja yang memadai; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; • Program/kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun	• Faktor administrasi (persuratan lintas dinas, status kepemilikan aset, dll.) mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai rencana; • Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan; • Terdapat kegiatan yang bergantung terhadap kegiatan lain atau lembaga lain; • Kegiatan yang sudah direncanakan mengalami keterlambatan karena penanganan riviw LKPJ 2023; • Adanya rotasi struktural mengakibatkan keterlambatan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Adanya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pihak-pihak swasta dalam memudahkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan; • Melakukan kegiatan koordinasi monitoring evaluasi yang berkelanjutan secara intensif dengan desa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pemecahan permasalahan desa; • Adanya Program Sabisa dimana pembinaan Bumdes secara langsung untuk penguatan kapasitas bisnis Bumdes secara terpadu mulai dari pelatihan/workshop, pemagangan/sekolah lapangan sampai dengan kemitraan/kerjasama bisnis sehingga dapat mampu mengembangkan potensi desa dan meningkatkan pengelolaan Bumdes untuk dapat mampu mandiri secara ekonomi; • Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPMDesa; • Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang	• Masih adanya desa-desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai. • Masih rendahnya aparatur desa dalam hal pengembangan potensi-potensi yang ada didesa, dimana aparatur desa selalu melihat desa wisata padahal potensi utama desa bukan desa wisata. • Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa. • Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didesa Provinsi Jawa Barat yang belum terbentuk dan yang sudah terbentuk cenderung naik turun dalam pengelolaannya sehingga kegiatan usaha nya menyebabkan menurunnya pendapatan bumdes/pendapatan asli desa. • Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang kuantitas Sumber Daya Alam terbatas di desa perbatasan. • Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa; - Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); - Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain: digitaslisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem berbasis IT.	jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa. - Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa. - Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	- Dukungan dari perangkat daerah yang saling berkaitan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara bidang pada DP3AKB dalam penyediaan data dan informasi; - Komitmen SDM yang sangat tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan.	- Mengingat pelaksanaan beberapa kegiatan masih dalam tahap awal, hambatan yang ditemui terutama pada saat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memulai kegiatan, mengingat beberapa di antaranya masih belum memahami teknis, <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari kegiatan yang akan dilaksanakan; - Adanya pergantian pejabat sehingga beberapa pembayaran sempat tertunda; - Uang persediaan tidak cukup untuk membayar konselor; - Banyak kegiatan yang bantrok sehingga perlu perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan; - Kode rekening yang berbeda dan tidak bisa lintas misalnya untuk uang anak dan uang perempuan; - SDM terbatas dengan banyak korban harus harus ditangani, misalnya Jafung untuk melayani korban cuman ada 2 (dua) di UPTD, namun kasus terus meningkat; - Untuk advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan dilakukan pergeseran anggaran, dimana awalnya <i>fullday</i> diubah menjadi <i>fullonline</i> dengan rencana tahunan 2 (dua) kali, namun karena <i>fullday</i> dijadikan hanya 1 (satu) kali setahun.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	• Adanya komitmen yang besar dari Pimpinan Dispora Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan sehingga target yang direncanakan dapat tercapai bahkan ada yang melebihi target; • Adanya kegiatan kolaborasi kegiatan pemasalan olahraga dengan kabupaten/kota yang menyebabkan realisasi kinerja melebihi dari target yang direncanakan.	• Ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan tidak tepatnya penyusunan anggaran kas pada saat penyusunan rencana anggaran; • Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran; • Dana Hibah untuk organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan belum diberikan dikarenakan masih banyaknya ketidaksesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan sehingga pemberian dana hibah ditunda sampai organisasi dapat menyesuaikan RAB-nya tersebut. • Adanya perubahan jadwal kerjasama dengan prefektur Shizouka Jepang terkait perubahan jadwal pencairan hibah; • Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian; • Ada alokasi belanja paket <i>meeting</i> luar kota untuk akomodasi pelatihan sekolah parlemen pemuda yang mekanisme pencairannya diubah menjadi LS sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam hal mekanisme pengadaan; • Belanja paket perjalanan dinas biasa yang belum diselenggarakan karena padatnya jadwal kegiatan; • Adanya pergeseran anggaran di bulan Februari yang membuat adanya pergeseran pada alokasi dan jadwal belanja • Ketidaksesuaian kode rekening harus disesuaikan, pelaksanaan dilaksanakan akhir bulan sehingga laporan keuangan dilaporkan bulan berikutnya; • Pelaksanaan rapat RAD yang semula dilaksanakan 2 (dua) kali semuanya bulan Maret, baru dilaksanakan 1 (satu) kali karena Pergub dan Kepgub belum ditandatangani sampai bulan Maret 2023; • Terdapat pembayaran makanan dan minuman para atlet PPLP belum terbayarkan bulan Maret;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			• Kegiatan piala dunia FIFA U-20 di Jabar tidak jadi dilaksanakan; • Pengarahan SP3OR melalui pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tahun 2023 belum terlaksana. Pencairan dana hibah belum terselesaikan, belanja iuran jaminan/asuransi serta belanja tenaga ahli SP3OR belum dibayarkan; • Pemberian penghargaan olahraga multievent internasional Sea Games ke-31 Vietnam dan Asean Para Games ke-11 di Surakarta tahun 2022 belum terdistribusi; • Proses dana hibah belum terselesaikan. Hibah pada Koni Jabar belum cair karena belum dilaksanakannya NPHD; • Perjadin tidak terserap seluruhnya, mamin rapat persiapan FPD dan pelaksanaan Rakortek di dinas tidak dilaksanakan.
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Sumber daya yang memadai meliputi dukungan sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia; • Koordinasi yang baik antar bidang dalam penyediaan data dan informasi; • Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; • Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan; • Ide/gagasan untuk pengembangan Sistem Informasi; • Peraturan Kementerian Investasi untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di Bidang Penanaman Modal.	• Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran. • Komponen e-budgeting yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel; • Kelengkapan persyaratan dokumen SPK terkendala; • Masih banyak stok barang di Gudang; • UP/GU tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan; • Ada kebutuhan barang yang harus disesuaikan dengan RKBMD pengadaan; • Adanya <i>reschedule</i> kegiatan dikarenakan terdapat hambatan teknis di lapangan; • Adanya perubahan rencana kegiatan <i>investment award</i> yang menyebabkan anggaran untuk tenaga ahli belum terealisasi karena akan dialihkan untuk video promosi; • Adanya perubahan sistem yang berdampak kepada peraturan pencairan anggaran.
18	Dinas Perhubungan	• Dibentuknya Tim Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi; • Komunikasi dan kerjasama melalui Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan di Jawa Barat sudah baik namun perlu ditingkatkan agar terjalin	• Adanya perubahan jenis kontrak menjadi swakelola dan perubahan rencana kerja; • Kompetensi pada setiap unit kerja yang belum merata; • Dalam hal pengambilan data terdapat perbedaan cara pengumpulan data fasilitas perlengkapan jalan pada setiap



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		kolaborasi dan sinergitas yang lebih baik dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.	wilayah kerja UPTD Dinas Perhubungan; • Terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan di Ruas Jalan Provinsi; • Terdapat kebutuhan yang cukup tinggi terkait fasilitas keselamatan dan pelayanan Pelabuhan dan ASDP; • Ada kunjungan ke Dinas Perhubungan Sumut terkait pelabuhan regional dan saat ini Jabar belum punya pelabuhan regional, namun jumlah SDM dibatasi pada saat melaksanakan kunjungan; • Transportasi massal berbasis rel, selain mempunyai biaya investasi yang tinggi, kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi harus menyelaraskan program dan kegiatan terkait perkeretaapian; • Banyak aduan yang dilaporkan, namun tidak dapat terakomodir karena SDM kurang; • Ada penyesuaian target karena pengadaan terlalu awal dan bersamaan dengan pengawasan sehingga SDM harus berbagi (SDM kurang); • Banyak gedung mess dan gedung <i>workshop</i> yang bocor (sudah tidak layak); • Untuk UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru: terminal sudah tidak layak dan gedung tower ATC harus ada perbaikan. Peralatan untuk perawatan bandara sangat kurang, contoh dengan lahan 63 ha dan untuk membabat rumput, UPTD hanya memiliki 1 (satu) mesin babat yang sudah lama dan 3 (tiga) mesin gendong. Selain itu, bangunan terminal belum ada perbaikan. Alat X-Ray di Bagasi dan Kabin sudah rusak sehingga koper harus selalu dibuka dan diperiksa manual. Ada 6 (enam) mess sudah tidak layak huni dan banyak bocor. Untuk drainase sudah tidak mencukupi. Perkerasan apron sudah banyak yang lepas. Damkar juga sudah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dan sudah sangat lama.
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	• Sarana dan prasarana kerja memadai; • Ketersediaan dana tepat waktu; • Akselerasi ketercapaian output sub kegiatan;	• Keterbatasan aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; • Kegiatan bersifat penyediaan;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		- Jalinan komunikasi dan kerjasama antar bidang; - Peran serta media sosial dalam meningkatkan promosi program dan kegiatan; - Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 dan 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;	- Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi Perangkat Daerah lain (diklat pegawai); - Keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah; - Rendahnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah; - Sarana pendukung layanan perpustakaan dan layanan perbaikan arsip belum mencukupi permintaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; - Beberapa program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang disusun.	- Pada pelaksanaan kegiatan TA. 2023 beberapa kegiatan masih terlambat memproses LS sehingga untuk realisasi kinerja sudah tercapai sementara uang belum terealisasi; - Realisasi kegiatan tidak sesuai dengan alokasi anggaran; - Belanja Sewa Kantor di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang belum bisa direalisasikan karena terkendala komponen yang tidak sesuai dengan belanja. - Operasionalisasi laporan penatausahaan melalui aplikasi SIPD masih mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan SP2D GU; - Dalam hal pengadaan barang dan jasa adanya perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah; - Adanya ketentuan pembelian barang harus berbasis TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sementara belum semua barang elektronik merupakan produk dalam negeri menyebabkan pembelian barang elektronik sedikit terhambat.
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Pelaksanaan rutin evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; - Pelaksanaan monitoring oleh Kepala Dinas memacu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.	- Perubahan <i>timeline</i> kegiatan dan penentuan luasan target pekerjaan menjadi penyebab keterlambatan; - Adanya pemeriksaan oleh BPKP terhadap kegiatan hibah kompetitif di awal bulan April 2023 sehingga perlu menunggu hasil pemeriksaan tersebut; - Selain itu, menunggu keputusan Gubernur terkait verifikasi hibah kompetitif yang sedang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No 13 tahun 2021 - Terhambatnya kegiatan media komunikasi publik;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			• Terhambatnya SK verifikatur untuk belanja hibah kompetitif karena menunggu hasil revidi BPKP; • Deviasi sebesar 95 persen karena belum mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) di Bulan Maret 2023; • Adanya deviasi lebih dari -11,00 persen karena belum adanya penyelenggaraan kegiatan dan undangan untuk mengikuti kursus singkat pelatihan, karena itu realisasi kinerjanya masih rendah; • Perubahan rencana pengadaan barang dan jasa, sudah direncanakan tiap triwulan dan ada perubahan ke triwulan II; • Belum mengajukan Belanja Langsung pada pekerjaan belanja kebersihan, keamanan dan sopir; • Pada Program Pemasaran Pariwisata mundur dari jadwal; • Beberapa SPJ masih dalam proses kelengkapan dokumen karena ada beberapa penyesuaian yang harus dipenuhi.
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait; • Sarana dan prasarana kerja yang memadai; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan Cabang Dinas serta UPTD dalam penyediaan data dan informasi; • Tersedianya aplikasi yang mempermudah pengguna izin dalam melakukan layanan perizinan dan pelaporan kegiatan usaha.	• Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan pelaporan dan perpanjangan izin melalui sistem yang telah disediakan; • Terkendalanya pengajuan perizinan pada sektor air tanah yang terdapat di Pemerintah Pusat melalui Sistem OSS; • Tidak tersedianya keseluruhan data yang menjadi acuan dalam perhitungan indikator kinerja pada perusahaan pengguna izin menyebabkan beberapa aspek dalam penilaian tidak dapat terpenuhi; • Beberapa data dukung pada sektor energi belum tersedia di beberapa wilayah cabang dinas.
23	Dinas Kehutanan	• Koordinasi yang cukup baik antara Dinas dengan UPTD dan CDK dalam penyediaan data dan informasi; • Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	• Terdapat beberapa komponen yang harga di DPA tidak sesuai dengan yang terdapat di katalog; • Adanya kebutuhan khususnya untuk kantor-kantor yang baru yang sebelumnya masih kontrak dan menyebabkan listrik masih memiliki daya yang rendah dan belum ada internet serta membutuhkan genset; • Kendaraan dinas Provinsi juga dipakai di kabupaten/kota sehingga Provinsi tidak memiliki kendaraan dinas yang cukup; • Kapasitas pegawai pengelola program/kegiatan sangat terbatas; • Adanya mutasi/rotasi pejabat dimana hal tersebut berimbas pada perubahan kebijakan atau adanya



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			evaluasi terhadap DPA yang sudah disusun sehingga mengakibatkan realisasi pelaksanaan penyerapa anggaran tertunda dari yang sudah direncanakan sebelumnya; • Pembelian <i>drone</i> di CDK I belum bisa dilaksanakan karena masih dalam proses pemilihan rekanan dan peyesuaian spesifikasi; • Proses pemasangan instalasi listrik kantor sekita 40 juta masih dalam proses pembayaran; • Banyak dokumen yang sudah bersifat elektronik dan hanya sebagian dokumen yang sifatnya harus dicetak/arsip fisik; • Di CDK IV terdapat spesifikasi barang pabrikan yang tidak tersedia dengan yang ada di DPA. Selain itu adanya keterbatasan jumlah bangunan yang memiliki kesesuaian untuk dijadikan gedung kantor serta adanya keterbatasan SDM; • Adanya mutasi pejabat di CDK V yang mengakibatkan keterlambatan SK dari PPK; • Deviasi terjadi di CDK V dikarenakan adanya beberapa harga barang yang terdapat di DPA berada di bawah harga barang yang terdapat pada MBiz Market; • Adanya keterlambatan pihak penyedia dalam merespon pemesanan cetakan pada CDK IX sehingga terealisasi di bulan berikutnya.
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	• Sebanyak 3 (tiga) kawasan konservasi perairan di Jawa Barat sudah ditetapkan dengan KepMenKP; • Adanya pengembangan luas kawasan pergaraman dalam beberapa tahun terakhir dapat meningkatkan luas pengelolaan laut kewenangan DKP; • Sudah dilakukan koordinasi dengan Kabupaten terkait dan ketua; • Smartfishing sebanyak 460 unit; • Memiliki potensi budidaya ikan yang tinggi; • Koordinasi dengan pihak DPMPTSP Jabar, Target pelaku usaha sudah diterbitkan DPMPTSP Jabar; • Adanya bazar produk hasil perikanan yang dilaksanakan secara rutin; • Koordinasi yang baik antar unit kerja.	• Untuk kawasan konservasi yang baru ditetapkan MenKP pada tahun 2021 dan 2022, Kajian Rencana Pengelolaannya baru selesai dilaksanakan sehingga belum optimal pengelolaannya; • Curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada lamanya proses kristalisasi garam pada meja tunnel; • Belum siapnya lahan dikarenakan masih terendam oleh air; • Memiliki potensi budidaya ikan yang tinggi sehingga perlu menjadi perhatian; • Kekurangan SDM dan dukungan anggaran belum optimal.
25	Dinas Perindustrian	• Koordinasi yang intensif antar bidang dan UPTD dalam penyediaan data dan informasi;	• Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	dan Perdagangan	• Komitmen dan kerja sama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.	program/kegiatan/subkegiatan dan penganggaran; • Komponen <i>e-budgeting</i> yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.
26	Dinas Perkebunan	• Baiknya koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari semua pihak yang terkait sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berkelanjutan dan dampaknya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat khususnya para petani perkebunan; • Partisipasi aktif para petani yang bergabung dalam suatu kelompok tani dalam setiap sub kegiatan yang dilaksanakan; • Kesadaran para petani akan pentingnya peningkatan kompetensi yang dimiliki untuk menjadi petani perkebunan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan kualitas perkebunan yang mereka miliki, baik kompetensi kelembagaan untuk berkelompok dengan petan-petani lainnya, kompetensi dalam budidaya dan pengolahan maupun kompetensi dalam berwirausaha guna meningkatkan nilai produk perkebunan yang diproduksi; • Tujuan pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat yang sangat dibutuhkan bagi para petani dalam peningkatan kompetensi petani, kelembagaan petani, dan akses permodalan bagi para petani; • Dukungan serta peran pihak-pihak yang terlibat, seperti Dinas Kabupaten/Kota, Fasilitator Daerah, Asosiasi Petani Perkebunan, dan pihak lainnya.	• Adanya keterlambatan dalam proses fasilitasi sarana berupa pupuk karena adanya keterlambatan respon dari penyedia e-catalog (BPPBP); • Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pupuk organik dan NPK telah dilaksanakan secara fisik pada bulan Maret namun pencairan anggaran masih dalam tahap melengkapi dokumen pendukung; • Target awal untuk rehabilitasi gedung parkir lebih besar dibandingkan dengan rehabilitasi atap sehingga kegiatan rebilitasi gedung parkir dialihkan sebagian untuk rehabilitasi gedung atap dengan cara mengalihkan anggarannya pada pergeseran anggaran yang menyebabkan pengunduran pelaksanaan kegiatan; • Terkait Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terdapat penundaan pelaksanaan karena adanya perubahan kebijakan dari pokja yaitu GTRA wajib membina petani yang mendapat tanah redistribusi sehingga harus ada penyesuaian anggaran kembali (Banglin); • Terkait Kegiatan Bimtek Petani Milenial terdapat adanya perubahan jadwal pelaksanaan karena peserta pelatihan mengikuti pelatihan di Dinas KUK, ditambah dengan keterbatasan waktu di bulan Februari serta terjadi perubahan lokasi dari rencana awal kegiatan yg sebelumnya di hotel menjadi di Dinas Perkebunan dan adanya keterlambatan CPCL dari Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda (SDP); • Terdapat ketidaksesuaian terkait Perhitungan jumlah pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan sehingga harus diperhitungkan Kembali (Sekretariat); • Terdapat keterlambatan dengan pemilihan penyedia sehingga pelaksanaan Kegiatan mengalami penundaan (Sekretariat); • Terdapat sisa mati dari realisasi anggaran sebagian kegiatan melalui E-catalog karena adanya negosiasi harga di dalamnya sehingga



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			sebagian kegiatan lainnya mengalami penundaan pelaksanaan karena penyesuaian anggaran di pergeseran (Sekretariat).
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	• Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; • Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; • Kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa jenis tanaman sesuai dengan jadwal tanam.	• Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/ kegiatan; • Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran; • Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; • Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal tanam.
28	Sekretariat Daerah	• Adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas diantara pemegang kegiatan di Biro, Verifikatur, dan pihak ketiga; • Aparatur pelaksana kegiatan memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, serta ketersediaan dana tepat waktu; • Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan pelaporan kinerja kegiatan tepat waktu; pemahaman SDM mengenai teknis pelaksanaan kegiatan juga cukup baik.	• Terjadinya pandemi COVID- 19 sejak awal Triwulan I Tahun 2020, berdampak pada terjadinya pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan <i>refocussing</i> anggaran; • Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 maka perlu diperlukan adanya penyesuaian target dan anggaran pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Biro Umum • Kekurangcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran, target keuangan dan fisik, RUP dan KAK; • Kasus SK PPK/PPTK terlambat diterima; • Kurangnya pemahaman mengenai teknis pembayaran non tunai menjadi hambatan. Biro Administrasi Pimpinan • Adanya peralihan platform dari penggunaan M-Biz ke e-katalog; • Membutuhkan penyesuaian output pada subkegiatan dikarenakan output dirasa tidak sesuai dengan yang tercantum pada Kepmendagri 050-5889/2021. Biro Kesejahteraan Rakyat • Dibutuhkan sebuah standar baku yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hibah bidang pendidikan; • Kurangnya pemahaman tentang kewajiban calon penerima bantuan hibah;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			• Akan dilaksanakan pengelolaan data hasil evaluasi dan hasil MOU Tri Darma Perguruan Tinggi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa • Adanya pelantikan jabatan sehingga membutuhkan waktu dalam penyesuaian pekerjaan; • Terdapat kegiatan yang bersifat persediaan untuk pengawalan terhadap pelaksanaan proses pemilihan sehingga belum direalisasikan; • Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih dalam proses sehingga belum dapat dicetak. Biro Perekonomian • Terkait pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya, adanya perubahan waktu dan tempat pelaksanaan inagurasi petani milenial; • Adanya kekurangcermatan dalam penentuan target keuangan dan target fisik sehingga akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan teknis pelaksanaan. Biro Organisasi • Perubahan skema kegiatan yang awalnya paket <i>meeting</i> dalam kota menjadi perjalanan dinas biasa; • Penjadwalan kegiatan yang bentrok dengan kegiatan lain yang lebih prioritas di lingkup kelembagaan serta adanya beberapa kegiatan fisik yang belum masuk ke dalam SPJ; • Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum bisa dibayarkan karena adanya pergeseran; • Adanya perubahan kebijakan internal dalam pelaksanaan pembinaan Reformasi Birokrasi pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dari yang semula pembinaan dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi pembinaan yang dilakukan secara daring, sehingga menyebabkan realisasi belanja menjadi tidak dapat diserap secara penuh; • Adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan melalui surat deputy RB Kunwas Kementrian PAN dan RB No B/01/RB./06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bahwa dalam surat tersebut menyatakan pemberhentian seluruh proses tahapan, yang menyebabkan seluruh rencana



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			kegiatan atau target kinerja yang telah ditetapkan menjadi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan perubahan regulasi tentang melaksanakan Reformasi Birokrasi yang baru dirilis per tanggal 16 Maret 2023 melalui Permenpan RB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap RB Nasional; • Efisiensi dalam penyelenggaraan rapat secara luring di ruang rapat tidak optimal dikarenakan ketersediaan tempat akibat renovasi gedung Sekretariat Daerah; • Terjadi penyusunan ulang terhadap prioritas hasil sub kegiatan dengan berfokus pada pendataan layanan publik untuk memenuhi target Gubernur, publikasi segera atas layanan publik pemerintahan provinsi Jawa Barat di Portal Jabar. Kegiatan pengumpulan ini dilakukan via desk fisik maupun virtual yang belum membutuhkan penyerapan biaya. Kendala yang ditemui daftar layanan tidak segera tersedia di Perangkat Daerah secara satu pintu mengingat pelayanan banyak yang dilakukan di level di bidang ataupun UPT. Penyerapan juga belum bisa dilakukan mengingat penundaan terhadap rekrutmen tim digital yang akan mendukung proses di biro organisasi mengingat kejelasan kebijakan penganggaran tenaga ahli analisis sistem dan <i>programmer</i>.
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	• Koordinasi yang baik antar bagian dalam penyediaan data dan informasi; • Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.	• Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran dan komponen e-budgeting yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.
30	Badan Kepegawaian Daerah	• Dilakukan Monitoring dan evaluasi dengan bidang secara berkala dalam penentuan target dan faktor penghambat serta mencari solusi dari permasalahan; • Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala melalui Rapat Pimpinan untuk melihat progres sejauh mana kinerja yang ada di bidang; • Sarana dan Prasana menjadi modal kelancaran dalam bekerja.	• Kegiatan yang masih menunggu jadwal dari instansi penyelenggara kegiatan; • Penentuan Perencanaan Kegiatan yang tidak cermat; • Masih adanya kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat).
31	Badan Pendapatan Daerah	• Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja Bapenda untuk optimal melaksanakan program/kegiatan sesuai yang	• Anggaran Kas antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sub kegiatan/aktivitas berbeda;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		direncanakan yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Gubernur Jawa Barat; - Adanya momen pergeseran Anggaran 2023; - PPK di tiap unit kerja Bapenda sudah mematuhi ketentuan Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah khususnya terkait pengadaan barang/jasa sd 200 juta telah menggunakan e-purchasing daring; - Koordinasi yang baik antara Bapenda Pusat dengan P3DW se-Jawa Barat dalam penyediaan data dan informasi; - Sudah ditetapkan SP Ketua Tim di tiap unit kerja dari kelompok jabatan fungsional hasil penyetaraan; - Semakin meningkatnya peran sistem pengendalian internal di setiap unit pelaksanaan kegiatan serta arahan perbaikan kebijakan dari kantor Pusat Bapenda.	- Masa Transisi (perubahan SOTK, Penyederhanaan Birokrasi perpindahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, mutasi, dan promosi lingkup Bapenda); dan - Masih terdapat beberapa komponen belanja pemeliharaan belum terakomodir dalam Standar Biaya; - Pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa masih belum optimal; - Terbatasnya pelaksana SDM untuk membantu administrasi keuangan karena menjalankan tugas membantu pelayanan.
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; - Berkolaborasi dengan berbagai Lembaga Kelitbangan di Perguruan Tinggi dan di Kementerian, sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerjasama yang di lakukan; - Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Mebutuhkan tambahan personil Fungsional Peneliti dengan berbagai macam kepakaran supaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kelitbangan sesuai dengan permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan di Jawa Barat; - Belum mempunyai personil Fungsional Analis Kebijakan untuk menindaklanjuti hasil kelitbangan jadi Naskah Policy Brief, Naskah Akademik, dan lain-lain untuk bahan kebijakan pimpinan.
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Sarana dan Prasarana kerja memadai; - Ketersediaan dana tepat waktu.	- Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan; - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas kegiatan; - Kegiatan bersifat penyediaan.
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat Subbidang/Subbagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan di tingkat	- Rincian komponen di sistem yang belum sesuai sehingga harus ditetapkan komponen yang baru dan menunggu pergeseran anggaran; - Terbatasnya kuota internet yang dimiliki dengan jumlah pengguna yang banyak, sehingga jaringan



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan dapat mengendalikan mengevaluasi, dan menyetujui secara sistem; Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda – BPKAD – Biro Organisasi pada proses <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i> dan penetapan komponen belanja yang menjadi regulasi berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).	menjadi lamban dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di lingkup BPSDM; - Dalam pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada Narasumber dari luar karena keterbatasan praktisi di lingkup BPSDM; - Penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat keterlambatan pembayaran karena menunggu pengajuan dari pihak ketiga sehingga belum bisa dibayarkan; - Kegiatan bersifat fasilitasi sehingga kegiatan bergantung kepada mitra dan banyak komponen asessor dari lingkungan pemerintah daerah Jawa Barat, sehingga tidak perlu dibayarkan honorarium; - Anggaran bersifat penyediaan, dan adanya rasionalisasi pada belanja bahan bakar; - Perubahan Penjadwalan Diklat yang ditentukan oleh Kementerian; - Adanya penyesuaian komponen barang pada DPA pergeseran; - Realisasi kegiatan tergantung agenda acara dan undangan perangkat daerah terkait.
35	Badan Penghubung	- Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan; - Pemanfaatan Tim Kerja untuk membantu percepatan pelaksanaan kegiatan.	- Lokasi jarak antar 2 kantor (Badan Penghubung dan Anjungan di TMII) membutuhkan koordinasi dan manajemen pengelolaan kegiatan yang baik sehingga tetap adanya distribusi hasil penyediaan/pengadaan belanja barang/jasa sesuai kebutuhan di tiap unit; - Proses penyesuaian pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dan informasi di Anjungan terkait kebijakan baru teknis dan manajemen TMII.
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan; - Penjadwalan ulang kegiatan yang sempat terhambat; - Melaksanakan peningkatan kapasitas/in house training bagi seluruh aparatur di Bappeda Provinsi Jawa Barat agar dengan jumlah pegawai yang masih kurang tetap dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan; - Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektivitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan; - Waktu pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal dengan	- Adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal; - Adanya pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan dari triwulan II menjadi triwulan III dan triwulan IV; - Adanya penyesuaian anggaran pada SPB Tahun 2023 khususnya pada kode rekening perjalanan dinas serta pelaksanaan kegiatan/acara yang dilakukan di hotel; - Adanya penundaan penyusunan Background Study RPJPD karena mendahulukan penyelesaian dokumen RPD dan RKPD;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		didukung melalui SP pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang memadai; • Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota; • Penyamaan persepsi melalui bimbingan teknis pengisian form laporan.	• Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi lebih banyak dilaksanakan secara virtual/ menggunakan fasilitas kantor dan perangkat dinas lain/ dilaksanakan di dalam kota, sehingga anggaran makan/minum rapat, paket meeting dan perjalanan dinas belum terserap secara optimal; • Adanya pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan personil yang sama; • Adanya keterlambatan dalam penyelesaian administrasi pembayaran honorarium dan paket meeting yang disebabkan oleh perbedaan koding (meeting dalam kota dan luar kota).
37	Inspektorat	• Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan; • Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan-an fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan; • Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal; • Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi.	• Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relative singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya; • Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Auditan ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan itu sendiri.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; • Sinergitas antar pemangku kebijakan (stakeholder) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; • Komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.	• Terdapat perbedaan satuan antara indikator program dan indikator kegiatan (persen dan jumlah); • Terdapat beberapa indikator kegiatan yang harus diperbaiki/direvisi karena tidak dapat dihitung sebagai output.

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II 2023, diolah

4.2 Rekomendasi Bagi Pelaksanaan Evaluasi RKPD Provinsi

Untuk merespon faktor penghambat dan pendukung pencapaian target kinerja kegiatan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, maka dirumuskan dan diberikan usulan sebagai tindak lanjut yaitu berupa hal-hal dapat direkomendasikan untuk membantu meningkatkan atau mencapai kinerja kegiatan pada triwulan berikutnya. Saran rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan kedepannya ataupun dalam melakukan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Adapun saran rekomendasi yang disajikan telah disesuaikan dengan kendala yang dialami oleh Perangkat Daerah masing-masing. Rekomendasi yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD pada Triwulan II Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
1	Dinas Pendidikan	- Kesepakatan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, seperti pihak internal organisasi, <i>stakeholder</i>, dan masyarakat; - Komunikasi yang efektif dan terbuka antara semua pihak yang terlibat, termasuk pihak manajemen dan karyawan; - Pelaporan pengelolaan keuangan oleh sekolah-sekolah kepada KCD seperti pengelolaan dana BOPD dan BPMU sudah dilaporkan dengan cukup baik serta terfasilitasi melalui Rekonsiliasi yang rutin dilaksanakan; - Pemantauan dan evaluasi cukup rutin dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta kemampuan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.	- Sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil; - Ketidakkonsistenan indikator kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; - Adanya pemantauan atau evaluasi yang cukup terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, namun tidak disediakannya anggaran khusus untuk pengawasan di setiap bidang; - Adanya kendala penyusunan Juknis misalnya untuk penambahan ruang kelas baru (belum ada standar berapa biaya untuk pembangunan 1 (satu) ruang ataupun Juknis untuk kegiatan lomba yang menunggu dari Pusat; - Adanya keterlambatan proses lelang; - Kebutuhan Tim Ahli dan Sewa Hosting (Server IWS) untuk penyelenggaraan proses belajar dan ujian membutuhkan biaya yang besar. Kalau menggunakan server fisik akan terkendala di biaya pemeliharaan.; - Adanya kendala proses seleksi ujian bagi peserta didik dimana masih ada yang tidak jujur, dan ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan; - Proses pencairan keuangan atau SI membutuhkan waktu yang lumayan cukup panjang.	- Berkoordinasi dengan BPSDM untuk membuat usulan tertulis untuk diadakannya pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM; - Tingkatkan kualitas perencanaan dengan fokus pada sumber daya dan pencapaian target optimal; - Lakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan dengan berbagai level dan mitra sektor pendidikan untuk meningkatkan konsistensi indikator kinerja; - Dapat menggunakan metode dan alat ukur pengawasan yang lebih efisien serta tingkatkan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak pemangku sektor pendidikan, terkait pentingnya pengendalian dan evaluasi sehingga anggaran dapat disesuaikan; - Secara intensif berkoordinasi dengan Pusat mengenai pedoman ataupun juknis dan sesuaikan kembali rencana kegiatan; - Berkoordinasi dengan Biro PBJ dalam hal keterlambatan proses lelang; - Optimalkan proses pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat serta membuat telaahan terkait kebutuhan anggaran untuk server IWS. Selain itu, lakukan tindakan-tindakan preventif, kuratif dan promotif terkait teknis pelaksanaan ujian; - Berkoordinasi dengan instansi pengelola keuangan daerah untuk mengoptimalkan proses pencairan, sesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan mengantisipasi lama waktu pencairan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
2	Dinas Kesehatan	- Dinas Kesehatan memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup besar yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD; - Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan belanja Kesehatan sebesar 10 persen dari belanja APBD Provinsi Jawa Barat; - Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Kesehatan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas; - Alat pendukung seperti alat pengolah data, internet dsb dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat. - Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk memprioritaskan anggaran bagi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan. - Potensi besar pembiayaan CSR dalam mendukung pembangunan kesehatan	- Beberapa kegiatan masih menunggu Pengadaan barang mengalami beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya baik dari sisi waktu, sumber daya, dan kelengkapan lainnya; - Ada beberapa kegiatan yang pencapaian realisasinya sangat ditentukan oleh pihak eksternal sehingga menyebabkan target tidak dapat tercapai sesuai waktu yang diharapkan; - Masih ada beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah dibuat sehingga menyebabkan keterlambatan.	- Perlu adanya sumber daya manusia yang membidangi perencanaan sehingga dalam mengevaluasi Rencana Kerja dapat dilaksanakan tepat dan benar sesuai pencapaian yang ditetapkan; - Pendelegasian urusan dan tugas yang tepat dari pimpinan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga tidak menghambat dalam mengevaluasi hasil renja Dinkes; - Dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan penetapan kinerja serta Anggaran Kas Belanja yang telah dibuat sehingga penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu; - Adanya kejelasan dalam penetapan target kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan.
3	Dinas Sosial	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Penyelesaian kegiatan tepat waktu; - Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.	Penyusunan rencana anggaran kas yang kurang tepat dalam proses pengajuan dan pencairan anggaran serta beberapa kegiatan gagal lelang.	- Cermat dalam melakukan penyusunan Rencana Anggaran Kas dan harus sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana.
4	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	- Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, Biro Barang dan Jasa dalam proses pengadaan; - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; - Adanya Kegiatan Pelatihan dan Diklat dan Bimbingan Teknik Peningkatan Sumber Daya Aparatur.	- Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP; - Diperlukan perbaikan mutu untuk hasil yang lebih optimal dan program belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena keterbatasan anggaran; - Adanya beberapa paket yang waktu pelaksanaannya tidak mencukupi sehingga sisa pekerjaan diluncurkan tahun anggaran 2022 yaitu paket tahun jamak;	- Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dan Biro PBJ secara intensif dan di samping hal tersebut perlu mempersiapkan kelengkapan untuk proses lelang; - Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menyesuaikan dan memprioritaskan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan; - Perlunya melakukan evaluasi secara intensif dengan berbagai pihak agar beberapa paket pekerjaan dapat dipercepat dengan tetap



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			• Permasalahan cuaca sering menghambat proses pelaksanaan khususnya di kawasan Jabar Selatan; • Pengadaan biasanya terbentur dari pembayaran yang telat, lintas bulan; • Peralatan banyak yang rusak yang mempengaruhi kinerja; • Adanya permasalahan pembebasan lahan dan kendala pelelangan ulang; • Pihak Penyedia tidak mengajukan permintaan uang muka/termin pembayaran; • Pihak Penyedia tidak mampu memenuhi spesifikasi hasil kerja yang disepakati dalam kontrak; • Terdapat pembangunan jembatan yang menggunakan dana DAU, namun anggaran dari Kemenkeu sampai saat ini belum turun sehingga sampai saat ini belum menyerahkan uang muka ke pihak penyedia; • AMP dipakai bergiliran dan kadang membuat keterlambatan; • Peralatan sudah lama dan volume kurang seperti <i>dump truck</i> yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan rutin, namun karena sudah lama sehingga tidak dapat digunakan secara intensif.	menjaga kualitas pekerjaan; • Mendahulukan pekerjaan yang sekiranya proses penyelesaiannya sangat tergantung pada cuaca dan memilih bahan yang lebih awet dan tahan terhadap cuaca; • Tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain BPKAD, Biro PBJ (Pokja), pihak ketiga, baik di dalam penyelesaian pekerjaan ataupun dengan masalah administrasi keuangan; • Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD untuk melakukan percepatan turunnya anggaran DAU; • Memprioritaskan proses perbaikan peralatan yang sangat dibutuhkan disesuaikan dengan kondisi anggaran dan mengajukan keperluan untuk pengadaan peralatan.
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	• Kegiatan sesuai dengan napa yang direncanakan; • Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; • Cermatnya aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran (target keuangan fisik, RUP dan RAK); • Cermatnya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola.	• Terdapat beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan tetapi masih dalam proses penagihan; • Beberapa pekerjaan tidak jadi dilaksanakan dan akan dikembalikan di perubahan anggaran; • Beberapa paket yang gagal lelang sehingga dilaksanakan lelang ulang: a. Penyusunan Kajian Lingkungan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Bekarpur; b. Pembangunan Pasar Harapan Jaya;	• Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; • Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; • Memperkuat koordinasi antar Bidang; • Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dan Biro PBJ, khususnya Pokja untuk mempercepat proses pelaksanaan pelelangan; • Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain secara intensif agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai waktunya, dan tetap



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			c. Penataan Alun-Alun Gadobangkong Kabupaten Sukabumi. • Terdapat beberapa pekerjaan yang memerlukan penjadwalan ulang akibat adanya addendum tambah pekerjaan; • Pengiriman material untuk pekerjaan fisik terhambat karena kendala cuaca.	melakukan evaluasi serta mempercepat proses pekerjaan yang bisa diselesaikan.
6	Dinas Sumber Daya Air	• Beberapa Sub Kegiatan sesuai dengan rencana dan mempunyai kinerja yang baik	• Berdasarkan evaluasi hasil Renja perangkat daerah Tahun 2023 Triwulan II yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya belum ada hambatan dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih dalam persiapan pekerjaan di Triwulan II Tahun Anggaran 2023.	• Selanjutnya untuk pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kontraktual dan Konstruksi agar dipersiapkan lebih matang mengenai HPS kegiatan.
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan.	• Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di BPBD Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja; • Adanya pelaksanaan kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama sementara sebagaimana pada poin a terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparatur.	• Berkoordinasi dengan BKD terkait kebutuhan SDM di BPBD serta terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan BPBD dapat tercapai secara optimal; • Memperhatikan beban kerja setiap pegawai; • Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, khususnya diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; • Melakukan pemilahan secara cermat terhadap undangan yang sangat penting untuk dihadiri atau tidak.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
8	Satuan Polisi dan Pamong Praja	- Adanya <i>Political Will</i> dari pimpinan daerah terhadap pengejawantahan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja daerah, dengan ditetapkan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban dalam RPJMD 2018 – 2023; - Koordinasi dan kolaborasi yang tercipta antara unit kerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja Perencanaan Program dan Kegiatan yang keanggotannya terdiri dari unit kerja sehingga proses perumusan dan penetapan program dan kegiatan termasuk di dalamnya penetapan kinerja dapat dilaksanakan secara sinergi pada unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; - Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda, BPKAD dan Biro Organisasi untuk memperlancar proses <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i> serta penyusunan komponen - komponen yang harus ditetapkan dengan regulasi berupa SBU dan SBK.	- Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP, komitmen Narasumber menjadi permasalahan karena adanya Narasumber yang tidak hadir/memenuhi undangan; - Alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,- belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam upaya mencapai Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) tahun 2022 yang menjadi Indikator Kinerja Daerah sebesar 74 poin (Kategori NYAMAN); - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana sebagai penunjang pokok keberhasilan capaian kinerja sangat tidak memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas; - Aplikasi SIPD Kemendagri versi terakhir mengharuskan kegiatan dirinci dalam satuan komponen dan tidak berlaku satuan paket, hal ini memunculkan hambatan; - Struktur sumber daya aparatur Satpol PP sebagian besar berlatarbelakang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan lulusan Sarjana dengan jumlah terbatas.	- Bagi narasumber ataupun <i>stakeholder</i> lainnya yang tidak bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang disepakati ataupun diberikan <i>blacklist</i> dalam waktu tertentu; - Membuat telaahan terkait kebutuhan anggaran khususnya dalam menunjang pencapaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban; - Begitu juga untuk sarana dan prasarana yang digunakan, sebaiknya diinventarisir terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan dan seperti apa perbaikan/peningkatan yang perlu dilakukan sehingga pengadaan lebih tepat sasaran; - Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait rincian satuan kegiatan sehingga dapat ditindaklanjuti seperti apa penyesuaian terhadap satuan yang sifatnya paket; - Tingkatkan koordinasi dengan BKD dan BPSDM terkait kebutuhan SDM dan peningkatan kualitas ASN lingkup Satpol PP.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	- Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK); - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Pihak Penyedia terlambat mengajukan penagihan pembayaran.	- Melakukan pengawasan secara internal sehingga kekurangcermatan di dalam penyusunan RUP dan RAK dapat diantisipasi sejak awal; - Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan pada Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Melakukan pengecekan secara berkala terkait laporan keuangan sehingga dapat



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
				meminimalisir keterlambatan dalam pencairan atau pembayaran.
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan dari program/kegiatan/subkegiatan ; - Melaksanakan Konsolidasi antara pengelola administrasi keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Bendahara Pengeluaran yang diawasi oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrasi	- Penyerapan anggaran semester I lingkup DKPP sebesar 36,58% terhadap target sebesar 45,14%, sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 8,56%. Proses pengerjaan berakhir di akhir bulan Juni sehingga proses administrasi pertanggungjawaban belum terekap di Triwulan II; - Perlu diceknya jumlah pelimpahan disetiap bulannya agar sesuai dengan target anggaran kas; - Dalam proses pertanggungjawaban masih banyak terjadi human error sehingga memperlambat proses realisasi kegiatan; - Konsolidasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan masing-masing kepala TU di Unit Kerja tentang ketatausahaan. Jangan sampai terlewat urusan-urusan kepegawaian, umum, keuangan dan penganggaran. Harap punya komunikasi tersendiri dan agenda terkait ke TU-an; - Terdapat kasus anthrax di Yogyakarta agar dapat ditindaklanjuti kesiagaan di Jawa Barat agar tidak terjadi juga.	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dapat tercapai secara optimal; - Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan anggaran; - Mempercepat pelaksanaan kegiatan salah satunya dengan melakukan pergeseran anggaran kas yang tidak terealisasi di semester I digeser ke anggaran kas semester II; - Melakukan optimalisasi koordinasi dan menyusun jadwal kegiatan; - Membentuk team of team (TOT) untuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing bagian; - Pemberlakuan SOP dalam pelaksanaan kegiatan disusun secara lengkap dan jelas; - Tingkat pemahaman pimpinan terhadap keamanan informasi (<i>security awareness</i>) sangat baik; - Pelaksanaan pekerjaan sudah sejalan dengan program SPBE dari KemenPAN-RB.	- Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK); - Perjalanan Dinas rendah karena bentuknya penyediaan (undangan) dan banyaknya undangan yang dilaksanakan dengan <i>zoom meeting</i>; - P3K dianggarkan 17 (tujuh belas) orang, yang lulus cuma 10 (sepuluh) orang, namun belum ada kabar kapan mulai bekerja karena menunggu kebijakan Pusat;	- Melakukan pengawasan secara internal sehingga kekurangcermatan di dalam penyusunan RUP dan RAK dapat diantisipasi sejak awal; - Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Berkoordinasi dengan BKD terkait kebutuhan aparatur dan berkoordinasi dengan BPSDM terkait peningkatan kompetensi pegawai dalam hal penyusunan program/kegiatan dan penganggaran;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			- Ada prioritas terkait pengadaan mebel yang berubah akibat intervensi Pimpinan sehingga tidak terserap; - Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan; - Keterkaitan dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terkadang mengalami keterlambatan; - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Terkait penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggaran dirasa kurang karena lisensi saja membutuhkan 200 juta. Anggaran paling besar untuk komunikasi publik dan pengelolaan <i>e-government</i> dan kehumasan sehingga anggaran ini dirasa kecil untuk mengakomodir semuanya.	- Mencermati kembali Rencana Anggaran Kas (RAK) yang disusun dan melakukan pergeseran anggaran jika diperlukan; - Berkoordinasi dengan Pusat dan BKD terkait kebijakan mulai kerja untuk P3K; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Menyusun telaahan terkait kebutuhan anggaran penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyampaikan kepada instansi terkait agar kebutuhan anggaran dapat disesuaikan.
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	- Adanya dukungan dari pimpinan terkait kelancaran program dan kegiatan dinas; - Jumlah personel yang cukup dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; - Respon para peserta yang positif dalam pelaksanaan kegiatan.	- Kegiatan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi dirasa belum optimal; - Tingkat pemahaman peserta belum merata dan proses identifikasi peserta dalam mengikuti kegiatan, lingkungannya masih terlalu besar; Permasalahan UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan Kewirausahaan: - Terkait realisasi e-katalog, dirasa pihak ketiga kurang responsif (<i>lift</i>) dan begitu juga untuk M-Biz (pengadaan barang yang bentuknya tidak lelang) dimana pihak ketiga telat respon dan permasalahan pada server yang lama <i>loading</i>; - Terdapat kesalahan penganggaran dan belum mendapatkan pihak ketiga; - Adanya permasalahan Juknis dimana ternyata terkait inkubasi harus dibentuk dari Provinsi.	- Tingkatkan sinkronisasi kinerja dan koordinasi antara pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi; - Perlu dilakukan matrikulasi terlebih dahulu untuk menyamaratakan pemahaman peserta; - Lakukan telaahan terkait kebutuhan peserta yang mengikuti kegiatan; - Targetkan kegiatan terlebih dahulu pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM; - Tetap berkoordinasi secara intens dengan berbagai pihak antara lain BPKAD, Biro PBJ, dan pihak ketiga, baik di dalam penyelesaian pekerjaan ataupun dengan masalah administrasi keuangan; - Juknis terkait inkubasi segera disiapkan untuk mencegah keterlambatan pekerjaan kedepannya dan saling berkoordinasi antar pihak yang berperan dalam penyusunan Juknis mengenai inkubasi.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
13	Dinas Lingkungan Hidup	• Pelaksana kegiatan memahami tugas dan fungsinya serta adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait; • Sarana dan prasarana kerja yang memadai; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; • Program/kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun	• Faktor administrasi (persuratan lintas dinas, status kepemilikan aset, dll.) mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai rencana; • Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan; • Terdapat kegiatan yang bergantung terhadap kegiatan lain atau lembaga lain; • Kegiatan yang sudah direncanakan mengalami keterlambatan karena penanganan riviur LKPJ 2023; • Adanya rotasi struktural mengakibatkan keterlambatan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.	• Melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan rekonsiliasi data aset dengan BPKAD serta dengan dinas terkait sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan baik; • Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk menambah personil di dalam penyusunan program dan kegiatan, serta dapat mengirimkan personil untuk mengikuti diklat terkait perencanaan; • Melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas atau lembaga lain sehingga ada kesepakatan untuk penyelesaian pekerjaan; • Melakukan pembagian tugas yang jelas pada personil sehingga tidak tertumpu pada satu kegiatan atau aktifitas saja; • Membuat perencanaan yang lebih matang, disesuaikan dengan waktu dan kondisi, khususnya dinamika pergantian pejabat dan melaksanakan manajemen kinerja yang baik dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang telah dijadwalkan sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Adanya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pihak-pihak swasta dalam memudahkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan; • Melakukan kegiatan koordinasi monitoring evaluasi yang berkelanjutan secara intensif dengan desa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pemecahan permasalahan desa; • Adanya Program Sabisa dimana pembinaan Bumdes secara langsung untuk penguatan kapasitas bisnis Bumdes secara terpadu mulai dari pelatihan/ workshop, pemagangan/ sekolah lapangan sampai dengan kemitraan/kerjasama bisnis sehingga dapat mampu mengembangkan potensi desa dan meningkatkan	• Masih adanya desa-desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai. • Masih rendahnya aparatur desa dalam hal pengembangan potensi-potensi yang ada didesa, dimana aparatur desa selalu melihat desa wisata padahal potensi utama desa bukan desa wisata. • Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa. • Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didesa Provinsi Jawa Barat yang belum terbentuk dan yang sudah terbentuk cenderung naik turun dalam pengelolaannya	• Mendayagunakan berbagai komponen masyarakat guna mendukung program dan kegiatan pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan komitmen dari seluruh aparat pemerintah, dan kesediaan masyarakat melaksanakan program yang diwujudkan dalam bentuk swadaya masyarakat; • Swadaya masyarakat dimaksud dihimpun sejak awal pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk uang maupun material sehingga dengan terkumpulnya bahan dan uang dari swadaya masyarakat, merupakan jaminan bahwa program/kegiatan dimaksud merupakan kegiatan yang dibutuhkan; • Perlunya menginventarisir terlebih dahulu aksesibilitas yang ada dengan menilai tingkat



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		pengelolaan Bumdes untuk dapat mampu mandiri secara ekonomi; - Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPMDesa; - Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa; - Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kememterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); - Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain: digitaslisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem berbasis IT.	sehingga kegiatan usaha nya menyebabkan menurunnya pendapatan bumdes/pendapatan asli desa. - Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang kuantitas Sumber Daya Alam terbatas di desa perbatasan. - Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa. - Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa. - Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.	prioritas dan urgensinya, kemudian dapat membuat telaahan terkait kebutuhan pembinaan dan aksesibilitas yang memadai; - Pengembangan kapasitas bagi aparatur desa dalam teknis pemerintahan dan pelayanan prima perlu dilaksanakan baik melalui sejumlah pembinaan atau pelatihan; - Begitu juga pengembangan kapasitas aparatur desa melalui diklat atau pelatihan tentang pengelolaan desa khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam; - Membuat telaahan terkait kebutuhan akses atau sarana penghubung serta jaringan telekomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam pemenuhan infrastruktur desa; - Perlunya penerapan kolaborasi Pentahelix dalam membangun Desa;
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	- Dukungan dari perangkat daerah yang saling berkaitan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara bidang pada DP3AKB dalam penyediaan data dan informasi; - Komitmen SDM yang sangat tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan.	- Mengingat pelaksanaan beberapa kegiatan masih dalam tahap awal, hambatan yang ditemui terutama pada saat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memulai kegiatan, mengingat beberapa di antaranya masih belum memahami teknis, <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari kegiatan yang akan dilaksanakan; - Adanya pergantian pejabat sehingga beberapa pembayaran sempat tertunda;	- Tingkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terlebih dahulu dengan rutin melakukan koordinasi intens terkait teknis, <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari kegiatan yang akan dilaksanakan; - Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik sehingga dapat menghadapi dinamika pergantian pemimpin/pejabat dengan tidak mengganggu pekerjaan;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			• Uang persediaan tidak cukup untuk membayar konselor; • Banyak kegiatan yang bentrok sehingga perlu perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan; • Kode rekening yang berbeda dan tidak bisa lintas misalnya untuk uang anak dan uang perempuan; • SDM terbatas dengan banyak korban harus harus ditangani, misalnya Jafung untuk melayani korban cuman ada 2 (dua) di UPTD, namun kasus terus meningkat.	• Mencermati kembali Rencana Anggaran Kas yang sudah disusun agar kebutuhan pembayaran dapat tercukupi; • Lakukan perencanaan dengan tepat dan tingkatkan koordinasi antar pelaksana kegiatan sehingga jadwal pelaksanaan dapat saling menyesuaikan; • Permasalahan kode rekening dapat dikoordinasikan dengan BPKAD dan Bappeda khususnya dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan; • Berkoordinasi dengan kepegawaian DP3AKB dan juga dengan BKD terkait kebutuhan SDM di UPTD, khususnya dalam menghadapi banyaknya kasus yang terjadi.
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	• Adanya komitmen yang besar dari Pimpinan Dispora Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan sehingga target yang direncanakan dapat tercapai bahkan ada yang melebihi target; • Adanya kegiatan kolaborasi kegiatan pemasaran olahraga dengan kabupaten/kota yang menyebabkan realisasi kinerja melebihi dari target yang direncanakan.	• Ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan tidak tepatnya penyusunan anggaran kas pada saat penyusunan rencana anggaran; • Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran; • Dana Hibah untuk organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan belum diberikan dikarenakan masih banyaknya ketidaksesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan sehingga pemberian dana hibah ditunda sampai organisasi dapat menyesuaikan RAB-nya tersebut. • Adanya perubahan jadwal kerjasama dengan prefektur Shizouka Jepang terkait perubahan jadwal pencairan hibah; • Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian;	• Penyusunan Rencana Anggaran Kas dapat lebih dicermati baik oleh pimpinan maupun staf bagian perencana dan pelaksana teknis sehingga rencana kegiatan beserta penganggarnya berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran; • Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; • Tingkatkan koordinasi yang intens dengan organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan dalam hal kesesuaian RAB pencairan; • Begitu juga koordinasi dengan pemberi hibah juga ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan yang berkepanjangan; • Mengontrol dan mengawasi setiap proses pelaksanaan khususnya belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial; • Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; • Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			• Ada alokasi belanja paket <i>meeting</i> luar kota untuk akomodasi pelatihan sekolah parlemen pemuda yang mekanisme pencairannya diubah menjadi LS sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam hal mekanisme pengadaan; • Belanja paket perjalanan dinas biasa yang belum diselenggarakan karena padatnya jadwal kegiatan; • Adanya pergeseran anggaran di bulan Februari yang membuat adanya pergeseran pada alokasi dan jadwal belanja; • Ketidaksesuaian kode rekening harus disesuaikan, pelaksanaan dilaksanakan akhir bulan sehingga laporan keuangan dilaporkan bulan berikutnya; • Pelaksanaan rapat RAD yang semula dilaksanakan 2 (dua) kali semuanya bulan Maret, baru dilaksanakan 1 (satu) kali karena Pergub dan Kepgub belum ditandatangani sampai bulan Maret 2023; • Terdapat pembayaran makanan dan minuman para atlet PPLP belum terbayarkan bulan Maret; • Kegiatan piala dunia FIFA U-20 di Jabar tidak jadi dilaksanakan; • Pengarahan SP3OR melalui pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tahun 2023 belum terlaksana. Pencairan dana hibah belum terselesaikan, belanja iuran jaminan/asuransi serta belanja tenaga ahli SP3OR belum dibayarkan; • Pemberian penghargaan olahraga multievent internasional Sea Games ke-31 Vietnam dan Asean Para Games ke-11 di Surakarta tahun 2022 belum terdistribusi; • Proses dana hibah belum terselesaikan. Hibah pada Koni Jabar belum cair karena belum dilaksanakannya NPHD;	atau risiko terhadap dinamika yang terjadi misalnya pembatalan atau tertundanya kegiatan, perubahan jadwal atau teknis pelaksanaan, dan lain sebagainya; • Permasalahan kode rekening dapat dikoordinasikan dengan BPKAD dan Bappeda khususnya dalam pemenuhan pelaporan; • Segera mempercepat proses pembayaran atau penyelesaian kegiatan dengan melakukan koordinasi intens dengan pihak terkait, seperti pembayaran makanan dan minuman para atlet PPLP yang belum terbayarkan, pemberian penghargaan olahraga multievent internasional Sea Games ke-31 Vietnam dan Asean Para Games ke-11 di Surakarta tahun 2022 belum terdistribusi, serta kegiatan lainnya yang masih belum terselesaikan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			Perjadin tidak terserap seluruhnya, mamin rapat persiapan FPD dan pelaksanaan Rakortek di dinas tidak dilaksanakan.	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Sumber daya yang memadai meliputi dukungan sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia; - Koordinasi yang baik antar bidang dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; - Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan; - Ide/gagasan untuk pengembangan Sistem Informasi; - Peraturan Kementerian Investasi untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di Bidang Penanaman Modal.	- Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran. - Komponen <i>e-budgeting</i> yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel; - Kelengkapan persyaratan dokumen SPK terkendala; - Masih banyak stok barang di Gudang; - UP/GU tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan; - Ada kebutuhan barang yang harus disesuaikan dengan RKBMD pengadaan; - Adanya <i>reschedule</i> kegiatan dikarenakan terdapat hambatan teknis di lapangan; - Adanya perubahan rencana kegiatan <i>investment award</i> yang menyebabkan anggaran untuk tenaga ahli belum terealisasi karena akan dialihkan untuk video promosi; - Adanya perubahan sistem yang berdampak kepada peraturan pencairan anggaran.	- Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk menambah personil di dalam penyusunan program dan kegiatan, serta dapat mengirimkan personil untuk mengikuti diklat terkait perencanaan dan penganggaran; - Tingkatkan koordinasi dengan Tim TAPD untuk kelancaran penganggaran serta mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana. penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset; - Melakukan kontrol dan koordinasi rutin dalam hal percepatan persyaratan dokumen SPK; - Menyusun mekanisme pengadaan dengan tepat untuk menghindari kelebihan stok barang yang mubajir (tidak digunakan) dan dapat menyusun RKBMD dengan tepat dengan penyesuaian kebutuhan; - Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi atau risiko terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, misalnya perubahan rencana kegiatan <i>investment award</i>, perubahan sistem, dan lain sebagainya.
18	Dinas Perhubungan	- Dibentuknya Tim Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi; - Komunikasi dan kerjasama melalui Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan di Jawa Barat sudah baik namun perlu ditingkatkan agar terjalin kolaborasi dan sinergitas yang lebih baik dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.	- Adanya perubahan jenis kontrak menjadi swakelola dan perubahan rencana kerja; - Kompetensi pada setiap unit kerja yang belum merata; - Dalam hal pengambilan data terdapat perbedaan cara pengumpulan data fasilitas perlengkapan jalan pada setiap wilayah kerja UPTD Dinas Perhubungan; - Terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu; - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; - Mengusulkan kepada bagian kepegawaian untuk menyelenggarakan atau mengirimkan personil pada Bimtek atau pelatihan sehingga semua personil setiap unit mempunyai



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan di Ruas Jalan Provinsi; • Terdapat kebutuhan yang cukup tinggi terkait fasilitas keselamatan dan pelayanan Pelabuhan dan ASDP; • Ada kunjungan ke Dinas Perhubungan Sumut terkait pelabuhan regional dan saat ini Jabar belum punya pelabuhan regional, namun jumlah SDM dibatasi pada saat melaksanakan kunjungan; • Transportasi massal berbasis rel, selain mempunyai biaya investasi yang tinggi, kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi harus menyelaraskan program dan kegiatan terkait perkeretaapian; • Banyak aduan yang dilaporkan, namun tidak dapat terakomodir karena SDM kurang; • Ada penyesuaian target karena pengadaan terlalu awal dan bersamaan dengan pengawasan sehingga SDM harus berbagi; • Banyak gedung mess dan gedung <i>workshop</i> yang bocor (sudah tidak layak); • Untuk UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru: terminal sudah tidak layak dan gedung tower ATC harus diperbaiki. Peralatan perawatan bandara sangat kurang, contoh dengan lahan 63 ha dan untuk membabat rumput, UPTD hanya memiliki 1 (satu) mesin babat yang sudah lama dan 3 (tiga) mesin gendong. Selain itu, bangunan terminal belum ada perbaikan. Alat X-Ray di Bagasi dan Kabin sudah rusak sehingga koper harus selalu dibuka dan diperiksa manual. Ada 6 (enam) mess sudah tidak layak huni dan banyak bocor. Untuk drainase sudah tidak mencukupi. Perkerasan apron sudah banyak yang lepas. Damkar juga sudah lebih dari 17 tahun.	kompetensi yang merata; • Melakukan pengkajian yang komprehensif tentang kebutuhan dan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan di Ruas Jalan Provinsi, sehingga hasilnya dapat dijadikan <i>reasoning</i> yang jelas ketika mengusulkan penambahan anggaran; • Melakukan pengkajian yang komprehensif didukung oleh data yang akurat dan valid terhadap fasilitas keselamatan dan pelayanan pelabuhan dan ASDP; • Meningkatkan konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan terkait perkeretaapian; • Memprioritaskan aduan yang didukung oleh data yang valid sehingga dapat ditindaklanjuti dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada; • Mengoptimalkan personil yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan bagian kepegawaian Dishub serta BKD apabila memungkinkan; • Melakukan koordinasi dengan BPKAD berkaitan dengan aset dan melakukan inventarisasi mana saja yang perlu diperbaiki dengan didukung data valid serta ada <i>reasoning</i> yang jelas sehingga ketika diusulkan untuk didanai bisa terealisasi.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Sarana dan prasarana kerja memadai; - Ketersediaan dana tepat waktu; - Akselerasi ketercapaian output sub kegiatan; - Jalinan komunikasi dan kerjasama antar bidang; - Peran serta media sosial dalam meningkatkan promosi program dan kegiatan; - Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 dan 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;	- Keterbatasan aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; - Kegiatan bersifat penyediaa; - Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi Perangkat Daerah lain (diklat pegawai); - Keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah; - Rendahnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah; - Sarana pendukung layanan perpustakaan dan layanan perbaikan arsip belum mencukupi permintaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.	- Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk menambah personil di dalam penyusunan program dan kegiatan, serta dapat mengirimkan personil untuk mengikuti diklat terkait perencanaan maupun yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan; - Menyusun perencanaan dan penganggaran yang tepat, yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mencegah keterlambatan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai target; - Perlunya koordinasi lintas Perangkat Daerah secara intens dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan Perangkat Daerah lain; - Perlu dilakukan penyuluhan terkait pentingnya kegiatan yang berkaitan dengan urusan perpustakaan guna mendukung keikutsertaan masyarakat; - Berkoordinasi dengan intens bersama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan perpustakaan di daerah; - Membuat analisis kebutuhan sarana pendukung layanan perpustakaan dan berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Tim TAPD dalam hal dukungan terhadap ketersediaan dana dan sarana pendukung tersebut.
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; - Beberapa program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang disusun.	- Pada pelaksanaan kegiatan TA. 2023 beberapa kegiatan masih terlambat memproses LS sehingga untuk realisasi kinerja sudah tercapai sementara uang belum terealisasi; - Realisasi kegiatan tidak sesuai dengan alokasi anggaran; - Belanja Sewa Kantor di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang belum	- Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Melakukan Rekonsiliasi laporan keuangan dan kinerja secara periodik; - Melakukan evaluasi dan review semua kegiatan;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			bisa direalisasikan karena terkendala komponen yang tidak sesuai dengan belanja. - Operasionalisasi laporan penatausahaan melalui aplikasi SIPD masih mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan SP2D GU; - Dalam hal pengadaan barang dan jasa adanya perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah; - Adanya ketentuan pembelian barang harus berbasis TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sementara belum semua barang elektronik merupakan produk dalam negeri menyebabkan pembelian barang elektronik sedikit terhambat;	- Melakukan review target indikator kinerja program dan kegiatan; - Koordinasi dengan Tim TAP (sistem), Bappeda dan BPKAD terkait keterbatasan dan gangguan pada SIPD.
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Pelaksanaan rutin evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; - Pelaksanaan monitoring oleh Kepala Dinas memacu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.	- Perubahan <i>timeline</i> kegiatan dan penentuan luasan target pekerjaan menjadi penyebab keterlambatan; - Adanya pemeriksaan oleh BPKP terhadap kegiatan hibah kompetitif di awal bulan April 2023 sehingga perlu menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, menunggu keputusan Gubernur terkait verifikasi hibah kompetitif yang sedang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No 13 tahun 2021; - Terhambatnya kegiatan media komunikasi publik; - Terhambatnya SK verifikasi untuk belanja hibah kompetitif karena menunggu hasil revidi BPKP; - Deviasi sebesar 95 persen karena belum mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) di Bulan Maret 2023 - Adanya deviasi lebih dari -11,00 persen karena belum adanya penyelenggaraan kegiatan dan undangan untuk mengikuti	- Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi atau risiko terhadap dinamika yang terjadi misalnya keterlambatan kegiatan media komunikasi publik, tertundanya SK verifikasi untuk hibah kompetitif, pemenuhan undangan, perubahan rencana pengadaan, dsb. - Berkoordinasi secara intens dengan BPKP terkait pemeriksaan kegiatan hibah kompetitif dan pihak dari Gubernur terkait pengajuan verifikasi hibah kompetitif; - Mencermati kembali Rencana Anggaran Kas (RAK) yang disusun dan melakukan pergeseran anggaran jika diperlukan; - Berkoordinasi intens dengan bagian keuangan khususnya terkait kelengkapan dokumen untuk pemenuhan SPJ.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			kursus singkat pelatihan, karena itu realisasi kinerjanya masih rendah; • Perubahan rencana pengadaan barang dan jasa, sudah dirancang tiap triwulan dan ada perubahan ke triwulan II; • Belum mengajukan Belanja Langsung pada pekerjaan belanja kebersihan, keamanan dan sopir; • Pada Program Pemasaran Pariwisata mundur dari jadwal; • Beberapa SPJ masih dalam proses kelengkapan dokumen karena ada beberapa penyesuaian yang harus dipenuhi.	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait; • Sarana dan prasarana kerja yang memadai; • Koordinasi yang baik antara dinas dengan Cabang Dinas serta UPTD dalam penyediaan data dan informasi; • Tersedianya aplikasi yang mempermudah pengguna izin dalam melakukan layanan perizinan dan pelaporan kegiatan usaha.	• Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan pelaporan dan perpanjangan izin melalui sistem yang telah disediakan; • Terkendalanya pengajuan perizinan pada sektor air tanah yang terdapat di Pemerintah Pusat melalui Sistem OSS; • Tidak tersedianya keseluruhan data yang menjadi acuan dalam perhitungan indikator kinerja pada perusahaan pengguna izin menyebabkan beberapa aspek dalam penilaian tidak dapat terpenuhi; • Beberapa data dukung pada sektor energi belum tersedia di beberapa wilayah cabang dinas;	• Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait pentingnya pelaporan dan perpanjangan izin usaha dalam sistem; • Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat secara intens terkait pengajuan perizinan pada sektor air tanah melalui Sistem OSS; • Menyusun analisis risiko terhadap ketidakterediaan kebutuhan data yang menjadi acuan dalam perhitungan indikator kinerja pada perusahaan pengguna izin serta data dukung pada sektor energi; • Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi terhadap dinamika yang terjadi; • Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. • Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; • Perlu menerapkan koordinasi, kolaborasi dan inovasi dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dan pihak yang terkait.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
23	Dinas Kehutanan	- Koordinasi yang cukup baik antara Dinas dengan UPTD dan CDK dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	- Terdapat beberapa komponen yang harga di DPA tidak sesuai dengan yang terdapat di katalog; - Adanya kebutuhan khususnya untuk kantor-kantor yang baru yang sebelumnya masih kontrak dan menyebabkan listrik masih memiliki daya yang rendah dan belum ada internet serta membutuhkan genset; - Kendaraan dinas Provinsi juga dipakai di kabupaten/kota sehingga Provinsi tidak memiliki kendaraan dinas yang cukup; - Kapasitas pegawai pengelola program/kegiatan sangat terbatas; - Adanya mutasi/rotasi pejabat dimana hal tersebut berimbas pada perubahan kebijakan atau adanya evaluasi terhadap DPA yang sudah disusun sehingga mengakibatkan realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran tertunda dari yang sudah direncanakan sebelumnya; - Pembelian <i>drone</i> di CDK I belum bisa dilaksanakan karena masih dalam proses pemilihan rekanan dan peyesuaian spesifikasi; - Proses pemasangan instalasi listrik kantor sekita 40 juta masih dalam proses pembayaran; - Banyak dokumen yang sudah bersifat elektronik dan hanya sebagian dokumen yang sifatnya harus dicetak/arsip fisik; - Di CDK IV terdapat spesifikasi barang pabrikan yang tidak tersedia dengan yang ada di DPA. Selain itu adanya keterbatasan jumlah bangunan yang memiliki kesesuaian untuk dijadikan gedung kantor serta adanya keterbatasan SDM; - Adanya mutasi pejabat di CDK V yang mengakibatkan keterlambatan SK dari PPK;	- Tingkatkan koordinasi yang intensif dengan UPTD dan CDK Bidang Kehutanan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diketahui dan segera dilakukan perbaikan; - Meningkatkan kompetensi aparatur pelaksana program dan kegiatan serta tetap berkoordinasi dengan BPSDM untuk mengikutsertakan aparatur Dinas Kehutanan di dalam bimtek atau pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan; - Tetap berkoordinasi dengan BPKAD dalam mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi atau risiko terhadap dinamika yang terjadi misalnya karena adanya mutasi/rotasi pejabat; - Berkoordinasi dengan ihak penyedia dalam merespon pesanan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			- Deviasi terjadi di CDK V dikarenakan adanya beberapa harga barang yang terdapat di DPA berada di bawah harga barang yang terdapat pada M-Biz Market; - Adanya keterlambatan pihak penyedia dalam merespon pemesanan cetakan pada CDK IX sehingga terealisasi di bulan berikutnya.	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Sebanyak 3 (tiga) kawasan konservasi perairan di Jawa Barat sudah ditetapkan dengan KepMenKP; - Adanya pengembangan luas kawasan pergarman dalam beberapa tahun terakhir dapat meningkatkan luas pengelolaan laut kewenangan DKP; - Sudah dilakukan koordinasi dengan Kabupaten terkait dan ketua; - Smartfishing sebanyak 460 unit; - Memiliki potensi budidaya ikan yang tinggi; - Koordinasi dengan pihak DPMPTSP Jabar, Target pelaku usaha sudah diterbitkan DPMPTSP Jabar; - Adanya bazar produk hasil perikanan yang dilaksanakan secara rutin; - Koordinasi yang baik antar unit kerja.	- Untuk kawasan konservasi yang baru ditetapkan MenKP pada tahun 2021 dan 2022, Kajian Rencana Pengelolaannya baru selesai dilaksanakan sehingga belum optimal pengelolaannya; - Curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada lamanya proses kristalisasi garam pada meja tunnel; - Belum siapnya lahan dikarenakan masih terendam oleh air; - Memiliki potensi budidaya ikan yang tinggi sehingga perlu menjadi perhatian; - Kekurangan SDM dan dukungan anggaran belum optimal.	- Melakukan koordinasi intens dengan pihak pengelola terkait kawasan konservasi yang baru ditetapkan MenKP; - Perlunya adanya penyediaan sarana produksi garam; - Dapat membuat pengusulan pembangunan pelabuhan perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan; - Berkoordinasi dengan BKd khususnya dalam pengusulan perekrutan pejabat Fungsional Pengawas Perikanan; - Dikarenakan potensi budidaya ikan yang tinggi maka diperlukan peningkatan frekuensi pengawasan; - Menyusun telaahan terkait kebutuhan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebelum mengajukan pengusulan.
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Koordinasi yang intensif antar bidang dan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; - Komitmen dan kerja sama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.	- Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan dan penganggaran; - Komponen e-budgeting yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.	- Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Merumuskan komponen e-budgeting yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan.
26	Dinas Perkebunan	Baiknya koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari semua pihak yang terkait sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berkelanjutan dan dampaknya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat khususnya para petani perkebunan;	- Adanya keterlambatan dalam proses fasilitasi sarana berupa pupuk karena adanya keterlambatan respon dari penyedia e-catalog (BPPBP); - Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pupuk organik dan NPK telah dilaksanakan secara fisik pada bulan Maret namun	- Melakukan penyesuaian anggaran di pergeseran sehingga kegiatan dapat direalisasikan dengan baik dan juga melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan; - Melakukan koordinasi secara intens dengan para penyedia barang/jasa dan melakukan



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		- Partisipasi aktif para petani yang bergabung dalam suatu kelompok tani dalam setiap sub kegiatan yang dilaksanakan; - Kesadaran para petani akan pentingnya peningkatan kompetensi yang dimiliki untuk menjadi petani perkebunan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan kualitas perkebunan yang mereka miliki, baik kompetensi kelembagaan untuk berkelompok dengan petan-petani lainnya, kompetensi dalam budidaya dan pengolahan maupun kompetensi dalam berwirausaha guna meningkatkan nilai produk perkebunan yang diproduksi; - Tujuan pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat yang sangat dibutuhkan bagi para petani dalam peningkatan kompetensi petani, kelembagaan petani, dan akses permodalan bagi para petani; - Dukungan serta peran pihak-pihak yang terlibat, seperti Dinas Kabupaten/Kota, Fasilitator Daerah, Asosiasi Petani Perkebunan, dan pihak lainnya.	pencairan anggaran masih dalam tahap melengkapi dokumen pendukung; - Target awal untuk rehabilitasi gedung parkir lebih besar dibandingkan dengan rehabilitasi atap sehingga kegiatan rebilitasi gedung parkir dialihkan sebagian untuk rehabilitasi gedung atap dengan cara mengalihkan anggarannya pada pergeseran anggaran yang menyebabkan pengunduran pelaksanaan kegiatan; - Terkait Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terdapat penundaan pelaksanaan karena adanya perubahan kebijakan dari pokja yaitu GTRA wajib membina petani yang mendapat tanah redistribusi sehingga harus ada penyesuaian anggaran kembali (Banglin); - Terkait Kegiatan Bimtek Petani Milenial terdapat adanya perubahan jadwal pelaksanaan karena peserta pelatihan mengikuti pelatihan di Dinas KUK, ditambah dengan keterbatasan waktu di bulan Februari serta terjadi perubahan lokasi dari rencana awal kegiatan yg sebelumnya di hotel menjadi di Dinas Perkebunan dan adanya keterlambatan CPCL dari Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda (SDP); - Terdapat ketidaksesuaian terkait Perhitungan jumlah pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan sehingga harus diperhitungkan Kembali (Sekretariat); - Terdapat keterlambatan dengan pemilihan penyedia sehingga pelaksanaan Kegiatan mengalami penundaan (Sekretariat); - Terdapat sisa mati dari realisasi anggaran sebagian kegiatan melalui E-catalog karena	koordinasi dengan PPTK dan PPK dalam pemilihan penyedia; - Melakukan koordinasi dengan Pejabat terkait untuk penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL); - Rutin melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi keterlambatan dalam proses pelaksanaan; - Memaksimalkan anggaran dan SDM yang tersedia, melakukan bimbingan teknis, dan praktek untuk SDM yang berkaitan dengan pekerjaan teknis di lapangan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			adanya negosiasi harga di dalamnya sehingga sebagian kegiatan lainnya mengalami penundaan pelaksanaan karena penyesuaian anggaran di pergeseran (Sekretariat).	
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; - Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan; - Kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa jenis tanaman sesuai dengan jadwal tanam.	- Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan; - Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran; - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal tanam.	- Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Tetap berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Menyusun telaahan terkait pengendalian kinerja khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dinasmis atau yang tidak sesuai dengan target/jadwal yang ditetapkan.
28	Sekretariat Daerah	- Adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas diantara pemegang kegiatan di Biro, Verifikatur, dan pihak ketiga; - Aparatur pelaksana kegiatan memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, serta ketersediaan dana tepat waktu; - Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan pelaporan kinerja kegiatan tepat waktu; pemahaman SDM mengenai teknis pelaksanaan kegiatan juga cukup baik.	- Terjadinya pandemi COVID- 19 sejak awal Triwulan I Tahun 2020, berdampak pada terjadinya pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan <i>refocussing</i> anggaran; - Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka perlu diperlukan adanya penyesuaian target dan anggaran pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah; Biro Umum - Kekurangcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran, target keuangan dan fisik, RUP dan KAK; - Kasus SK PPK/PPTK terlambat diterima;	- Melakukan penyesuaian target kinerja dan inovasi pelaksanaan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan kegiatan serta perlu adanya penyesuaian target kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan; - Meningkatkan kapasitas sumber daya melalui Diklat atau pelatihan agar lebih tepat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; - Optimalisasi capaian kinerja triwulan berikutnya dengan memperhatikan skema perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya; - Membuat standar baku yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan hibah serta aturan kewajiban calon penerima bantuan hibah; - Menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik termasuk antisipasi atau risiko terhadap dinamika yang terjadi



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			- Kurangnya pemahaman mengenai teknis pembayaran non tunai menjadi hambatan. Biro Administrasi Pimpinan - Adanya peralihan platform dari penggunaan M-Biz ke e-katalog; - Mebutuhkan penyesuaian output pada subkegiatan dikarenakan output dirasa tidak sesuai dengan yang tercantum pada Kepmendagri 050-5889/2021. Biro Kesejahteraan Rakyat - Dibutuhkan sebuah standar baku yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hibah bidang pendidikan; - Kurangnya pemahaman tentang kewajiban calon penerima bantuan hibah; - Akan dilaksanakan pengelolaan data hasil evaluasi dan hasil MOU Tri Darma Perguruan Tinggi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa - Adanya pelantikan jabatan sehingga membutuhkan waktu dalam penyesuaian pekerjaan; - Terdapat kegiatan yang bersifat persediaan untuk pengawalan terhadap pelaksanaan proses pemilihan sehingga belum direalisasikan; - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih dalam proses sehingga belum dapat dicetak. Biro Perekonomian - Terkait pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya, adanya perubahan waktu dan tempat pelaksanaan inagurasi petani milenial;	misalnya karena adanya pergantian/mutasi pejabat; - Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk mempercepat proses kelengkapan dokumen/persyarat administrasi untuk SPJ; - Perlu dilakukan penjadwalan ulang untuk penyesuaian tempat dan waktu rapat mengingat efisiensi dalam penyelenggaraan rapat secara luring di ruang rapat tidak optimal akibat renovasi gedung Sekretariat Daerah. - Perlu adanya koordinasi atau sosialisasi antara Biro Organisasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait pendataan layanan publik yang sebaiknya dilakukan satu pintu untuk memenuhi target Gubernur, dimana diperlukan publikasi segera atas layanan publik pemerintahan provinsi Jawa Barat di Portal Jabar.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			- Adanya kekurangcermatan dalam penentuan target keuangan dan target fisik sehingga akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan teknis pelaksanaan. Biro Organisasi - Perubahan skema kegiatan yang awalnya paket <i>meeting</i> dalam kota menjadi perjalanan dinas biasa; - Penjadwalan kegiatan yang bentrok dengan kegiatan lain yang lebih prioritas di lingkup kelembagaan serta adanya beberapa kegiatan fisik yang belum masuk ke dalam SPJ; - Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum bisa dibayarkan karena adanya pergeseran; - Adanya perubahan kebijakan internal dalam pelaksanaan pembinaan Reformasi Birokrasi pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dari yang semula pembinaan dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi pembinaan yang dilakukan secara daring, sehingga menyebabkan realisasi belanja menjadi tidak dapat diserap secara penuh; - Adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan melalui surat deputy RB Kunwas Kementrian PAN dan RB No B/01/RB./06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bahwa dalam surat tersebut menyatakan pemberhentian seluruh proses tahapan, yang menyebabkan seluruh rencana kegiatan atau target kinerja yang telah ditetapkan menjadi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan perubahan regulasi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru dirilis per tanggal 16 Maret 2023 melalui Permenpan RB No. 3	



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			Tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap RB Nasional; • Efisiensi dalam penyelenggaraan rapat secara luring di ruang rapat tidak optimal dikarenakan ketersediaan tempat akibat renovasi gedung Sekretariat Daerah; • Terjadi penyusunan ulang terhadap prioritas hasil sub kegiatan dengan berfokus pada pendataan layanan publik untuk memenuhi target Gubernur, publikasi segera atas layanan publik pemerintahan provinsi Jawa Barat di Portal Jabar. Kegiatan pengumpulan ini dilakukan via desk fisik maupun virtual yang belum membutuhkan penyerapan biaya. Kendala yang ditemui daftar layanan tidak segera tersedia di Perangkat Daerah secara satu pintu mengingat pelayanan banyak yang dilakukan di level di bidang ataupun UPT. Penyerapan juga belum bisa dilakukan mengingat penundaan terhadap rekrutmen tim digital yang akan mendukung proses di biro organisasi mengingat kejelasan kebijakan penganggaran tenaga ahli analisis sistem dan <i>programmer</i>.	
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	• Koordinasi yang baik antar bagian dalam penyediaan data dan informasi; • Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan; • DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki tiga fungsi strategis yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dan Sekretariat DPRD merupakan unsur supporting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang sudah cukup baik selama ini.	• Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran; • Komponen <i>e-budgeting</i> yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel; • Lemahnya koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan di Setwan; • Lemahnya standar mutu pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan di Setwan.	• Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; • Merumuskan komponen <i>e-budgeting</i> yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan; • Perlunya penegasan bahwa semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Sekretariat DPRD harus melaksanakan pelayanan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (<i>better performance</i>).
30	Badan Kepegawaian Daerah	• Dilakukan monitoring dan evaluasi dengan bidang secara berkala dalam penentuan	• Kegiatan yang masih menunggu jadwal dari instansi penyelenggara kegiatan;	• Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja tidak cukup baik;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		target dan faktor penghambat serta mencari solusi dari permasalahan; - Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala melalui Rapat Pimpinan untuk melihat progres sejauh mana kinerja yang ada di bidang; - Sarana dan Prasana menjadi modal kelancaran dalam bekerja.	- Penentuan perencanaan kegiatan yang tidak cermat; - Masih adanya kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat).	- Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; - Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan BKD dengan RKPD dan RPJMD.
31	Badan Pendapatan Daerah	- Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja Bapenda untuk optimal melaksanakan program/kegiatan sesuai yang direncanakan yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Gubernur Jawa Barat; - Adanya momen pergeseran Anggaran 2023; - PPK di tiap unit kerja Bapenda sudah mematuhi ketentuan Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah khususnya terkait pengadaan barang/jasa s.d 200 juta telah menggunakan e-purchasing tool daring - Koordinasi yang baik antara Bapenda Pusat dengan P3DW se-Jawa Barat dalam penyediaan data dan informasi; dan - Sudah ditetapkan SP Ketua Tim di tiap unit kerja dari kelompok jabatan fungsional hasil penyetaraan. - Semakin meningkatnya peran sistem pengendalian internal di setiap unit pelaksanaan kegiatan serta arahan perbaikan kebijakan dari kantor Pusat Bapenda.	- Anggaran Kas antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sub kegiatan/aktivitas berbeda; - Masa Transisi (perubahan SOTK, Penyederhanaan Birokrasi perpindahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, mutasi, dan promosi lingkup Bapenda); - Masih terdapat beberapa komponen belanja pemeliharaan belum terakomodir dalam Standar Biaya - Pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa masih belum optimal. - Terbatasnya pelaksana SDM untuk membantu administrasi keuangan karena menjalankan tugas membantu pelayanan.	- Peningkatan pada pada penentuan target indikator-indikator kinerja (Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan) agar selaras antara Renstra, Renja, dan DPA - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana - Konsolidasi, monitoring dan evaluasi kinerja bulanan secara konsisten dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kepada seluruh unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam meningkatkan kinerja pendapatan dan belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan; - Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas dengan tetap berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas; - Menentukan prioritas pada pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung optimalisasi pencapaian target pendapatan; - Lebih cermat dalam menyusun anggaran kas pergeseran.
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;	Mebutuhkan tambahan personil Fungsional Peneliti dengan berbagai macam kepakaran supaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kelitbangan sesuai dengan	Berkoordinasi dengan BKD terkait penambahan personil Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat;



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		- Berkolaborasi dengan berbagai Lembaga Kelitbangan di Perguruan Tinggi dan di Kementerian, sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama yang di lakukan; dan - Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan di Jawa Barat; dan Belum mempunyai personil Fungsional Analis Kebijakan untuk menindaklanjuti hasil kelitbangan jadi Naskah Policy Brief, Naskah Akademik, dan lain-lain untuk bahan kebijakan pimpinan.	Berkoordinasi dengan kepegawaian untuk menambah personil lainnya sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK).
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Sarana dan Prasarana kerja memadai; - Ketersediaan dana tepat waktu	- Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan; - Proses pencairan dana mengalami keterlambatan; - Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas kegiatan; - Kegiatan bersifat penyediaan.	- Tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan untuk dapat menambah aparatur atau SDM dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan; - Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran - Tetap berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Selalu berkoordinasi dengan Pejabat/Pimpinan untuk membuat jadwal pergeseran pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas kegiatan sehingga di bulan selanjutnya sudah bisa disesuaikan dengan jadwal yang baru.
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat Subbidang/Subbagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan dapat mengendalikan mengevaluasi, dan menyetujui secara sistem; - Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda – BPKAD – Biro Organisasi pada proses e-planning, e-budgeting dan penetapan komponen belanja yang menjadi regulasi berupa Standar Biaya	- Rincian komponen di sistem yang belum sesuai sehingga harus ditetapkan komponen yang baru dan menunggu pergeseran anggaran; - Terbatasnya kuota internet yang dimiliki dengan jumlah pengguna yang banyak, sehingga jaringan menjadi lamban dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di lingkup BPSDM; - Dalam pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada Narasumber dari luar karena keterbatasan praktisi di lingkup BPSDM; - Penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat keterlambatan	- Merumuskan komponen belanja yang lebih detail dan jelas sehingga para perencana akan lebih mudah dalam merencanakan pembelanjaan; - Berkoordinasi secara internal terkait kebutuhan jaringan internet ataupun dengan Diskominfo dalam peningkatan sistem jaringan; - Berkoordinasi dengan BKD terkait kebutuhan SDM yang dapat menjadi Narasumber di lingkup BPSDM; - Berkoordinasi dengan mitra terkait fasilitasi yang dilakukan; - Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).	pembayaran karena menunggu pengajuan dari pihak ketiga sehingga belum bisa dibayarkan. - Kegiatan bersifat fasilitasi sehingga kegiatan bergantung kepada mitra dan banyak komponen asessor dari lingkungan pemerintah daerah Jawa Barat, sehingga tidak perlu dibayarkan honorarium. - Anggaran bersifat penyediaan, dan adanya rasionalisasi pada belanja bahan bakar. - Perubahan Penjadwalan Diklat yang ditentukan oleh Kementerian. - Adanya penyesuaian komponen barang pada DPA pergeseran. - Realisasi kegiatan tergantung agenda acara dan undangan perangkat daerah terkait.	berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana - Proses pergeseran yang sifatnya dinamis, dengan frekuensi yang makin berkurang hingga tercapai keseimbangan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga belanja bisa terlaksana tanpa banyak deviasi.
35	Badan Penghubung	- Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan; - Pemanfaatan Tim Kerja untuk membantu percepatan pelaksanaan kegiatan;	- Lokasi jarak antar 2 (dua) kantor (Badan Penghubung dan Anjungan di TMII) membutuhkan koordinasi dan manajemen pengelolaan kegiatan yang baik sehingga tetap adanya distribusi hasil penyediaan/pengadaan belanja barang/jasa sesuai kebutuhan di tiap unit; - Proses penyesuaian pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dan informasi di Anjungan terkait kebijakan baru teknis dan manajemen TMII.	- Proses koordinasi bisa dilakukan dengan menggunakan media online secara rutin seperti <i>zoom meeting</i>; - Membuat perencanaan yang lebih matang, disesuaikan dengan waktu dan kondisi, melaksanakan manajemen kinerja yang baik dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan mengingat lokasi Badan Penghubung dan Anjungan di TMII yang cukup jauh; - Mengoptimalkan Tim Kerja yang sudah dibentuk dan meningkatkan koordinasi antara PPTK, Pengelola Keuangan dan Tim Perencanaan.



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan; - Penjadwalan ulang kegiatan yang sempat terhambat; - Melaksanakan peningkatan kapasitas/in house training bagi seluruh aparatur di Bappeda Provinsi Jawa Barat agar dengan jumlah pegawai yang masih kurang tetap dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan; - Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektivitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan; - Waktu pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal dengan didukung melalui SP pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang memadai; - Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota; dan - Penyamaan persepsi melalui bimbingan teknis pengisian form laporan.	- Adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal; - Adanya pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan dari triwulan II menjadi triwulan III dan triwulan IV; - Adanya penyesuaian anggaran pada SPB Tahun 2023 khususnya pada kode rekening perjalanan dinas serta pelaksanaan kegiatan/acara yang dilakukan di hotel; - Adanya penundaan penyusunan Background Study RPJPD karena mendahulukan penyelesaian dokumen RPD dan RKPD; - Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi lebih banyak dilaksanakan secara virtual/menggunakan fasilitas kantor dan perangkat dinas lain/ dilaksanakan di dalam kota, sehingga anggaran makan/minum rapat, paket meeting dan perjalanan dinas belum terserap secara optimal; - Adanya pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan personil yang sama; - Adanya keterlambatan dalam penyelesaian administrasi pembayaran honorarium dan paket meeting yang disebabkan oleh perbedaan kodering (meeting dalam kota dan luar kota);	- Menambah jumlah personil perencana untuk mengurangi beban tugas setiap pemegang mitra perangkat daerah sehingga dapat melaksanakan DPA sesuai dengan yang direncanakan; - Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan; - Melakukan pertanggungjawaban terkait pengadministrasian pembayaran secara cermat dan segera; - Melakukan pemilahan secara cermat terhadap undangan yang sangat penting untuk dihadiri atau tidak; - Melakukan sinkronisasi perencanaan dalam pelaksanaan DPA dengan proses perencanaan dan penganggaran; dan - Melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan antarbidang.
37	Inspektorat	- Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan; - Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan-fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan; - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun	Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin	- Koordinasi dengan BKD dan BPSDM terkait kebutuhan aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) di lingkup Inspektorat serta kebutuhan peningkatan kompetensi untuk aparat pengawasan yang ada; - Koordinasi dapat juga dilakukan dengan Biro Organisasi untuk menyeimbangkan jumlah personil dengan beban kerja serta kebutuhan formasi jabatan di Inspektorat sehingga dapat melaksanakan pencapaian target kinerja dan



NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal; Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi.	berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relative singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya; Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Auditan ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan itu sendiri.	penyerapan anggaran sesuai dengan DPA yang sudah direncanakan; - Membuat perencanaan yang lebih matang, disesuaikan dengan waktu dan kondisi, melaksanakan manajemen kinerja yang baik dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan serta mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan; - Mencermati kembali Rencana Anggaran Kas (RAK) yang disusun dan melakukan pergeseran anggaran jika diperlukan.
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan; - Sinergitas antar pemangku kebijakan (stakeholder) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; - Komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.	- Terdapat perbedaan satuan antara indikator program dan indikator kegiatan (persen dan jumlah); - Terdapat beberapa indikator kegiatan yang harus diperbaiki/direvisi karena tidak dapat dihitung sebagai output.	- Diharapkan petugas SIPD di Perangkat Daerah agar lebih teliti dalam menyelaraskan satuan indikator kinerja program dan kegiatan; - Diperlukan adanya keselarasan antara target indikator program dan kegiatan serta realisasi kinerja sehingga capaian indikator kegiatan dan capaian indikator program dapat dihitung (<i>measurable</i>). Pemahaman ini diperlukan oleh para perencana dan evaluator dalam mengendalikan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023, diolah



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait capaian makro daerah, perekonomian Jawa Barat Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen. Namun, Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai normalnya kegiatan masyarakat dimana di tahun lalu masih ada pembatasan-pembatasan, namun saat ini sudah tidak terlalu ketat sehingga aktivitas masyarakat juga mulai meningkat;
2. Ekspor Jawa Barat pada Mei 2023 naik sebesar 48,49 persen dibanding April 2023, yaitu dari USD 2,26 miliar menjadi USD 3,35 miliar. Demikian juga jika dibandingkan dengan Mei 2022, ekspor Jawa Barat naik 24,79 persen. Kenaikan ekspor pada Mei 2023 dibandingkan April 2023 disebabkan oleh meningkatnya ekspor Nonmigas 50,04 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Jawa Barat Januari-Mei 2023 mencapai USD 14,80 miliar atau menurun 5,82 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022;
3. Impor Jawa Barat pada Mei 2023 mencapai USD 1,24 miliar atau meningkat 73,41 persen dibanding April 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan Mei 2022, nilai impor tersebut turun 0,90 persen. Impor Nonmigas pada Mei 2023 mencapai USD 1,12 miliar atau meningkat 78,34 persen dibanding April 2023. Demikian juga jika dibanding Mei 2022, nilainya naik 10,96 persen. Impor Migas Mei 2023 mencapai USD 117,49 juta atau naik 37,25 persen dibanding April 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Mei 2022, nilainya menurun 50,92 persen;



4. Pada Juni 2023 terjadi inflasi y-o-y sebesar 3,88 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,27 pada Juni 2022 menjadi 116,63 pada Juni 2023. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran;
5. TPT periode Februari 2023 sebesar 7,89 persen dan nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 yaitu sebesar 8,35 persen. Beberapa catatan peristiwa yang terjadi khususnya terkait Ketenagakerjaan diantaranya: luas panen padi Februari 2023 meningkat dibandingkan Februari 2022; mulai berjalannya proyek Kementan terkait pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan generasi muda di sektor pertanian; peningkatan tenaga kerja pendukung PLN unit induk distribusi Jawa Barat menjelang tahun baru Imlek awal tahun 2023; finalisasi proyek prioritas nasional seperti kereta cepat Bandung-Jakarta, Tol Cisumdawu-Cimalaka, dan Tol Bocimi; aktivitas sekolah, perkuliahan, perkantoran pasca pandemi COVID-19 kembali meningkat; perekrutan tenaga kerja administrasi, satuan pengamanan dan pramubakti KPU; serta pembukaan beberapa aktivitas wisata baru dan aktifnya lokasi wisata;
6. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Barat yang diukur oleh Gini Ratio berada pada angka 0,425 dan untuk daerah perkotaan tercatat sebesar 0,439, sedangkan daerah perdesaan tercatat sebesar 0,321. Menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan di Jawa Barat termasuk ke dalam ketimpangan sedang, sementara daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah;
7. Terkait kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,62 persen, menurun 0,36 persen poin terhadap September 2022 dan turun sebesar 0,44 persen poin terhadap Maret 2022. Beberapa faktor yang berkaitan dengan ketercapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2023 diantaranya karena realisasi belanja bantuan sosial dari APBD Jawa Barat pada triwulan I-2023 meningkat signifikan (*year on year*), nilai Tukar Petani juga meningkat 6,02 persen dan Indeks Harga yang diterima petani meningkat 10,87 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan daya beli petani. Produksi Padi



sepanjang Januari-Maret 2023 juga meningkat dibanding Januari-Maret 2022 yang sebesar 2,39 juta ton GKG (hasil Kerangka Sampel Area) dan berbagai faktor lainnya;

8. Terkait pelaporan kinerja pada Triwulan II Tahun 2023, 38 Perangkat Daerah telah melaporkan hasil evaluasi secara lengkap. Pelaporan Biro pada Sekretariat Daerah sudah tercantum dalam laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah. Semua Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam menyampaikan laporan evaluasi kinerja, baik secara Sistematis maupun input data realisasi pada Aplikasi E-Monev, meskipun penggunaan aplikasi masih membutuhkan pendampingan;
9. Rata-rata tingkat capaian kinerja dan anggaran program Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 yaitu:
 - a. Rata-rata tingkat capaian anggaran program Perangkat Daerah sebesar 43,87 persen dengan predikat masih Sangat Rendah;
 - b. Penyerapan atau realisasi anggaran Perangkat Daerah mencapai Rp14.885.861.138.335,- dari total Anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp33.931.471.129.658,-;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran terbesar pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu sebesar Rp280.440.440.207,- atau sekitar 94,34 persen dari pagu anggaran Rp297.253.713.553,- dan penyerapan anggaran terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp45.177.013.192,- dari total pagu anggaran Rp153.666.677.273,- atau sekitar 29,40 persen;
 - d. Untuk rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 42,16 persen;
 - e. Predikat tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah masih Sangat Rendah dengan nilai capaian masih berada di bawah 50 persen;
 - f. Kinerja Perangkat Daerah tertinggi dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan nilai kinerja sebesar 69,24 persen dan capaian kinerja terendah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai kinerja 9,48 persen.



10. Rendahnya capaian anggaran dan kinerja Program Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala umum yang dihadapi antara lain: kekurangcermatan SDM bidang perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau penempatan anggaran yang belum tepat sesuai rencana kegiatan. Selain itu, kendala sumber daya yang terbatas seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil, baik dalam kompetensi teknis maupun administratif serta ketersediaan anggaran di beberapa program Perangkat Daerah yang sangat terbatas. Kendala lain yaitu proses pengadaan yang mengalami keterlambatan, bahkan di beberapa kegiatan masih terdapat proses pengadaan belum dimulai. Ditambah lagi, banyak kegiatan yang sifatnya penyediaan, sedangkan di awal tahun pelaksanaan kegiatan masih sangat minim. Proses rotasi atau mutasi pejabat struktural yang sangat dinamis juga berpengaruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan.
11. Permasalahan dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja masih belum diisi. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta dukungan terhadap capaian kinerja pembangunan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dirumuskan beberapa rekomendasi bagi pelaksanaan program pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Mengingat tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan Evaluasi RKPD Provinsi dan Renja Perangkat Daerah per triwulan secara baik benar serta dilaporkan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
2. Tetap menjaga konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah, khususnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis/prioritas dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terhadap



RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta APBD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang terpadu;

3. Setiap Perangkat Daerah diharapkan konsisten mempedomani indikator kinerja program dan kegiatan beserta satuan indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan indikator yang konsisten antar dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan ke dokumen penganggaran maka memudahkan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Pentingnya dilakukan Sosialisasi atau Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi E-Monev Jabar kepada setiap KPA maupun PPTK yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kinerja sehingga data capaian yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran;
5. Perangkat Daerah perlu melakukan pemantauan jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal dengan baik sehingga dapat melaporkan realisasi secara periodik dengan taat;
6. Koordinasi secara intens perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan pihak-pihak terkait dalam hal perencanaan dan penganggaran, teknis pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, kebutuhan sumber daya, dan sebagainya, baik secara internal atau lintas Perangkat Daerah, bahkan dengan masyarakat maupun pelaku dunia usaha.

Demikian Laporan Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2023 ini disusun, berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan diharapkan laporan evaluasi ini dapat memberikan gambaran kondisi kinerja pembangunan daerah Jawa Barat serta dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembangunan pada triwulan dan tahun berikutnya.



2023

